



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 14134/MPK.A/PR.03.03/2022

25 Februari 2022

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Laporan Kinerja

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I.

Jakarta

Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Nadiem Anwar Makarim

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
www.kemdikbud.go.id



LAPORAN — — KINERJA 2021

Komplek Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,
Jakarta 10270





Kata — Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program dan kegiatan dan penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kemendikbud 2020-2024 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN dan LLDIKTI, Kemendikbudristek menetapkan 5 Sasaran Strategis (SS) dengan 23 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang dilaksanakan oleh 9 Unit Eselon I dan 375 Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021.

Laporan Kinerja Kemendikbudristek tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Kemendikbudristek serta menetapkan rencana aksi ke depan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang telah diidentifikasi selama tahun 2021. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan serta menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan program dan anggaran, peningkatan tata kelola Kemendikbudristek, serta peningkatan kinerja pada tahun mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Kemendikbudristek Tahun 2021.

Jakarta, Februari 2022
Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi



Nadiem Anwar Makarim

Daftar Isi

i	i	Kata Pengantar
ii		Daftar Isi
iii		Daftar Singkatan
ix		Ikhtisar Eksekutif
xii		Permasalahan Umum
xiii		Langkah Antisipasi

8	BAB II	Perencanaan Kinerja
9		Visi, Misi, dan Tujuan
10		Matriks Kinerja
12		Perjanjian Kinerja 2021 (Awal)
15		Perjanjian Kinerja 2021 (Revisi)
17		Program Prioritas

155	BAB IV	Penutup
156		Ringkasan Kinerja
157		Langkah Kerja ke Depan

BAB I	1	Pendahuluan
	2	Latar Belakang
	4	Dasar Hukum, Tugas, dan Fungsi
	5	Struktur Organisasi
	6	Isu Strategis
	7	Peran Strategis

BAB III	20	Akuntabilitas Kinerja
	21	Capaian Kebijakan di Masa Pandemi
	22	Pengukuran Kinerja
	24	Capaian Kinerja
	137	Realisasi Anggaran
	138	Efisiensi Anggaran
	139	Inovasi
	147	Penghargaan
	151	Collaborative & Crosscutting Program

Lampiran	159	
	160	Pernyataan Telah Direviu
	161	Perjanjian Kinerja 2021 (Awal)
	165	Perjanjian Kinerja 2021 (Revisi)



Daftar Singkatan

#

3T

Tertinggal, Terluar, Terdepan/Daerah Perbatasan

A

ADik

Afirmasi Pendidikan Tinggi

AKM

Asesmen Kompetensi Minimum

AN

Asesmen Nasional

ANBK

Asesmen Nasional Berbasis Komputer

APE

Alat Peraga Edukatif

APK

Angka Partisipasi Kasar

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

ATS

Anak Usia sekolah Tidak sekolah

B

BA

Bustanul Athfal

BBPPMPV

Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi

BIPA

Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing

BMN

Barang Milik Negara

BLUD

Badan Layanan Umum Daerah

BKK

Bursa Kerja Kursus

BOP

Bantuan Operasional Penyelenggaraan

BOS

Bantuan Operasional sekolah

BAPPENAS

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BPS

Badan Pusat statistik

BPP BAHASA

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

BPNB

Balai Pelestarian Nilai dan Budaya

BB

Belum Berkembang

BSB	Berkembang Sangat Baik
BSKAP	Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan
BSH	Berkembang Sesuai Harapan
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BP PAUD dan DIKMAS	Badan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
C	
CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan
CB	Cagar Budaya
COVID	<i>Coronavirus Disease</i>
CEO	<i>Chief Executive Officer</i>
CDIs	<i>Culture Development Indicators</i>
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
COE	<i>Center of Excellence</i>
D	
DAK	Dana Alokasi Khusus
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DITJEN VOKASI	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DAPODIK	Data Pokok Pendidikan
E	
EMIS	<i>Education Management Information System</i>
G	
GTK	Guru dan Tenaga Kependidikan
GSMS	Gerakan Seniman Masuk Sekolah
I	
IKK	Indikator Kinerja Kegiatan
ILM	Iklan Layanan Masyarakat



IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
IKU	Indikator Kinerja Utama
INAP	<i>Indonesia National Assesment Program</i>
IT	<i>Information Technology</i>
ITJEN	Inspektorat Jenderal
IPK	Indeks Pembangunan Kebudayaan
K	
KBM	Kegiatan Belajar Mengajar
KIP	Kartu Indonesia Pintar
KEMENPAN-RB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KEPMEN	Keputusan Menteri
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
L	
LKE	Lembar Kerja Evaluasi
LMS	<i>Learning Management System</i>
LPMP	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
M	
MB	Mulai Berkembang
MBS	Manajemen Berbasis sekolah
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MA	Madrasah Aliyah
MTS	Madrasah Tsanawiyah
MoLK	Monitoring Laporan Keuangan
MOOC	<i>Massive Open Online Course</i>
N	
NPSN	Nomor Pokok sekolah Nasional
NISN	Nomor Induk Siswa Nasional

O

OECD*Organisation for Economic Co-operation and Development*

P

PAUD

Pendidikan Anak Usia Dini

PGB

Program Guru Belajar

PKB

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

PHLN

Pinjaman Hibah Luar Negeri

PISA*Programme for International Student Assessment***PIP**

Program Indonesia Pintar

PPK

Penguatan Pendidikan Karakter

PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNS

Pegawai Negeri Sipil

PNSD

Pegawai Negeri Sipil Daerah

PT

Perguruan Tinggi

PTN

Perguruan Tinggi Negeri

PT VOKASI

Perguruan Tinggi Vokasi

PUSAKA

Pekan untuk Sahabat Karakter

P4TK

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

PIPK

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan

PKG

Pengukuran Kompetensi Guru

PKN

Pekan Kebudayaan Nasional

PKK

Pendidikan Kecakapan Kerja

PKW

Pendidikan Kecakapan Wirausaha

PMPZI

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas

PMPRB

Pedoman Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

PPDB

Penerimaan Peserta Didik Baru

PPG

Pendidikan Profesi Guru

**PP PAUD
dan DIKMAS**

Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

PUPR

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

R

RA

Raudatul Athfal

RBI

Reformasi Birokrasi Internal

RENSTRA

Rencana Strategis

RKB

Ruang Kelas Baru

RKP

Rencana Kerja Pemerintah

RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

S

SAP

Standar Akuntansi Pemerintahan

SBSN

Surat Berharga Syariah Nasional

SD

Sekolah Dasar

SDLB

Sekolah Dasar Luar Biasa

SDM

Sumber Daya Manusia

SIMKeu

Sistem Informasi Monitoring Keuangan

SKM

Survei Kepuasan Masyarakat

SMP

Sekolah Menengah Pertama

SMPLB

Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa

SMA

Sekolah Menengah Atas

SMALB

Sekolah Menengah Atas Luar Biasa

SMK

Sekolah Menengah Kejuruan

SBMPTN

Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri

SNMPTN

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri

SPI

Satuan Pengawasan Internal

SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

SPM

Standar Pelayanan Minimal

SS

Sasaran Strategis

T

TEFA

Teaching Factory

TK

Taman Kanak-Kanak

TPA

Tes Potensi Akademik

U

UAPPA

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang
Eselon I

UAPA/B

Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang

UKBI

Uji Kemampuan Berbahasa Indonesia

UKS

Usaha Kesehatan sekolah

ULT

Unit Layanan Terpadu

UKT

Uang Kuliah Tunggal

UN

Ujian Nasional

USB

Unit sekolah Baru

W

WBTB

Warisan Budaya Takbenda

WTP

Wajar Tanpa Pengecualian

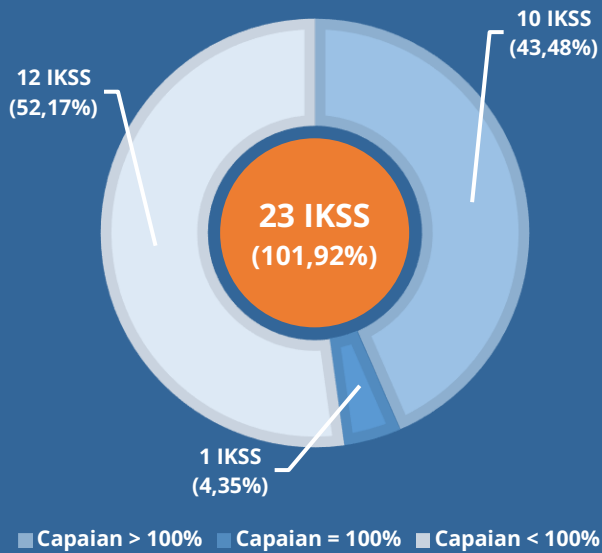
Z

ZI-WBK/WBBM

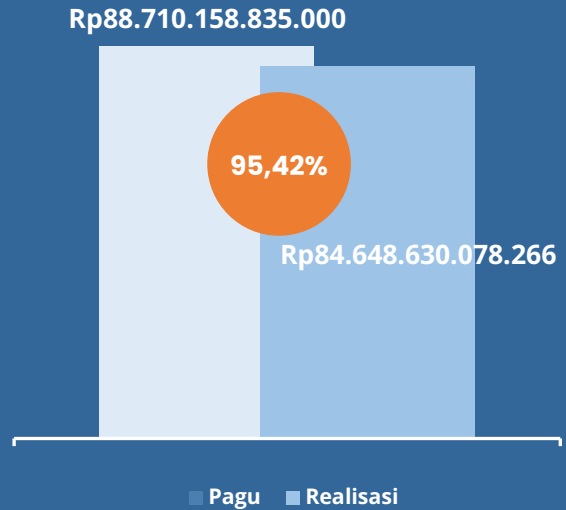
Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani

Ikhtisar Eksekutif

Capaian Kinerja

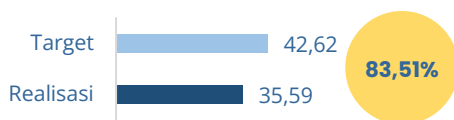


Serapan Anggaran

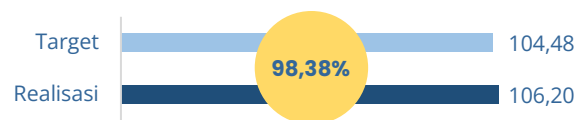


SS 1 Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang

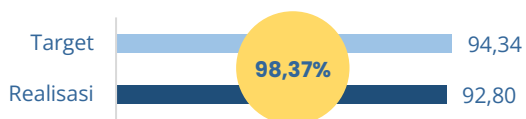
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 Tahun



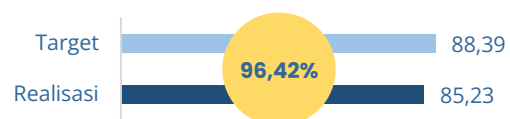
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat



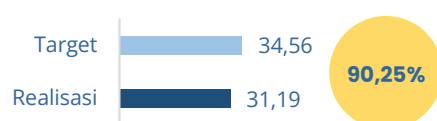
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat



Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat



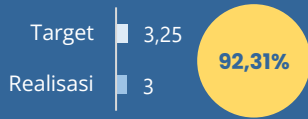
Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi



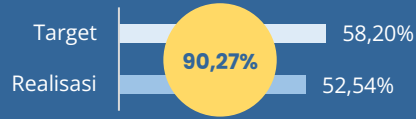


SS 2 Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan di Seluruh Jenjang

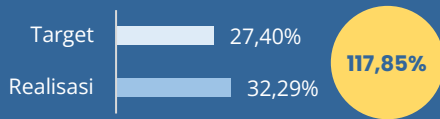
Nilai Rata-Rata Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (5-6 Tahun)



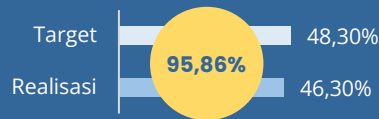
Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) Memenuhi Kompetensi Minimum



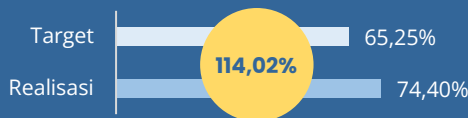
Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) Memenuhi Kompetensi Minimum



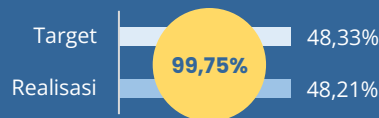
Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan



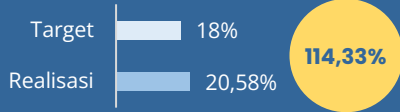
Persentase Lulusan PT yang Langsung Bekerja dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan



Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional



Persentase Guru-Guru Kejuruan SMK yang Mempunyai Pengalaman Kerja di Industri atau Sertifikasi Kompetensi yang Diakui oleh Industri

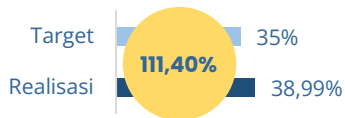


Persentase Dosen yang Memiliki Pengalaman Bekerja atau Tersertifikasi di Industri

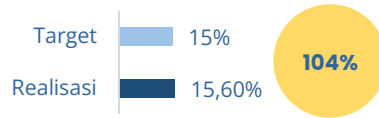


SS 3 Menguatnya Karakter Peserta Didik

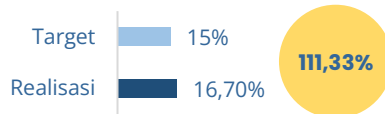
Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Lingkungan Kondusif dalam Pembangunan Karakter



Persentase Tingkat Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila



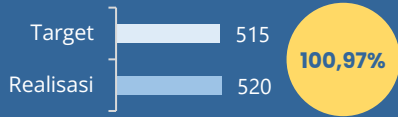
Persentase Tingkat Pemahaman Konsep Merdeka Belajar



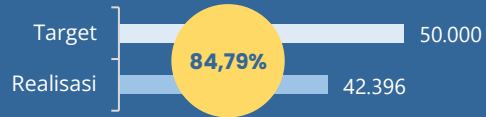


SS 4 Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

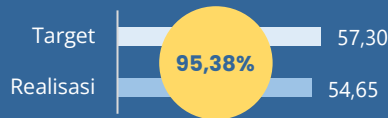
Rata-Rata Skor Kemahiran Berbahasa Indonesia



Jumlah Penutur Muda Bahasa Daerah

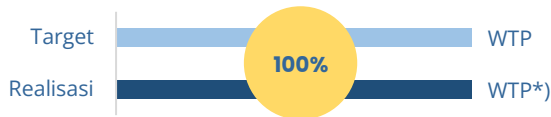


Indeks Pembangunan Kebudayaan

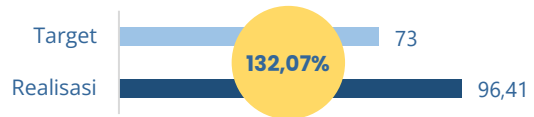


SS 5 Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel

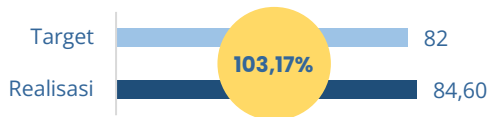
Opini Laporan Keuangan Kemendikbud



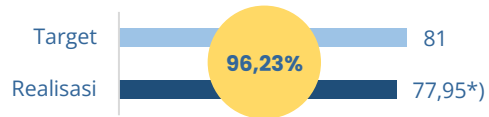
Indeks Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan



Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbud



Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud



*) Realisasi tahun 2020

Permasalahan Umum

- 1** kondisi pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung memengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan, dan berdampak langsung kurang optimalnya pencapaian beberapa target kinerja yang sudah ditetapkan;
- 2** angka partisipasi PAUD dan pendidikan tinggi masih relatif rendah dibandingkan dengan angka partisipasi jenjang lainnya;
- 3** keterserapan lulusan pendidikan tinggi vokasi di dunia kerja atau berwirausaha masih belum optimal;
- 4** kompetensi pendidik dalam mendukung pembelajaran berkualitas sesuai kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia belum merata;
- 5** kemampuan sebagian dosen dalam menghasilkan hasil penelitian berkualitas yang dapat digunakan oleh dunia kerja masih belum optimal;
- 6** hasil Asesmen Kompetensi Minimum khususnya bidang literasi masih belum memenuhi target yang ditetapkan;
- 7** keterbatasan peserta didik di daerah 3T dalam mengakses jaringan internet dalam pembelajaran daring;
- 8** semakin berkurangnya sumber pengumpulan kosakata di daerah, belum optimalnya pelaksanaan tes UKBI melalui daring, serta belum optimalnya pengembangan pendidikan sastra di satuan pendidikan dan komunitas;
- 9** perlindungan, pengembangan budaya, tradisi sejarah, dan kearifan lokal belum optimal;
- 10** koordinasi dan kolaborasi baik di internal Kemendikbudristek maupun antar kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, swasta serta peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi belum optimal.

Langkah Antisipasi

- 1 melakukan penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan sehingga tetap dapat mengoptimalkan pencapaian kinerja pada masa pandemi Covid-19, dan melakukan realokasi dan *refocusing* anggaran sesuai kebutuhan layanan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
- 2 mendorong kerja sama dan kolaborasi secara berkesinambungan dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar setiap desa di Indonesia memiliki Lembaga PAUD;
- 3 mengoptimalkan kerja sama Kemendikbudristek dengan industri dan pemerintah daerah untuk merealisasikan perguruan tinggi di daerah 3T, mengoptimalkan pemberian bantuan bagi pendidikan tinggi melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADiK), mengoptimalkan bantuan sarana prasarana kepada perguruan tinggi, dan mengoptimalkan partisipasi swasta dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi;
- 4 mengoptimalkan pelatihan-pelatihan bagi tenaga pendidik dilaksanakan oleh LPTK dan semua balai di seluruh Indonesia;
- 5 mengoptimalkan budaya riset melalui penyediaan bantuan riset bagi dosen, mendorong kolaborasi riset antara mahasiswa, dosen, industri, dan perguruan tinggi lainnya;
- 6 mengoptimalkan pengajaran literasi dalam pembelajaran dibantu peran guru untuk terbiasa memberi penugasan dan soal yang melatih peserta didik dalam memahami materi belajar, dan tidak berfokus pada penghapalan;
- 7 mengoptimalkan penyediaan bantuan kuota internet bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan khususnya di daerah 3T;
- 8 mengoptimalkan pengembangan pendidikan sastra di satuan pendidikan dan komunitas di antaranya dengan menggunakan Bahasa Indonesia dalam forum-forum kenegaraan di tingkat nasional dan internasional;
- 9 meningkatkan ketahanan budaya dalam upaya meningkatkan daya internalisasi dan penerapan nilai luhur budaya bangsa dalam perilaku masyarakat;
- 10 meningkatkan koordinasi dan kerja sama antarunit di Kemendikbudristek, antar kementerian/lembaga terkait, dan pemerintah daerah, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan layanan pendidikan dan kebudayaan.



BAB I

Pendahuluan

01

Latar Belakang
Dasar Hukum, Tugas, dan Fungsi
Struktur Organisasi
Isu Strategis
Peran Strategis



Latar Belakang

Tahun 2021 masih merupakan tahun yang penuh tantangan karena pandemi Covid-19 masih terus berlangsung. Salah satu area yang paling berdampak adalah bidang pendidikan dan kebudayaan. Covid-19 yang merebak di awal tahun 2020 telah menyebabkan sekitar 60 juta anak usia sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran secara optimal di sekolah. Berbagai intervensi dilakukan dalam rangka menekan dampak turunnya kualitas belajar siswa yang disebabkan proses belajar mengajar yang tidak optimal selama pandemi. Intervensi yang dilakukan, salah satunya melalui akselerasi transformasi pendidikan, antara lain penyesuaian bahan belajar, metode pembelajaran, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, penyesuaian kurikulum dalam masa pandemi, serta memaksimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Transformasi pendidikan ini diharapkan membuka kesempatan bagi semua satuan pendidikan, guru dan peserta didik dapat secara mandiri melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua periode Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbudristek. Sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2021, Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek mengacu pada program prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam RKP tersebut, yakni mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas. Sejalan dengan arah kebijakan nasional tahun 2021 dalam pembangunan SDM, Kemendikbudristek terus berupaya untuk mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi umum. Strategi ini diperlukan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa Covid-19. Sementara itu, penguatan pembelajaran dalam kondisi darurat, termasuk melalui media daring, terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

Dukungan Kemendikbudristek terhadap pembangunan SDM tidak hanya terbatas pada kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi menciptakan SDM yang berakhlak mulia, berkarakter kuat, toleran, mandiri, bernalar kritis, kreatif dan selalu siap bekerja sama melalui pengarusutamaan kebudayaan. Oleh karena itu, landasan untuk pembangunan SDM itu harus juga disertai dengan pendekatan pemajuan kebudayaan yang sifatnya tidak hanya melestarikan budaya tradisi tetapi memajukannya dengan cara mencerdaskan dan mendamaikan, sebagaimana visi Kebudayaan Indonesia 2020-2040 hasil dari Kongres Kebudayaan Indonesia 2018, yakni "Indonesia Bahagia

Berlandaskan Keanekaragaman Budaya yang Mencerdaskan, Mendamaikan, dan Menyejahterakan”.

Pada tahun 2021, Kemendikbudristek memperoleh perluasan tanggung jawab dan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021. Kemendikbudristek terus berinovasi dan berupaya agar sistem pendidikan yang ada dapat menghasilkan SDM yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan di masa depan, memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Hal ini selaras dengan visi Kemendikbudristek, yaitu menciptakan Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Dengan semangat Merdeka Belajar yang menjiwai keseluruhan arah kebijakan dan strategi bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, Kemendikbudristek senantiasa berikhtiar membawa perubahan terhadap pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan SDM Unggul yang berkarakter Pancasila dan berdaya saing global untuk memajukan Indonesia. Semangat merdeka belajar berarti menekankan murid, guru, orang tua, satuan pendidikan, daerah, komunitas pendidikan, yayasan pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri serta pelaku pendidikan lainnya sebagai aktor yang otonom dan berdaya. Pelaku pendidikan berdaya mengembangkan praktik-praktik baik pembelajaran, manajemen pendidikan, dan kepemimpinan pendidikan yang perlu diperkuat dan ditularkan ke seluruh ekosistem pendidikan sehingga membentuk pembelajaran yang berkualitas.

Laporan Kinerja Kemendikbudristek tahun 2021 ini merupakan bentuk tanggung jawab kepada publik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yakni menyampaikan laporan atas penyelenggaraan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang berlandaskan asas akuntabilitas.



Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021

tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Tugas

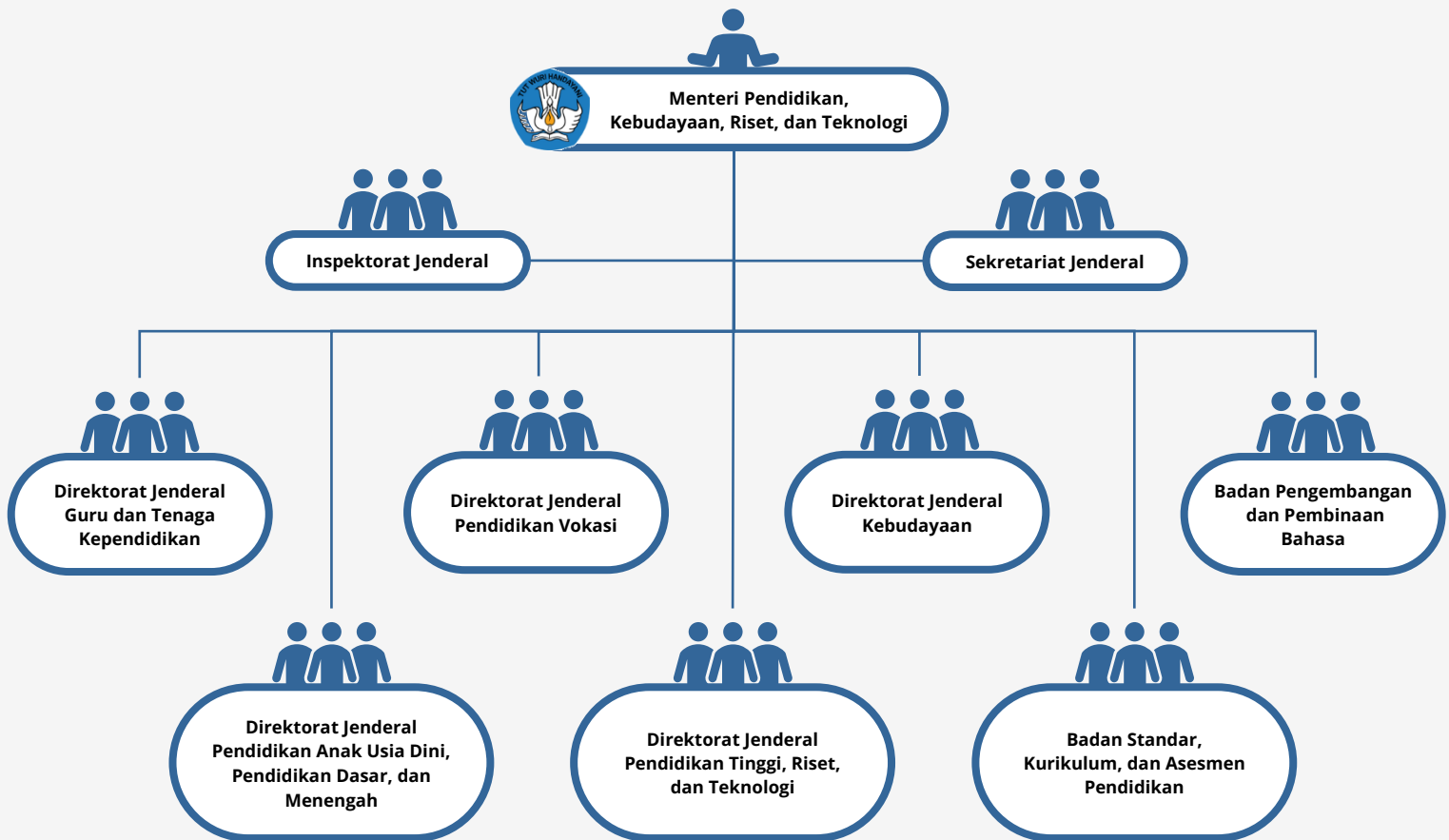
Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

Fungsi

- 1 Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan kebudayaan;
- 2 Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi, pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi;
- 4 Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karir pendidik serta pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi;
- 5 Penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen di bidang pendidikan;
- 6 Penetapan standar nasional pendidikan dan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- 7 Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi;
- 8 Pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- 9 Pelaksanaan fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, riset, teknologi, dan kebudayaan;
- 10 Pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
- 11 Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perfilman nasional;
- 12 Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
- 13 Pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan;
- 14 Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pendidikan dan kebudayaan di daerah;
- 15 Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- 16 Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian;
- 17 Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian; dan
- 18 Pelaksanaan dukungan substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis kementerian.



Sebagai penjabaran dari Peraturan Presiden tersebut dan untuk memastikan seluruh tugas dan fungsi tersebut terdistribusikan dengan baik, Kemendikbudristek menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.



9 Unit Utama



Total Pegawai Kemendikbudristek
per 6 Desember 2021

124.398 orang



375 UPT/Satker

Isu Strategis

- 1 Optimalisasi angka partisipasi PAUD dan pendidikan tinggi yang masih relatif rendah dibandingkan dengan angka partisipasi jenjang lainnya melalui pelibatan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, serta melalui pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga yang kurang mampu dan bagi peserta didik dari daerah 3T;
- 2 Optimalisasi pemanfaatan hasil asesmen nasional oleh pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidik, tenaga kependidikan, dan lingkungan belajar yang kondusif;
- 3 Optimalisasi keterserapan lulusan di dunia kerja atau berwirausaha melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi umum;
- 4 Optimalisasi kemampuan dosen dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta dalam menghasilkan penelitian berkualitas;
- 5 Optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di seluruh jenjang untuk mendukung pembelajaran dalam masa pandemi, serta ketersediaan jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia;
- 6 Optimalisasi pengembangan kosakata bahasa Indonesia dan bahasa daerah, pendidikan sastra di satuan pendidikan dan komunitas, serta meningkatkan peran bahasa Indonesia di tingkat global;
- 7 Optimalisasi perlindungan, pengembangan budaya, tradisi sejarah, dan kearifan lokal;
- 8 Koordinasi dan kolaborasi secara berkesinambungan baik di internal Kemendikbudristek maupun antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, swasta serta peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Peran Strategis

Kemendikbudristek

- 1** Menciptakan SDM Indonesia yang berkualitas dan berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila;
- 2** Mewujudkan perluasan dan pemerataan pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif;
- 3** Mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu dan yang berpusat pada pengembangan kompetensi peserta didik, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
- 4** Mendorong peningkatan produktivitas riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa;
- 5** Mendorong pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra, serta pengarusutamaannya dalam pendidikan;
- 6** Memastikan terciptanya kerja sama dan kolaborasi yang erat antarpemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, swasta, masyarakat, dan keluarga melalui penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

BAB II

Perencanaan Kinerja

02

Visi, Misi, dan Tujuan
Matriks Kinerja
Perjanjian Kinerja 2021 (Awal)
Perjanjian Kinerja 2021 (Revisi)
Program Prioritas

Visi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global.



- 1** Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
- 2** Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra;
- 3** Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Misi

- 1** Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif;
- 2** Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik;
- 3** Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter;

Tujuan Strategis

- 4** Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra, serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan; dan
- 5** Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Matriks Kinerja

Untuk mendukung prioritas nasional bidang pendidikan dan kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, Kemendikbudristek menetapkan 5 SS dan 23 IKSS yang merupakan IKU sebagaimana tercantum dalam Renstra Kemendikbudristek tahun 2020-2024. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	
SS 1	Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang						
IKSS 1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 Tahun	%	40,20	42,62	45,21	47,81	53,10
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	%	105,97	104,48	102,98	101,49	100
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	%	92,46	94,34	96,23	98,11	100
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	86,18	88,39	90,59	92,80	95
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	%	33,47	34,56	35,62	36,64	37,63
SS 2	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan di Seluruh Jenjang						
IKSS 2.1	Nilai Rata-Rata Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (5-6 Tahun)	Nilai	3	3,25	3,50	3,70	4
IKSS 2.2	Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) Memenuhi Kompetensi Minimum	%	57,20	58,20	59,20	60,20	61,20
IKSS 2.3	Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) Memenuhi Kompetensi Minimum	%	26,50	27,40	28,30	29,20	30,10
IKSS 2.4	Nilai Rata-Rata Hasil PISA: Membaca	Nilai	-	-	-	-	396
IKSS 2.5	Nilai Rata-Rata Hasil PISA: Matematika	Nilai	-	-	-	-	388
IKSS 2.6	Nilai Rata-Rata Hasil PISA: Sains	Nilai	-	-	-	-	402

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	
IKSS 2.7	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan	%	47,10	48,30	49,70	51,10	52,60
IKSS 2.8	Persentase Lulusan PT yang Langsung Bekerja dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan	%	64,77	65,25	65,72	66,20	66,70
IKSS 2.9	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional	%	47,43	48,33	49,22	50,11	51
IKSS 2.10	Persentase Guru-Guru Kejuruan SMK yang Mempunyai Pengalaman Kerja di Industri atau Sertifikasi Kompetensi yang Diakui Oleh Industri	%	12	18	23	31	40
IKSS 2.11	Persentase Dosen yang Memiliki Pengalaman Bekerja atau Tersertifikasi di Industri	%	69	71,80	74,60	77,40	80
SS 3	Menguatnya Karakter Peserta Didik						
IKSS 3.1	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Lingkungan Kondusif dalam Pembangunan Karakter	%	30	35	40	45	50
IKSS 3.2	Persentase Tingkat Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila	%	10	15	22,50	31	40
IKSS 3.3	Persentase Tingkat Pemahaman Konsep Merdeka Belajar	%	10	15	22,50	31	40
SS 4	Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan						
IKSS 4.1	Rata-Rata Skor Kemahiran Berbahasa Indonesia	Skor	510	515	520	525	530
IKSS 4.2	Jumlah Penutur Muda Bahasa Daerah	Orang	34.000	50.000	66.000	82.000	98.000
IKSS 4.3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	55,50	57,30	59,10	60,90	62,70
SS 5	Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel						
IKSS 5.1	Opini Laporan Keuangan Kemendikbud	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKSS 5.2	Indeks Efektifitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Indeks	71,50	73	74,50	76	77,50
IKSS 5.3	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbud	Indeks	81	82	82	83	84
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	Indeks	78	81	85	87	91

Perjanjian Kinerja 2021 (Awal)

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian periode 2020-2024, serta prioritas nasional bidang pendidikan dan kebudayaan yang tercantum dalam RKP Tahun 2021, Kemendikbudristek merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2021, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target
1	[SS 1] Meningkatnya Pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	42,62
		2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	%	104,48
		3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	%	94,34
		4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	88,39
		5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	%	34,56
2	[SS 2] Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	1 Nilai Rata-Rata Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (5-6 Tahun)	Nilai	3,25
		2 Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) Memenuhi Kompetensi Minimum	%	58,2
		3 Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) Memenuhi Kompetensi Minimum	%	27,4
		4 Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca	Nilai	394
		5 Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	Nilai	385
		6 Nilai rata-rata hasil PISA: Sains	Nilai	399

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target
		7 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	%	48,3
		8 Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	65,25
		9 Persentase guru dan tenaga kependidikan Profesional	%	48,33
		10 Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri	%	18
		11 Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri.	%	71,8
3	[SS 3] Menguatnya karakter peserta didik	1 Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Lingkungan Kondusif dalam Pembangunan Karakter	%	35
		2 Persentase Tingkat Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila	%	15
		3 Persentase Tingkat Pemahaman Konsep Merdeka Belajar	%	15
4	[SS 4] Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	1 Rata-Rata Skor Kemahiran Berbahasa Indonesia	Skor	515
		2 Jumlah Penutur Muda Bahasa Daerah	Orang	50.000
		3 Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	57,3
5	[SS 5] Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	1 Opini Laporan Keuangan Kemendikbud	Opini	WTP
		2 Indeks Efektifitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Indeks	73
		3 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbud	Indeks	82
		4 Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	Indeks	81

Alokasi Anggaran

No	Nama Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 4.669.792.391.000
2	Program PAUD dan Wajib belajar 12 Tahun	11.868.301.547.000
3	Program Pendidikan Tinggi	28.205.232.540.000
4	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	1.087.702.794.000
5	Program Dukungan Manajemen	23.433.723.791.000
6	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	12.269.248.017.000
TOTAL		81.534.001.080.000

Pada tahun 2021, Kemendikbudristek melakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja. Penyesuaian yang dilakukan salah satunya dengan tidak mencantumkan PISA dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini disebabkan belum terlaksananya kembali tes PISA akibat pandemi Covid-19 yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2021. Meskipun demikian, Kemendikbudristek tetap melaksanakan pemantauan dan penghitungan atas perkembangan hasil PISA karena skor PISA menjadi salah satu indikator kinerja yang diukur pada RPJMN. Untuk mengoptimalkan capaian PISA, Kemendikbudristek terus melakukan inovasi melalui kebijakan Asesmen Nasional yang terdiri atas Asesmen Kompetensi Minimum (bidang literasi dan numerasi), survei karakter, dan survei lingkungan belajar.

Selain itu, Kemendikbudristek juga melakukan penyesuaian anggaran (*refocusing*) untuk mendukung penanganan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 dan mendukung pencapaian target-target prioritas nasional, antara lain penambahan bantuan kuota internet untuk mengoptimalkan pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19 dan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT). *Refocusing* ini menyebabkan peningkatan anggaran pada Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran serta Program Pendidikan Tinggi, dan penurunan anggaran secara signifikan pada Program Dukungan Manajemen.

Perjanjian Kinerja 2021 (Revisi)

Berkenaan dengan penyesuaian indikator kinerja dan anggaran yang dilakukan pada tahun 2021 sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka Perjanjian Kinerja revisi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target
1	[SS 1] Meningkatnya Pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	42,62
		2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	%	104,48
		3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	%	94,34
		4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	88,39
		5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	%	34,56
2	[SS 2] Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	1 Nilai Rata-Rata Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (5-6 Tahun)	Nilai	3,25
		2 Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) Memenuhi Kompetensi Minimum	%	58,2
		3 Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) Memenuhi Kompetensi Minimum	%	27,4
		4 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	%	48,3
		5 Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	65,25
		6 Persentase guru dan tenaga kependidikan Profesional	%	48,33
		7 Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri	%	18
		8 Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri.	%	71,8
3	[SS 3] Menguatnya karakter peserta didik	1 Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Lingkungan Kondusif dalam Pembangunan Karakter	%	35
		2 Persentase Tingkat Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila	%	15

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	
		3	Persentase Tingkat Pemahaman Konsep Merdeka Belajar	%	15
4	[SS 4] Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	1	Rata-Rata Skor Kemahiran Berbahasa Indonesia	Skor	515
		2	Jumlah Penutur Muda Bahasa Daerah	Orang	50.000
		3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	57,3
5	[SS 5] Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	1	Opini Laporan Keuangan Kemendikbud	Opini	WTP
		2	Indeks Efektifitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Indeks	73
		3	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbud	Indeks	82
		4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	Indeks	81

Alokasi Anggaran

No	Nama Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	4.774.670.911.000
2	Program PAUD dan Wajib belajar 12 Tahun	11.692.637.359.000
3	Program Pendidikan Tinggi	33.069.432.578.000
4	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	835.259.585.000
5	Program Dukungan Manajemen	21.587.189.329.000
6	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	16.750.969.073.000
TOTAL		88.710.158.835.000

Program Prioritas

Untuk mendukung pencapaian kinerja Kemendikbudristek dan mendukung kinerja nasional bidang pendidikan dan kebudayaan, Kemendikbudristek melaksanakan berbagai program prioritas yang alokasi anggarannya diutamakan untuk membiayai program prioritas. Program prioritas Kemendikbudristek tahun 2021 adalah sebagai berikut:

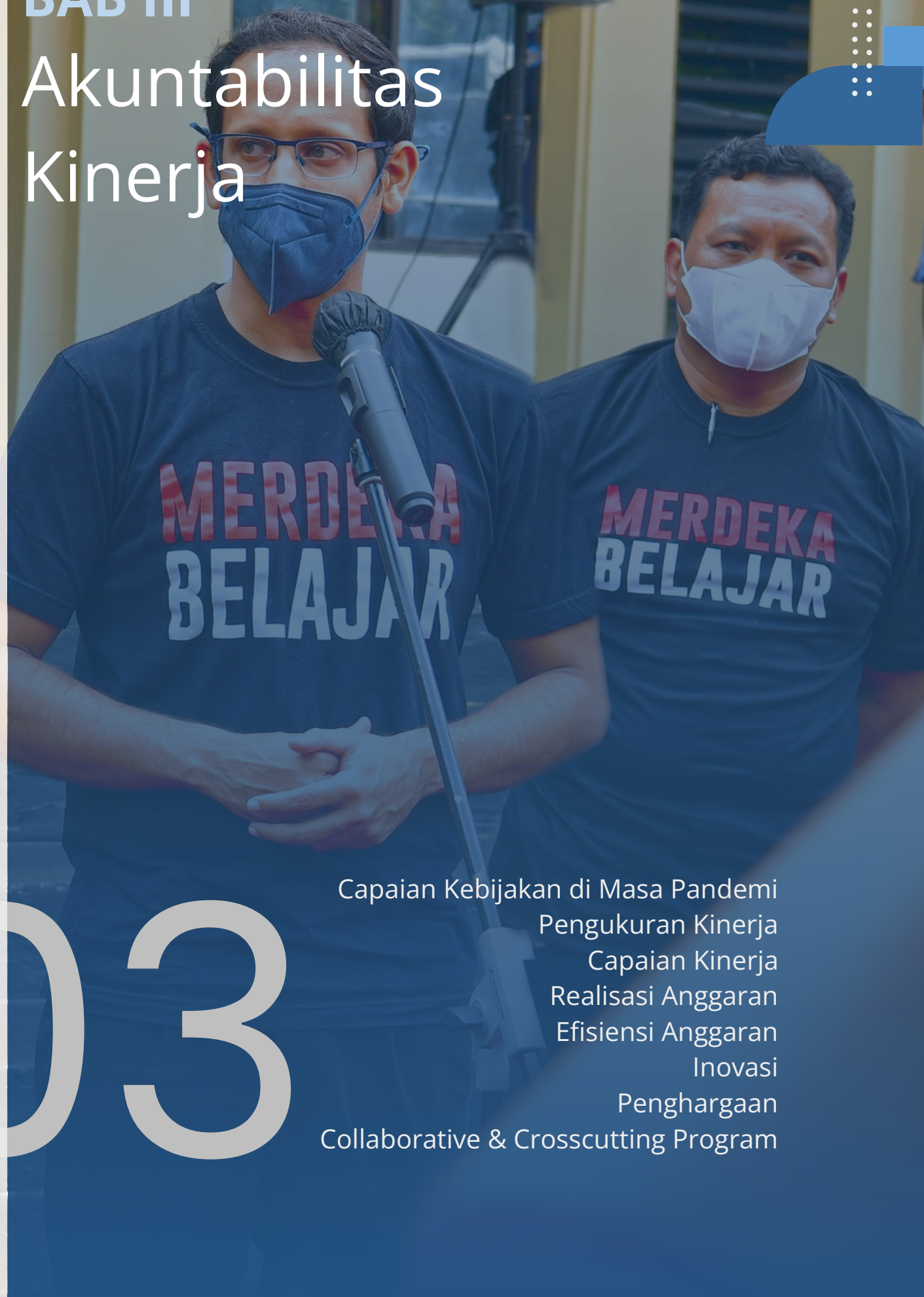
No	Program Prioritas	Satuan	Target	Alokasi (Dalam Ribu)	
1	PAUD & Wajib Belajar 12 Tahun	1 Program Indonesia Pintar	Siswa	17.927.992	9.654.559.476
		2 Sekolah Penggerak	Sekolah	2.500	102.573.402
		3 Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)	Siswa	2.895	103.161.185
		4 Layanan Pendidikan Keaksaraan	Orang	97.177	69.390.615
		5 Penjaminan Mutu Pendidikan	Lembaga	400.151	276.497.470
2	Kualitas Pengajaran & Pembelajaran	1 Penyediaan Sarana Pendidikan (TIK dan APE)	Paket	16.711	1.409.540.704
		2 Pendampingan Kurikulum	Lembaga/Satuan Pendidikan	6.153	119.779.035
		3 Aneka Tunjangan Guru Non PNS	Orang	347.326	8.444.730.067
		4 Bantuan Subsidi Kuota Internet	Orang	30 juta	4.715.122.124
		5 Penyiapan Asesmen Nasional	Pemda	548	22.794.110
		6 Satuan Pendidikan yang diakreditasi (Formal dan Nonformal)	Lembaga/Satuan Pendidikan	73.513	185.866.303
		7 Satuan Pendidikan yang melaksanakan Assesmen	Satuan Pendidikan	271.523	76.778.247

No	Program Prioritas	Satuan	Target	Alokasi (Dalam Ribu)		
8	Pendidikan Guru Penggerak	Orang	16.029	442.771.056		
9	Pendidikan Profesi Guru	Orang	63.896	331.935.860		
10	Rekrutmen Guru ASN	Orang	388.313	18.780.495		
11	Pengembangan Kurikulum, buku, soal, dan perangkat pembelajaran	Model	22.737	133.039.888		
3	Pendidikan Tinggi	1	KIP Kuliah	Orang	1.108.810	9.048.569.508
		2	Bantuan UKT/SPP (PEN)	Orang	310.508	745.219.200
		3	PTN/Prodi yang diakreditasi	Lembaga	3.385	47.000.000
		4	SDM Dikti yang mengikuti Pendidikan Gelar	Orang	3.748	265.644.395
		5	Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Orang	6.482	116.665.491
		6	PTN yang Direvitalisasi melalui PHLN dan SBSN	PTN	33	562.753.348
		7	Peningkatan PT menuju Kelas Dunia	PTN	13	37.500.000
		8	Mahasiswa menjalankan Wirausaha	Orang	50.000	63.160.000
		9	Program Kompetitif Kampus Merdeka	Lembaga	142	473.000.000
4	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1	SMK yang direvitalisasi/pusat keunggulan	Satuan Pendidikan	895	1.202.159.471
		2	SMK yang mendapat bantuan sarana Pendidikan	Paket	525	83.031.414

No	Program Prioritas	Satuan	Target	Alokasi (Dalam Ribu)	
	3 Politeknik yang direvitalisasi melalui SBSN	PT	12	663.719.816	
	4 Dikti Vokasi menerapkan penguatan mutu berstandar industri	PT	43	153.785.460	
	5 Pendidikan Kecapakan Kerja dan Wirausaha	Orang	71.296	318.343.914	
5	Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan & Bahasa	1 Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	3.944	97.029.799
		2 Fasilitas Bidang Kebudayaan	Kel. Masy	165	47.427.702
		3 Museum yang dibangun	Museum	4	39.417.200
		4 Fasilitas program BIPA	Lembaga	200	14.973.843
		5 Penutur Bahasa terbina	Orang	25.249	23.106.347
TOTAL ALOKASI				40.109.826.945	

BAB III

Akuntabilitas Kinerja



Capaian Kebijakan di Masa Pandemi
Pengukuran Kinerja
Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
Efisiensi Anggaran
Inovasi
Penghargaan
Collaborative & Crosscutting Program

03

A.

Capaian Kebijakan di Masa Pandemi

Dalam rangka percepatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan masa pandemi, serta mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional, tahun 2021, Kemendikbudristek melakukan realokasi anggaran (*refocusing*) yang berdampak signifikan terhadap masyarakat yang terdampak pandemi. Kebijakan layanan pendidikan dan kebudayaan tersebut, adalah sebagai berikut:

No	Program	Sasaran	Alokasi
1	Bantuan Subsidi Kuota Data Internet	26,9 juta orang (Siswa, Mahasiswa, Guru, dan Dosen)	Rp4,6 T
2	Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Genap (Lanjutan 2020)	419.605 mahasiswa penerima di PTN dan PTS	Rp1 T
3	Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Ganjil 2021	310.508 mahasiswa	Rp745,2 M
4	Kampus Mengajar Badge 1 dan 2	36.621 mahasiswa dan 9.888 dosen di 34 provinsi	Rp340 M

B.

Pengukuran Kinerja

Kinerja Kemendikbudristek tahun 2021 diukur dari pencapaian SS dan IKSS yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk 5 SS dan 23 IKSS. Kinerja Kemendikbudristek tahun 2021 merupakan kinerja tahun kedua periode Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2020-2024. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 adalah sebesar 101,92% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh IKSS. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1**Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang**

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	42,62	35,59	83,51%
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	104,48	106,2	98,38%
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	94,34	92,80	98,37%
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/ Sederajat	88,39	85,23	96,42%
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	34,56	31,19	90,25%

Sasaran Strategis 2**Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan di Seluruh Jenjang**

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
1	Nilai Rata-Rata Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (5-6 Tahun)	3,25	3	92,31%
2	Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) Memenuhi Kompetensi Minimum	58,20%	52,54%	90,27%
3	Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) Memenuhi Kompetensi Minimum	27,40%	32,29%	117,85%
4	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan	48,30%	46,30%	95,86%
5	Persentase Lulusan PT yang Langsung Bekerja dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan	65,25%	74,40%	114,02%
6	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional	48,30%	48,21%	99,75%
7	Persentase Guru-Guru Kejuruan SMK yang Mempunyai Pengalaman Kerja di Industri atau Sertifikasi Kompetensi yang Diakui oleh Industri	18%	20,58%	114,33%
8	Persentase Dosen yang Memiliki Pengalaman Bekerja atau Tersertifikasi di Industri	71,80%	81,51%	113,52%

Sasaran Strategis 3 Menguatnya Karakter Peserta Didik

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
1	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Lingkungan Kondusif dalam Pembangunan Karakter	35%	38,99%	111,40%
2	Persentase Tingkat Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila	15%	15,60%	104%
3	Persentase Tingkat Pemahaman Konsep Merdeka Belajar	15%	16,70%	111,33%

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
1	Rata-Rata Skor Kemahiran Berbahasa Indonesia	515	520	100,97%
2	Jumlah Penutur Muda Bahasa Daerah	50.000	42.396	84,79%
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	57,30	54,65	95,38%

Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
1	Opini Laporan Keuangan Kemendikbud	WTP	WTP*)	100
2	Indeks Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	73	96,41	132,07%
3	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbud	82	84,60	103,17%
4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	81	77,95*)	96,23%

*) Realisasi tahun 2020



Capaian Kinerja

Secara garis besar, rata-rata capaian IKSS Kemendikbudristek tahun 2021 sebesar 101,92%. Namun demikian, masih ada IKSS yang belum tercapai dengan optimal. Hasil analisis dan uraian singkat terkait seluruh SS dan IKSS tahun 2021 tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang

No	SS/IKSS	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang				
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 Tahun	42,62%	35,59%	83,51%
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	104,48%	106,20%	98,38%
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	94,34%	92,80%	98,37%
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	88,39%	85,23%	96,42%
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	34,56%	31,19%	90,25%

Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang, serta percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun masih menjadi salah satu prioritas nasional pada RPJMN tahun 2020-2024, yang juga menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan Merdeka Belajar pada Renstra Kemendikbudristek. Sampai dengan tahun 2021, angka partisipasi di semua jenjang pendidikan menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, kecuali Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD yang mengalami penurunan. Selain itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan SD sederajat juga semakin mendekati nilai ideal (100). Meskipun penurunannya tidak signifikan, APK Pendidikan SD sederajat tahun 2021 menurun sebesar 0,12 poin. Ketercapaian SS tersebut didukung oleh 5 IKSS, sebagai berikut:

IKSS 1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 Tahun

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk usia 0-6 tahun yang sedang sekolah di jenis prasekolah (Taman Kanak-Kanak/Bustanul Athfal/Raudatul Athfal/

PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD, TAAM, PAUD PAK, PAUD BIA, TKQ) terhadap jumlah penduduk usia 3-6 tahun.

2020	2021	Akhir Periode Renstra
Realisasi 37,52%	Target 42,62%	Target 53,10%
Capaian 93,33%	Realisasi 35,59%	Capaian 67,02%
	Capaian 83,51%	

Capaian target APK PAUD tahun 2021 sebesar 35,59%, lebih rendah dari yang ditargetkan yaitu 42,62%, atau realisasi capaian sebesar 83,51%. Bila dibandingkan dengan tahun 2020, APK PAUD tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1,93%. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung yang menimbulkan kekhawatiran orang tua untuk menyekolahkan anaknya serta keterbatasan ekonomi khususnya anak-anak dari keluarga dari kelompok ekonomi terendah. Selain itu, APK PAUD pada kelompok disabilitas juga masih lebih rendah bila dibandingkan dengan nondisabilitas, yakni 25,39% pada kelompok disabilitas, dan 35,65% pada kelompok nondisabilitas. Hal ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan untuk mengakses pendidikan prasekolah pada kelompok disabilitas tersebut. APK PAUD menurut kelompok status ekonomi pun masih mengalami kesenjangan, walaupun tidak sebesar pada kelompok disabilitas dan nondisabilitas, yaitu 39,93% pada kelompok dengan status ekonomi rumah tangga teratas (kuintil 5) dan 33,53% pada kelompok ekonomi rumah tangga terendah (kuintil 1). Hal ini juga menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan dalam rangka pemerataan akses pada jenjang PAUD mengalami perbaikan. Bahkan, apabila dibandingkan antara perkotaan dan pedesaan, APK PAUD hampir tidak memiliki perbedaan yakni APK PAUD di perkotaan sebesar 35,81% dan pedesaan sebesar 35,32%.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk membantu operasional lembaga PAUD, meringankan beban biaya bagi masyarakat dalam mengikuti layanan PAUD yang berkualitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan dan pengembangan PAUD, dengan sasaran sebesar lebih kurang 6,6 juta anak;
- 2 pemberian BOP PAUD kepada anak usia dini berkebutuhan khusus sebanyak 5.700 anak;
- 3 pemberian bantuan sarana prasarana pendidikan untuk meningkatkan layanan pendidikan baik melalui pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) maupun revitalisasi, dengan menggunakan basis Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta mendukung pendirian 234 PAUD di desa yang belum memiliki PAUD; dan
- 4 berkoordinasi dan mendorong dinas pendidikan kabupaten/kota untuk mengoptimalkan pemenuhan SPM PAUD berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 jumlah satuan PAUD sangat banyak, sekitar 204.000, sebagian besar dimiliki oleh masyarakat, sehingga pendataan harus dilakukan lebih mendalam agar validitas data penerima bantuan pendidikan dapat terpenuhi dan tepat sasaran;
- 2 pengetahuan orang tua calon peserta didik mengenai pentingnya pendidikan pra sekolah untuk mengoptimalkan potensi anak masih belum optimal; dan
- 3 pandemi Covid-19 yang masih berlangsung menyebabkan kekhawatiran orang tua untuk mendaftarkan anak-anaknya ke satuan PAUD.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

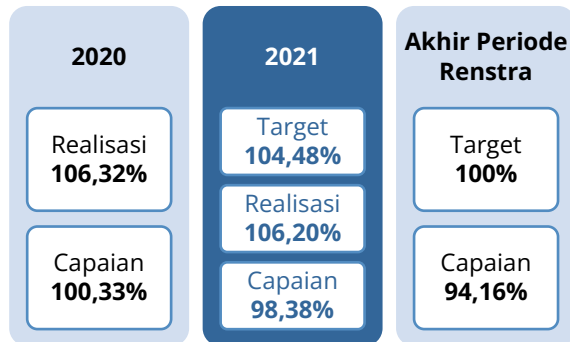
- 1 mengoptimalkan pemberian BOP PAUD khususnya kepada masyarakat dari tingkat ekonomi rendah termasuk disabilitas, dan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta masyarakat dalam hal bantuan pendidikan agar tepat sasaran;
- 2 mendorong pembangunan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan seperti Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB), rehabilitasi dan renovasi sekolah dan kegiatan pembangunan lainnya; dan
- 3 memaksimalkan pembelajaran jarak jauh dalam pelaksanaan proses belajar mengajar melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi

Strategi ke depan yang dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap PAUD adalah sebagai berikut:

- 1 mendorong pendirian PAUD di berbagai lokasi dalam rangka pemenuhan satu desa satu PAUD sebagai langkah pemerataan dan perluasan akses bagi masyarakat untuk memperoleh layanan PAUD;
- 2 menerapkan sistem pendataan terpadu melalui pemanfaatan aplikasi dan meningkatkan kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan dinas pendidikan kab/kota untuk melaksanakan verifikasi data satuan PAUD; dan
- 3 melakukan sosialisasi yang efektif mengenai pentingnya pendidikan prasekolah bersama seluruh pemangku kepentingan.

IKSS 1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat



Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD/MI/SDLB/Sederajat menggambarkan persentase perbandingan jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SD/MI/SDLB/Sederajat terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

APK SD/ sederajat pada tahun 2021 semakin mendekati nilai ideal (100%) dibandingkan tahun 2020. Meskipun tidak terlalu signifikan, terjadi penurunan APK SD/MI/SDLB/Sederajat dari 106,32% di tahun 2020, menjadi 106,20% di tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021 sebesar 104,48%, realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 106,20% dengan capaian sebesar 98,38%. Ketidaktercapaian target ini terutama karena masih ada peserta didik yang berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun yang masih bersekolah di jenjang SD/MI/SDLB/Sederajat. Kondisi ini hampir sama bila APK SD/MI/SDLB/Sederajat tersebut dibandingkan berdasarkan wilayah perkotaan atau pedesaan, berdasarkan jenis kelamin, maupun berdasarkan status ekonomi. Namun demikian, APK SD/MI/SDLB/Sederajat agak berbeda bila dilihat berdasarkan disabilitas dan nondisabilitas, dimana pada kelompok disabilitas masih kurang dari 100%, yakni 96,77%. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi untuk kelompok disabilitas masih perlu dioptimalkan.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional sekolah dan meringankan beban biaya sekolah untuk peserta didik sebanyak 24 juta lebih peserta didik SD, menggunakan basis data Dapodik;
- 2 pemberian bantuan sarana prasarana sesuai kebutuhan satuan pendidikan antara

lain bantuan RKB dan revitalisasi, menggunakan basis data Dapodik;

- 3 pemberian bantuan sarana pembelajaran (TIK) sebanyak 4,981 Paket untuk mendukung Program Wajib Belajar 9 tahun bermutu, menggunakan basis data Dapodik;
- 4 pemberian bantuan pendidikan kepada peserta didik SD/Sederajat yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan; dan
- 5 pemberian bantuan pendidikan bagi SLB sederajat untuk mendukung peserta didik penyandang disabilitas, serta bantuan bagi satuan pendidikan terdampak bencana.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 keterbatasan waktu penyaluran bantuan, utamanya bagi wilayah yang sulit dijangkau mengakibatkan penyaluran bantuan menjadi kurang optimal;
- 2 validasi data rekening sekolah BOS memerlukan waktu yang lebih lama karena masih terdapat rekening yang menggunakan a.n yayasan atau pribadi dan melakukan perubahan rekening sebelum cut-off, sehingga penyaluran bantuan menjadi terkendala;
- 3 adanya revisi anggaran sehingga menyebabkan terkendalanya penyaluran bantuan;
- 4 masih terbatasnya sarana prasarana pada satuan pendidikan terutama di daerah-daerah terbelakang dan terpencil; dan
- 5 faktor sosial ekonomi yang menyebabkan masih terjadinya peserta didik yang putus sekolah, untuk membantu orang tua mencari nafkah.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- 1 meningkatkan kinerja dan efektivitas penyaluran bantuan pendidikan yaitu BOS dan PIP, di antaranya melalui mekanisme *unit cost* majemuk pada BOS (jumlah bantuan berdasarkan tingkat kemahalan daerah dan skala ekonomi) serta penyaluran langsung;
- 2 meningkatkan validasi data pokok pendidikan sebagai dasar perencanaan terutama memetakan daerah-daerah dengan persentase APK dibawah rata-rata, agar bantuan pendidikan tepat sasaran;
- 3 melakukan perbaikan sarana prasarana sekolah seperti renovasi dan pemberian TIK, serta memberikan jalur pendidikan alternatif seperti kejar paket A untuk daerah yang membutuhkan;
- 4 meningkatkan koordinasi antarunit di Kemendikbudristek, maupun antar kementerian terkait serta pemerintah daerah, untuk memastikan semua sekolah telah di validasi dan memiliki rekening atas nama sekolah, serta memastikan Bank penyalur dapat memprioritaskan siswa penerima PIP; dan
- 5 meningkatkan kualitas perencanaan program sehingga apabila terjadi revisi anggaran di tengah tahun, anggaran tidak terlalu berdampak pada penyaluran bantuan.

Strategi

Strategi ke depan yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

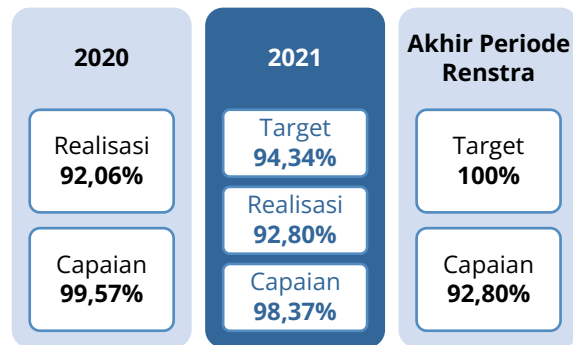
- 1 melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana pendidikan jenjang SD seperti USB, RKB, rehabilitasi, renovasi dan kegiatan pembangunan prasarana serta sarana pendidikan lainnya;
- 2 melanjutkan dan memaksimalkan pemberian bantuan pendidikan seperti BOS dan PIP serta mendorong daerah ikut aktif membantu melalui APBD; dan
- 3 melakukan koordinasi dan validasi data melalui aplikasi daring dengan pihak bank

penyalur, dinas pendidikan daerah sampai satuan pendidikan dan melakukan penyeragaman nama rekening dengan menambahkan NISN sehingga mengurangi resiko salah penyaluran dana BOS.

IKSS 1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS /SMPLB/Sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMP/SMPLB/MTS/Sederajat

menggambarkan persentase perbandingan jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SMP/SMPLB/MTS/Sederajat terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun.



Capaian APK SMP/SMPLB/MTS/ Sederajat, tahun 2021 sebesar 92,80%, lebih rendah dari yang ditargetkan, yakni 94,34%, atau realisasi capaian sebesar 98,37%. Meskipun belum memenuhi target yang ditetapkan, APK SMP/SMPLB/MTS/Sederajat pada tahun 2021 tetap mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, APK SMP/SMPLB/MTS/Sederajat tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,74 poin. Peningkatan APK SMP/SMPLB/MTS/ Sederajat juga ditandai dengan meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan APK minimal 100% menjadi sebanyak 373 di tahun 2021, yang sebelumnya hanya 340 Kabupaten/Kota pada tahun 2020.

Sama halnya dengan angka partisipasi pada jenjang SD sederajat, tidak ada perbedaan signifikan antara wilayah pedesaan dan perkotaan, jenis kelamin serta status ekonomi. Namun, ada perbedaan signifikan antara APK SMP/SMPLB/MTS/Sederajat kelompok disabilitas dan nondisabilitas, yakni 64,08% untuk disabilitas dan 92,97% untuk kelompok nondisabilitas. Hal ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah, khususnya Kemendikbudristek, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, untuk memprioritaskan kelompok disabilitas dalam kebijakan pemerataan layanan pendidikan bagi tingkat SMP Sederajat.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 pemberian BOS untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional sekolah dan meringankan beban biaya sekolah bagi 9,8 juta lebih peserta didik siswa SMP, menggunakan basis data Dapodik;
- 2 pemberian bantuan sarana prasarana sesuai kebutuhan satuan pendidikan antara lain bantuan RKB dan revitalisasi, menggunakan basis data Dapodik;
- 3 pemberian bantuan sarana pembelajaran (TIK) sebanyak 6.435 Paket untuk mendukung Program Wajib Belajar 9 tahun bermutu, menggunakan basis data Dapodik;
- 4 pemberian bantuan melalui PIP SMP/Sederajat berupa uang tunai kepada sekitar 4,4 juta peserta didik SMP sederajat yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan; dan
- 5 pemberian bantuan pendidikan bagi SLB sederajat untuk mendukung peserta didik penyandang disabilitas, serta bantuan bagi satuan pendidikan terdampak bencana.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan 12 tahun;
- 2 masih terbatasnya satuan pendidikan inklusi bagi peserta didik dengan disabilitas;
- 3 masih terbatasnya sarana prasarana pada satuan pendidikan terutama di daerah 3T;
- 4 faktor sosial ekonomi yang menyebabkan masih terjadinya peserta didik yang putus sekolah, untuk membantu orang tua mencari nafkah;

- 5 validasi data rekening sekolah BOS memerlukan waktu yang lebih lama karena masih terdapat rekening yang menggunakan a.n yayasan atau pribadi dan melakukan perubahan rekening sebelum *cut-off*, sehingga penyaluran bantuan menjadi terkendala; dan
- 6 adanya revisi anggaran sehingga menyebabkan terkendalanya penyaluran bantuan.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- 1 meningkatkan kinerja dan efektivitas penyaluran bantuan pendidikan yaitu BOS dan PIP, di antaranya melalui mekanisme *unit cost* majemuk pada BOS (jumlah bantuan berdasarkan tingkat kemahalan daerah dan skala ekonomi) serta penyaluran langsung;
- 2 mendorong seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan sekolah inklusi bagi peserta didik dengan disabilitas, serta pendidikan alternatif lainnya yang relevan;
- 3 meningkatkan validasi data pokok pendidikan sebagai dasar perencanaan terutama memetakan daerah-daerah dengan persentase APK dibawah rata-rata, agar bantuan pendidikan tepat sasaran;
- 4 melakukan perbaikan sarana prasarana sekolah seperti renovasi dan pemberian TIK, serta memberikan jalur pendidikan alternatif seperti kejar paket B untuk daerah yang membutuhkan;
- 5 meningkatkan koordinasi antarunit di Kemendikbudristek, maupun antar kementerian terkait serta pemerintah daerah, untuk memastikan semua sekolah telah di validasi dan memiliki rekening atas nama sekolah, serta memastikan Bank penyalur dapat memprioritaskan siswa penerima PIP; dan
- 6 meningkatkan kualitas perencanaan program sehingga apabila terjadi revisi anggaran di tengah tahun, tidak terlalu berdampak pada penyaluran bantuan.

Strategi

Strategi ke depan yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

- 1 melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana pendidikan jenjang SMP sederajat seperti USB, RKB, rehabilitasi, renovasi dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan lainnya, khususnya di wilayah yang membutuhkan terutama daerah 3T dan yang terdampak bencana;
- 2 melanjutkan dan memaksimalkan pemberian bantuan pendidikan seperti BOS dan PIP serta mendorong pemerintah daerah untuk berpartisipasi melalui APBD;
- 3 melakukan koordinasi dan validasi data melalui aplikasi daring dengan pihak bank penyalur, dinas pendidikan daerah sampai satuan pendidikan dan melakukan penyeragaman nama rekening dengan menambahkan NISN sehingga mengurangi resiko salah penyaluran dana BOS;
- 4 optimalisasi aksesibilitas pendidikan berdasarkan kebutuhan wilayah, melalui peningkatan daya tampung siswa dan penataan guru; dan
- 5 meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dengan peningkatan optimalisasi komite sekolah.

IKSS 1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat

2020	2021	Akhir Periode Renstra
Realisasi 84,53%	Target 88,39%	Target 95%
Capaian 98,08%	Realisasi 85,23%	Capaian 89,72%
	Capaian 96,42%	

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ SMLB/ Sederajat menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah pada jenjang SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat terhadap jumlah penduduk yang berusia 16 - 18 tahun.

Capaian APK SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat tahun 2021 sebesar 85,23%, lebih rendah dari yang ditargetkan, yakni sebesar 88,39%, atau realisasi capaian sebesar 96,42%. Meskipun APK tersebut tidak memenuhi target sesuai dengan yang sudah ditetapkan pada tahun 2021, APK SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat tetap mengalami peningkatan

sebesar 0,70%, jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 84,53%. Peningkatan APK SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat juga ditandai dengan meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan APK minimal 95% menjadi sebanyak 303 di tahun 2021, yang sebelumnya hanya 277 kabupaten/kota pada tahun 2020.

Berbeda dengan jenjang SD dan SMP sederajat, kesenjangan angka partisipasi peserta didik di tingkat SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat masih ditemukan khususnya berdasarkan kelompok status ekonomi (status ekonomi teratas sebesar 96,74% dan terendah sebesar 73,21%) dan disabilitas (kelompok disabilitas sebesar 51,56% dan nondisabilitas sebesar 85,43%). Sedangkan kesenjangan berdasarkan wilayah pedesaan dan perkotaan, serta berdasarkan jenis kelamin tetap ada tapi tidak terlalu signifikan. Untuk memperkecil kesenjangan tersebut, pemerintah perlu melakukan intervensi yang memprioritaskan kelompok dari ekonomi terendah dan kelompok disabilitas.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 pemberian BOS untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional sekolah dan meringankan beban biaya sekolah bagi 4,8 juta lebih peserta didik SMA, menggunakan basis data Dapodik;
- 2 pemberian bantuan sarana prasarana sesuai kebutuhan satuan pendidikan antara lain bantuan RKB dan revitalisasi, menggunakan basis data Dapodik;
- 3 pemberian bantuan sarana pembelajaran (TIK) sebanyak 1.195 Paket untuk mendukung peningkatan pembelajaran bermutu melalui pemanfaatan TIK, menggunakan basis data Dapodik
- 4 pemberian bantuan melalui PIP SMA/Sederajat berupa uang tunai kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan;

- 5 pemberian bantuan pendidikan bagi SLB sederajat untuk mendukung peserta didik penyandang disabilitas, serta bantuan bagi satuan pendidikan terdampak bencana; dan
- 6 melakukan kajian dan piloting program afirmasi yakni penanganan anak rentan putus sekolah di 43 satuan Pendidikan.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 kurangnya pemahaman masyarakat, terutama masyarakat dari golongan ekonomi kurang mampu terhadap pentingnya pendidikan, yang dipicu oleh faktor sosial ekonomi sehingga anak usia sekolah harus membantu orang tua mencari nafkah;
- 2 kurangnya sarana prasarana pendidikan jenjang SMA sederajat terutama di daerah 3T, sehingga memengaruhi proses kegiatan belajar mengajar;
- 3 kurangnya ketersediaan sekolah inklusi sehingga membatasi peserta didik dengan disabilitas mengakses pendidikan sesuai dengan kebutuhannya;
- 4 validasi data rekening sekolah BOS memerlukan waktu yang lebih lama karena masih terdapat rekening yang menggunakan a.n yayasan atau pribadi dan melakukan perubahan rekening sebelum *cut-off*, sehingga penyaluran bantuan menjadi terkendala; dan
- 5 adanya revisi anggaran sehingga menyebabkan terkendalanya penyaluran bantuan.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- 1 meningkatkan kinerja dan efektivitas penyaluran bantuan pendidikan yaitu BOS dan PIP, di antaranya melalui mekanisme *unit cost* majemuk pada BOS (jumlah bantuan berdasarkan tingkat kemahalan daerah dan skala ekonomi) serta

penyaluran langsung;

- 2 mendorong seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan sekolah inklusi bagi peserta didik dengan disabilitas, serta pendidikan alternatif lainnya yang relevan;
- 3 meningkatkan validasi data pokok pendidikan sebagai dasar perencanaan terutama memetakan daerah-daerah dengan persentase APK dibawah rata-rata, agar bantuan pendidikan tepat sasaran;
- 4 melakukan perbaikan sarana prasarana sekolah seperti renovasi dan pemberian TIK, serta memberikan jalur pendidikan alternatif seperti kejar paket C untuk daerah yang membutuhkan;
- 5 meningkatkan koordinasi antarunit di Kemendikbudristek, maupun antar kementerian terkait serta pemerintah daerah, untuk memastikan semua sekolah telah di validasi dan memiliki rekening atas nama sekolah, serta memastikan Bank penyalur dapat memprioritaskan siswa penerima PIP; dan
- 6 meningkatkan kualitas perencanaan program sehingga apabila terjadi revisi anggaran di tengah tahun, anggaran tidak terlalu berdampak pada penyaluran bantuan.

Strategi

Strategi ke depan yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

- 1 melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana pendidikan jenjang SMP sederajat seperti USB, RKB, rehabilitasi, renovasi dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan lainnya, khususnya di wilayah yang membutuhkan terutama daerah 3T dan yang terdampak bencana;
- 2 melanjutkan dan memaksimalkan pemberian bantuan pendidikan seperti BOS dan PIP serta mendorong pemerintah daerah untuk berpartisipasi melalui APBD;
- 3 melakukan koordinasi dan validasi data melalui aplikasi daring dengan pihak bank penyalur, dinas pendidikan daerah sampai satuan pendidikan dan melakukan

penyeragaman nama rekening dengan menambahkan NISN sehingga mengurangi resiko salah penyaluran dana BOS;

4 meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, antara lain melalui pengoptimalisasian komite sekolah; dan

5 optimalisasi aksesibilitas pendidikan berdasarkan kebutuhan wilayah, terutama daerah yang 3T dan yang terdampak bencana.

IKSS 1.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang Pendidikan Tinggi dengan jumlah penduduk yang berusia 19-23 tahun.

2020	2021	Akhir Periode Renstra
Realisasi 30,85%	Target 34,56%	Target 37,63%
Capaian 92,17%	Realisasi 31,19%	Capaian 82,89%
	Capaian 90,25%	

Besarnya angka partisipasi kasar suatu jenjang pendidikan menunjukkan kualitas layanan pemerintah terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, APK Pendidikan Tinggi juga menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh kemudahan dalam akses menempuh pendidikan tinggi. Dengan demikian, APK Pendidikan Tinggi juga dapat digunakan sebagai penentu tingkat kualitas layanan pembelajaran dan kemahasiswaan perguruan tinggi.

Secara umum, APK Pendidikan Tinggi masih relatif rendah bila dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya, namun dari tahun ke tahun APK Pendidikan Tinggi tersebut terus mengalami peningkatan, walaupun masih lebih rendah bila dibandingkan dengan negara lain, seperti Tiongkok, Thailand, Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Meskipun belum memenuhi target, APK Pendidikan Tinggi tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 31,19%, dari tahun 2020 yang hanya sebesar 30,85%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2021, realisasi capaian APK PT sebesar 90,25%. Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk meningkatkan APK Pendidikan Tinggi, antara lain pemberian bantuan pendidikan bagi kelompok masyarakat dari ekonomi terbatas, pemberian bantuan

pendidikan bagi wilayah afirmasi atau 3T, serta berbagai beasiswa. Selain itu, dukungan bantuan sarana prasarana juga dilakukan untuk pemerataan ketersediaan pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 dukungan pendanaan melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum kepada PTN;
- 2 dukungan bantuan pengembangan sarana prasana bagi perguruan tinggi, baik melalui APBN maupun melalui pembiayaan surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) bagi, serta melalui pembiayaan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN);
- 3 pemberian bantuan melalui program KIP Kuliah, yakni program beasiswa bagi calon mahasiswa dan mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas, yang juga merupakan salah satu proyek strategis pada RPJMN tahun 2020-2024; dan
- 4 pemberian bantuan pendidikan bagi masyarakat dari wilayah afirmasi.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 masih belum meratanya pembangunan perguruan tinggi terutama di daerah 3T;
- 2 faktor ekonomi yang menyebabkan ketidakmampuan masyarakat dari latar belakang ekonomi yang berpendapatan rendah untuk dapat melanjutkan ke Pendidikan Tinggi; dan
- 3 pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembangunan sarana di beberapa PTN menjadi terhambat.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- 1 melakukan akselerasi pemerataan pembangunan perguruan tinggi di daerah 3T;
- 2 pemberian bantuan keringanan UKT bagi mahasiswa terdampak Covid-19;
- 3 melakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah terkait penanganan tenaga kerja yang belum dapat melaksanakan tugas sebagai dampak dari kebijakan penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19.

Strategi

Strategi ke depan yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

- 1 membuka program studi baru yang relevan untuk memperbesar ketersediaan program studi yang diminati dan dibutuhkan;
- 2 meningkatkan mutu program studi perguruan tinggi di Indonesia agar *turn-over* lulusan semakin tinggi sehingga kuota yang ada pada prodi-prodi tersebut cepat terisi;
- 3 melakukan sosialisasi terkait pentingnya pendidikan di jenjang perguruan tinggi melalui media massa, kerja sama antar instansi/lembaga dan dunia kerja dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- 4 melanjutkan pembiayaan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi baik melalui APBN, Non APBN, maupun melalui partisipasi masyarakat; dan
- 5 melanjutkan program-program inovasi pada pendidikan tinggi sesuai kebijakan Kampus Merdeka untuk menarik minat masyarakat untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan di Seluruh Jenjang

No	SS/IKSS	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan di Seluruh Jenjang				
1	Nilai Rata-Rata Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (5-6 Tahun)	3,25	3	92,31%
2	Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) Memenuhi Kompetensi Minimum	58,20%	52,54%	90,27%
3	Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) Memenuhi Kompetensi Minimum	27,40%	32,29%	117,85%
4	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan	48,30%	46,30%	95,86%
5	Persentase Lulusan PT yang Langsung Bekerja dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan	65,25%	74,40%	114,02%
6	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional	48,33%	48,21%	99,75%
7	Persentase Guru-Guru Kejuruan SMK yang Mempunyai Pengalaman Kerja di Industri atau Sertifikasi Kompetensi yang Diakui oleh Industri	18%	20,58%	114,33%
8	Persentase Dosen yang Memiliki Pengalaman Bekerja atau Tersertifikasi di Industri	71,80%	81,51%	113,52%

Kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan ditandai dengan meningkatnya kemampuan peserta didik berkompetisi di tingkat global serta memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau berwirausaha. Sampai dengan tahun 2021, daya saing lulusan pendidikan baik tingkat menengah maupun tinggi semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya keterserapan lulusan di dunia kerja maupun berwirausaha. Sebagai contoh, keterserapan lulusan pendidikan vokasi di dunia kerja atau berwirausaha mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar 5,84 poin menjadi 46,30% dibandingkan tahun 2020 sebesar 40,46%. Selain itu, peningkatan kualitas peserta didik juga terlihat dari semakin meningkatnya peserta didik yang memenangkan kompetisi di tingkat internasional, antara lain *International Chemistry Olympiad*,

International Olympiad in Informatica, International Biology Olympiad, dan International Economic Olympiad. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi dan Numerasi, yang dilakukan pertama kalinya untuk seluruh satuan pendidikan jenjang SD sampai SMA sederajat, juga menunjukkan hasil yang menggembirakan, dimana jumlah peserta didik yang memenuhi kompetensi minimum (AKM) bidang Numerasi sebesar 32,29%, melebihi yang ditargetkan yakni 27,40%, dengan capaian sebesar 117,85%. Meskipun hasil AKM Literasi belum dapat memenuhi target yakni 52,54% dari yang ditargetkan sebesar 58,20%, dengan capaian sebesar 90,27%, namun hasil ini menggembirakan mengingat ini adalah pertama kali dengan variasi soal yang relatif beragam. Hasil AKM ini diharapkan menjadi umpan balik baik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun satuan pendidikan untuk memperbaiki kualitas satuan pendidikan.



Fleksibilitas dan inovasi yang diusung dalam kebijakan Merdeka Belajar, mulai dari perbaikan proses pembelajaran pada satuan pendidikan, penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), fleksibilitas dalam pembukaan program studi baru pada pendidikan tinggi, pemberian kesempatan kepada mahasiswa sampai tiga semester untuk belajar di luar program studinya, program Guru Penggerak untuk meningkatkan kompetensi guru, serta Sekolah Penggerak, diharapkan akan mendorong peningkatan kualitas peserta didik lebih optimal. Kebijakan Merdeka Belajar juga sejalan dengan

prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024, yakni peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan penjaminan mutu, serta penguatan tata kelola pembangunan pendidikan. Capaian SS Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang didukung oleh 8 IKSS, dengan rincian capaian sebagai berikut:

IKSS 2.1 Nilai Rata-Rata Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak 5-6 Tahun

2020	2021	Akhir Periode Renstra
Realisasi 3	Target 3,25	Target 4
Capaian 100%	Realisasi 3	Capaian 75%
	Capaian 92,31%	

Tingkat pencapaian perkembangan anak 5-6 tahun adalah ketika anak sudah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan pedoman universal perkembangan anak secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru.

Pengukuran dilakukan dengan melihat rapor anak yang merujuk pada penilaian 6 aspek yaitu:



Penjelasan dari nilai tingkat pencapaian perkembangan anak (usia 5-6 tahun) adalah:

Nilai	Jenis Perkembangan	Keterangan
1	Belum Berkembang (BB)	Anak belum menunjukkan kemampuan sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam kelompok usianya
2	Mulai Berkembang (MB)	Anak sudah mulai menunjukkan kemampuan sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam kelompok usianya
3	Berkembang Sesuai Harapan (BSH)	Anak sudah menunjukkan kemampuan sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam kelompok usianya
4	Berkembang Sangat Baik (BSB)	Anak menunjukkan kemampuan melebihi/diatas indikator yang ditetapkan dalam kelompok usianya

Pada tahun 2021, target indikator kinerja untuk nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak 5-6 adalah 3 (Berkembang Sesuai Harapan), mengindikasikan anak sudah menunjukkan kemampuan sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam kelompok usianya. Dibandingkan dengan target sebesar 3,25, capaian tahun 2021 sebesar 92,31%. Pencapaian target ini didasarkan atas pengukuran tahun 2021 melalui survei perhitungan penilaian tingkat pencapaian perkembangan anak 5-6 tahun. Ketidaktercapaian terutama disebabkan perkembangan anak sangat tergantung dari aktivitas anak usia dini sehari-hari, dimana pada saat pembatasan aktifitas selama pandemi menyebabkan perkembangan anak kurang optimal, terutama dalam hal tidak dapat melakukan PTM yang menyebabkan proses sosialisasi anak menjadi terhambat.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 pemberian bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) kepada 4.100 lembaga PAUD untuk mendorong peningkatan ketersediaan dukungan pembelajaran berkualitas pada lembaga PAUD;
- 2 mendukung pembangunan/revitalisasi 344 Lembaga PAUD menjadi Sekolah Penggerak, sebagai bagian dari Kebijakan Merdeka Belajar, yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan profil Pelajar Pancasila sesuai Visi Kemendikbudristek;
- 3 pemberian dukungan bagi Lembaga PAUD terakreditasi C, serta mendukung penyiapan materi pembelajaran bagi pendidik, khususnya materi bidang literasi kemaritiman, kebencanaan, sosial finansial, dan *coding*;
- 4 memberikan dukungan dan bantuan melalui gugus tugas PAUD Holistik Integratif (HI), serta mendorong kabupaten/kota lainnya untuk membentuk gugus tugas PAUD HI, dan melaksanakan sosialisasi PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif;

- 5 menyusun pedoman untuk orang tua dan pendidik terdiri dari 12 buku saku pendidik, 8 (delapan) buku saku orang tua, 30 buku bahan ajar orang tua (dalam bentuk *e-book* dan video animasi); membuat 200 video audio dongeng; dan
- 6 menyelenggarakan *webinar* kelas orang tua berbagi dalam rangka meningkatkan kapasitas orang tua anak mengenai berbagai pengetahuan dan kompetensi.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 pandemi Covid-19 menyebabkan pendidik tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara optimal (anak belajar dari rumah);
- 2 belum meratanya kualitas lembaga PAUD sehingga memengaruhi kualitas pembelajaran yang diberikan; dan
- 3 belum tersedianya informasi data yang memadai mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak, dan informasi tersebut hanya diperoleh dari orang tua sehingga hasil yang diperoleh tidak optimal.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- 1 melakukan inovasi dalam kurikulum agar penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 tidak terganggu, yakni pembelajaran fokus pada kecakapan hidup;
- 2 menyusun kurikulum khusus sebagai antisipasi pandemi sesuai Kepmendikbud Nomor 719/B/2020 tentang penggunaan kurikulum darurat sehingga satuan PAUD dapat memilih menggunakan kurikulum yang disederhanakan;
- 3 memaksimalkan belajar dari rumah, memaksimalkan bahan pengajaran melalui daring;

- 4 memberikan bantuan sarana berupa kuota internet untuk mendukung pembelajaran daring bagi masyarakat kurang mampu;
- 5 memberikan bantuan baik kepada lembaga PAUD dan pendidik PAUD untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; dan
- 6 memberikan pengetahuan kepada orang tua dan masyarakat mengenai metode pembelajaran secara mandiri di rumah.

Strategi

Strategi ke depan yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

- 1 membuat video pembelajaran daring yang menarik bagi peserta didik PAUD sehingga menghasilkan pembelajaran menyenangkan;
- 2 menyusun indikator dan mekanisme yang memungkinkan penilaian peserta didik secara daring;
- 3 menyusun modul-modul pembelajaran interaktif dan inovatif untuk meningkatkan minat peserta didik;
- 4 melakukan sosialisasi berkesinambungan kepada masyarakat terkait pengetahuan mengenai teknik pembelajaran tidak hanya berbasis luring tapi juga daring; dan
- 5 meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

IKSS 2.2 Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) Memenuhi Kompetensi Minimum

Kompetensi minimum literasi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Peserta didik yang

2020	2021	Akhir Periode Renstra
Realisasi 75,80%	Target 58,20%	Target 61,20%
Capaian 132,51%	Realisasi 52,54%	Capaian 85,85%
	Capaian 90,27%	

mengikuti AKM Literasi adalah peserta didik yang terdaftar dalam pangkalan Dapodik atau *Education Management Information System (EMIS)* yang memiliki Nomor Induk Sekolah Nasional (NISN) valid. Di samping itu peserta didik tersebut masih aktif belajar pada satuan Pendidikan jenjang SD/MI/Paket A/Ula dan yang sederajat kelas 5, jenjang SMP/MTs/Paket B/Wustha dan sederajat kelas 8, jenjang SMA/MA/SMK/MAK/Paket C/Ulya dan sederajat kelas 11, dan peserta didik Tunarungu dan Tunadaksa tanpa tambahan hambatan pada satuan pendidikan luar biasa dan satuan pendidikan yang memiliki peserta didik inklusi. Jumlah peserta didik yang mengikuti AKM literasi adalah 7.094.528 orang terdiri dari peserta didik jenjang SMK/MAK sederajat 693.169, SMA/MA sederajat 783.285, SMP/MTs sederajat 2.067.480, dan SD/MI sederajat 3.550.594.



Pelaksanaan AKM Literasi dan Numerasi tahun 2021 di SMPN 4 Malang, Jawa Timur



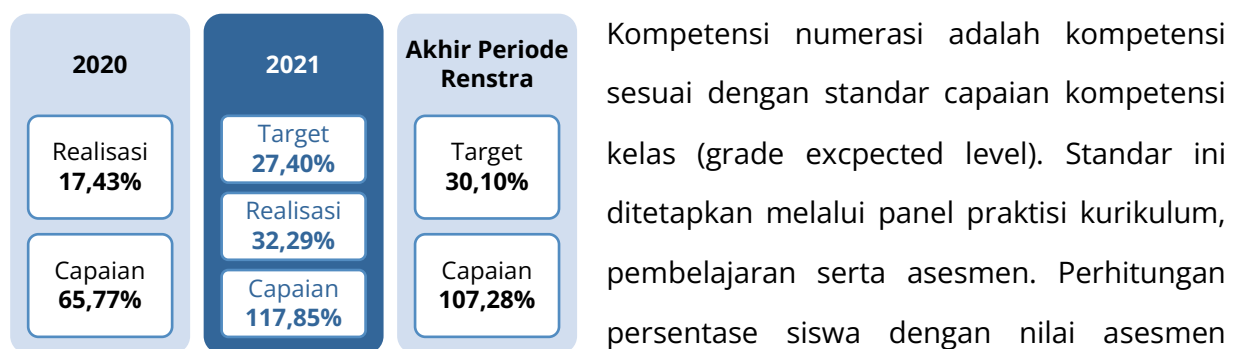
Pelaksanaan AKM Literasi dan Numerasi tahun 2021 di SD Pekayon Jaya VI Bekasi Selatan, Jawa Barat

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) merupakan jenis asesmen yang dilakukan Kemendikbudristek untuk mengetahui kompetensi minimal peserta didik dalam bidang literasi dan numerasi. Asesmen ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pendidikan dan dalam rangka memberikan masukan kepada pihak terkait untuk melakukan intervensi pendidikan sesuai dengan kondisi sekolah. Kompetensi literasi minimum dimaksud adalah kompetensi literasi membaca sesuai dengan standar capaian kompetensi kelas (*grade expected level*). Standar ini ditetapkan melalui panel praktisi kurikulum, pembelajaran serta asesmen. Metode penghitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah siswa dengan nilai literasi yang masuk ke } \textit{expected level}}{\text{Jumlah siswa peserta AKM literasi}} \times 100$$

Pada tahun 2021, hasil AKM Literasi sebesar 52,54%, lebih rendah dari yang ditargetkan yakni sebesar 58,20%, dengan capaian sebesar 90,27%. Belum tercapainya target tersebut antara lain disebabkan oleh perbedaan *baseline* data yang digunakan pada penentuan target indikator ini, yakni menggunakan hasil dari survei asesmen kompetensi siswa Indonesia (AKSI) tahun 2019 yang memiliki populasi satuan pendidikan yang berbeda dengan AKM. Sesuai dengan perubahan struktur organisasi pada Kemendikbudristek, target indikator ini telah disesuaikan mulai tahun 2022, menggunakan asumsi capaian hasil AKM tahun 2021 yang memang baru pertama kali dilaksanakan.

IKSS 2.3 Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) Memenuhi Kompetensi Minimum



kompetensi numerasi memenuhi kompetensi yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah siswa dengan nilai numerasi yang masuk ke } \textit{expected level}}{\text{Jumlah siswa peserta AKM numerasi}} \times 100\%$$

Asesmen Kompetensi Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Peserta didik yang mengikuti AKM Numerasi adalah peserta didik yang terdaftar dalam pangkalan Dapodik atau EMIS yang memiliki Nomor Induk Sekolah Nasional (NISN) valid. Di samping itu peserta didik tersebut masih aktif belajar pada satuan Pendidikan jenjang SD/MI/Paket A/Ula dan yang sederajat kelas 5, jenjang SMP/MTs/Paket B/Wustha dan yang sederajat kelas 8, jenjang SMA/MA/SMK/MAK/Paket C/Ulya dan sederajat kelas

11, dan peserta didik Tunarungu dan Tunadaksa tanpa tambahan hambatan pada satuan pendidikan luar biasa dan satuan pendidikan yang memiliki peserta didik inklusi. Jumlah peserta didik yang mengikuti AKM Numerasi adalah 7.094.528 orang yang terdiri dari peserta didik jenjang SMK/MAK sederajat 693.169, SMA/MA sederajat 783.285, SMP/MTs sederajat 2.067.480, dan SD/MI sederajat 3.550.594.

Pada tahun 2021, hasil AKM Numerasi sebesar 39,29%, melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar 27,40%, dengan capaian sebesar 117,85%. Ketercapaian ini, antara lain kemungkinan dikarenakan adanya perbedaan *baseline* data yang digunakan untuk menetapkan target pada indikator ini, yakni survei AKSI tahun 2019 yang memiliki populasi satuan pendidikan yang berbeda dengan AKM. Sesuai dengan perubahan struktur organisasi pada Kemendikbudristek, target indikator ini telah disesuaikan mulai tahun 2022, menggunakan asumsi capaian hasil AKM tahun 2021 yang memang baru pertama kali dilaksanakan. Meskipun demikian, ketercapaian indikator ini membuktikan bahwa kemampuan numerasi peserta didik Indonesia semakin baik. Diharapkan hasil AKM ini dapat mencerminkan perbaikan kemampuan peserta didik pada saat tes PISA dilakukan di waktu yang akan datang.

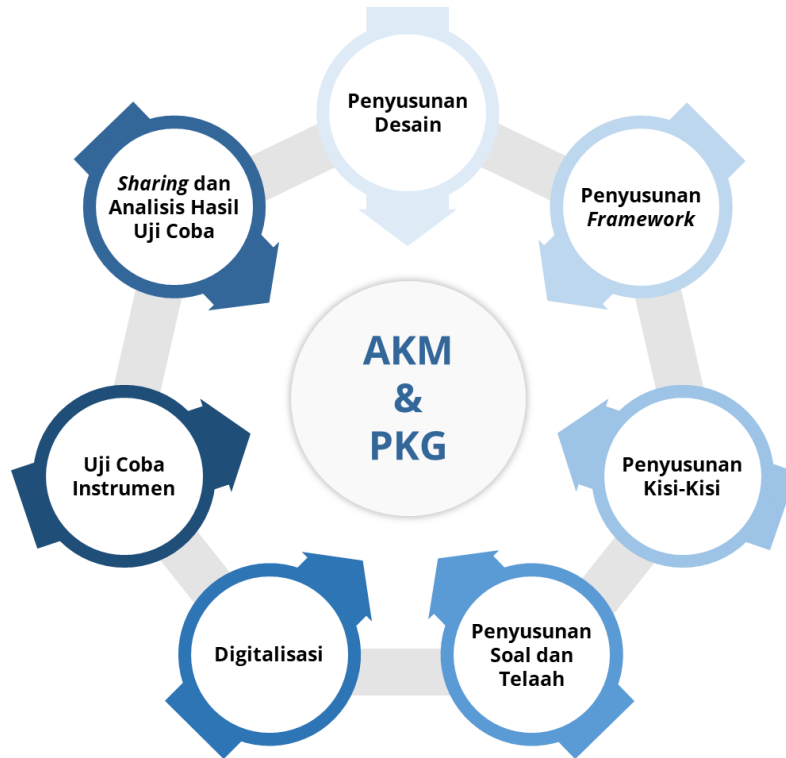


Pelaksanaan AKM Literasi dan Numerasi tahun 2021 di PKBM Antika Dompu, NTB

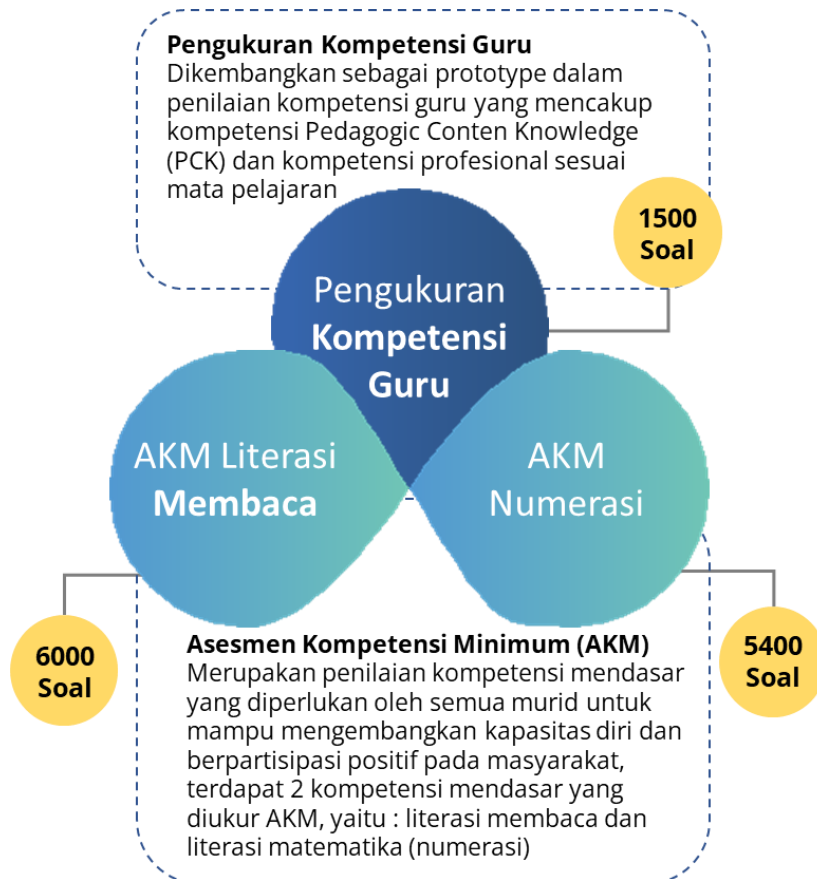


Pelaksanaan AKM Literasi dan Numerasi Tahun 2021 di MAN Sibolga, Sumatera Utara

Alur Pengembangan Instrumen Penilaian Akademik (AKM) & Pengukuran Kompetensi Guru (PKG)



Pengembangan Instrumen Penilaian Akademik



Program/Kegiatan AKM Literasi dan Numerasi

Sama halnya dengan program dan kegiatan yang mendukung AKM literasi, program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi numerasi memenuhi kompetensi minimum, yakni sebagai berikut:

- 1 melakukan pembinaan dan pendampingan bagi 2.071 Sekolah Penggerak di jenjang SD, SMP, dan SMA, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menjadi agen perubahan serta menjadi panutan, tempat pelatihan, inspirasi bagi guru-guru dan kepala sekolah lainnya;
- 2 pemberian bantuan kegiatan peningkatan kualitas satuan pendidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA, seperti Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), pelaksanaan ekstrakurikuler, sekolah penggerak, pembinaan kurikulum, dan asesmen kompetensi;
- 3 melakukan pemantauan dan pendampingan penerapan kurikulum pada satuan pendidikan untuk memastikan pelaksanaan kurikulum di daerah telah sesuai dengan program yang disusun oleh Kemdikbudristek;
- 4 menyelenggarakan program pendidikan inklusif kepada 500 lembaga;
- 5 melakukan pembinaan asesmen kompetensi, untuk mengukur kompetensi minimal peserta didik di bidang literasi dan numerasi;
- 6 melakukan pengembangan bahan advokasi terkait literasi, numerasi serta instrumen-instrumen penilaian;
- 7 melakukan sosialisasi dan koordinasi terkait persiapan serta pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) tingkat pusat dan tingkat provinsi bersama dengan kepala dinas pendidikan provinsi, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dan Kepala Kanwil Kemenag di 34 provinsi;
- 8 melakukan pelatihan proktor dan supervisi asesmen nasional, serta pelatihan Tim Teknis Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di 34 provinsi dan 514 tim teknis/helpdesk kabupaten kota, Kanwil Kemenag, perwakilan LPMP di tiap provinsi;

- 9 melakukan MoU dengan provinsi untuk penyaluran anggaran pelaksanaan AN di daerah;
- 10 menyediakan website AKM yang berisi: Penjelasan umum, 500 soal AKM, buku tanya jawab AKM, buku saku, video panduan sampel cadangan, infrastruktur pendukung, serta protokol Kesehatan, dan menu Coba AKM; dan
- 11 melaksanakan ANBK pada tingkat SMK/Sederajat sebanyak 19.618 satuan pendidikan, tingkat SMA/Sederajat 23.617 satuan pendidikan, dan tingkat SMP/Sederajat 65.676 satuan pendidikan, dan tingkat SD/Sederajat 174.698 Satuan Pendidikan.

Hambatan AKM Literasi dan Numerasi

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 belum meratanya sebaran guru Literasi dan Numerasi yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
- 2 penetapan Sekolah Penggerak belum terkoordinasi dengan baik antarunit kerja di Kemendikbudristek sehingga unit kerja terkait terkendala dalam menyusun rencana kerja, serta terjadi revisi anggaran yang memengaruhi target sasaran;
- 3 letak geografis kab/kota yang sangat bervariasi serta kondisi pandemi menyebabkan beberapa perwakilan kab/kota tidak dapat menghadiri pelatihan proktor Asesmen Nasional;
- 4 masih terbatasnya promosi dan akses ke dunia literasi bagi peserta didik, yang salah satunya bisa dilihat keberadaan perpustakaan pada satuan pendidikan baru 41.37%. Selain itu, kemudahan mengakses informasi digital, juga memengaruhi minat peserta didik pada dunia literasi;
- 5 tidak ada alokasi anggaran secara khusus yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan AN pada tahun 2021;

- 6 peserta pelatihan teknis ANBK kab/kota tidak seluruhnya merupakan petugas/staf teknis ANBK tetapi para pejabat dinas pendidikan sehingga pelatihan kurang maksimal;
- 7 lambatnya pembentukan Tim Teknis ANBK di beberapa provinsi dan kab/kota oleh Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag provinsi;
- 8 penyiapan SDM proktor/teknisi ANBK di satuan pendidikan melalui simulasi ANBK belum dapat dilaksanakan terkendala sekolah belum melaksanakan PTM;
- 9 sarana komputer yang dimiliki sekolah baik di SD, SMP, SMA/SMK pada beberapa daerah tertentu masih terbatas dan jaringan internet belum seluruhnya dapat diakses di setiap sekolah terutama di pedesaan yang BTSnya masih terbatas; dan
- 10 adanya gangguan teknis di lapangan: listrik, jaringan internet, bencana alam (banjir) di beberapa daerah.

Langkah Antisipasi AKM Literasi dan Numerasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- 1 perlunya koordinasi internal Kemendikbudristek terkait penetapan Sekolah Penggerak sehingga sesuai dengan rencana kerja masing-masing unit kerja terkait;
- 2 meningkatkan kualitas perencanaan program sehingga apabila terjadi revisi anggaran di tengah tahun anggaran tidak terlalu berdampak pada penyaluran bantuan; dan
- 3 pelatihan proktor tingkat SMA untuk kab/kota dilaksanakan secara kombinasi yaitu luring dan daring;
- 4 melakukan pemetaan daerah-daerah dengan tingkat literasi dan numerasi rendah, sehingga intervensi yang dilakukan tepat sasaran;
- 5 melakukan pemetaan guru serta pemberian insentif bagi guru literasi dan numerasi berkualitas agar tertarik bekerja di daerah-daerah yang tingkat literasi dan numerasinya masih rendah;

- 6 mendorong penggunaan dana sekolah untuk pengembangan perpustakaan, serta penyediaan alat multi media pembelajaran literasi dan numerasi;
- 7 koordinasi secara intensif dengan dinas pendidikan kabupaten, provinsi, Kanwil Kemenag, dan LPMP untuk merumuskan langkah antisipatif dalam rangka memastikan pelaksanaan AN 2021 dapat berjalan di daerah;
- 8 membentuk Tim Teknis ANBK tingkat provinsi dan kab/kota dan melakukan pendampingan kepada proktor/teknisi satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan penanganan masalah teknis (*trouble shooting*);
- 9 menerapkan kebijakan berbagi sumber daya (*resource sharing*) bagi satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan sarana untuk pelaksanaan ANBK;
- 10 berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka antisipasi dan penanganan masalah teknis ANBK (PLN, *internet provider*); dan
- 11 melakukan sosialisasi secara terus menerus untuk menyamakan pemahaman dan persepsi terkait pelaksanaan AKM;

Strategi AKM Literasi dan Numerasi

Strategi ke depan yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

- 1 penyempurnaan kurikulum untuk semua jenjang dengan menerapkan kurikulum paradigma baru sebagai penyempurnaan dari K-13;
- 2 pembinaan kepala sekolah penggerak sebagai pemimpin di setiap satuan pendidikan yang menggerakkan sekolah dengan berkolaborasi bersama para pemangku kepentingan untuk mewujudkan sekolah yang berpusat pada murid;
- 3 perubahan penilaian melalui asesmen nasional yang bertujuan untuk pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang sekolah dasar dan menengah;
- 4 tindak lanjut untuk kegiatan Pelatihan proktor AN yaitu menggunakan *video conference* bagi peserta yang berhalangan hadir;

- 5 memperbanyak akses literasi serta taman bacaan, perpustakaan keliling, maupun aplikasi membaca melalui alat-alat komunikasi;
- 6 memperbaiki sebaran guru literasi dan numerasi berkualitas ke seluruh Indonesia;
- 7 mengalokasikan anggaran AN 2021 untuk pelaksanaan pelatihan, pendampingan, dan manajemen AN di tingkat provinsi dan kab/kota;
- 8 menerbitkan Juknis ANBK, *Manual Book* ANBK, dan informasi lainnya agar bisa diakses oleh Tim Teknis provinsi dan kab/kota sebagai pedoman pelaksanaan AN 2021;
- 9 melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan dinas pendidikan provinsi dan Kanwil Kemenag untuk segera membentuk tim teknis ANBK di daerahnya masing-masing; dan
- 10 menyusun jadwal simulasi ANBK utk satuan pendidikan setelah berakhirnya PPKM.

IKSS 2.4 Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan

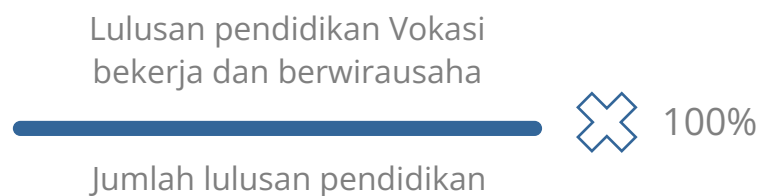
Peningkatan kualitas SDM diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang dinamis, produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri 4.0.

Sebagai salah satu prioritas nasional terkait

peningkatan keterserapan lulusan pendidikan tinggi di dunia kerja, pendidikan vokasi diharapkan dapat secara optimal mendukung pencapaian prioritas nasional tersebut. Pada 2024, Indonesia diharapkan mampu menciptakan 80% lulusan perguruan tinggi siap kerja, sekitar 52% angkatan kerja telah memiliki pendidikan menengah ke atas, serta sekitar 2 juta orang adalah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang telah bersertifikat kompetensi. Kebijakan ini digunakan dalam rangka mendapatkan umpan balik dari lulusan pendidikan vokasi untuk perbaikan sistem tata kelola pendidikan vokasi yang adaptif, responsif dan implementatif terhadap kebutuhan tenaga kerja di dunia

2020	2021	Akhir Periode Renstra
Realisasi 40,46%	Target 48,30%	Target 52,60%
Capaian 85,90%	Realisasi 46,30%	Capaian 88,02%
	Capaian 95,86%	

industri. Lulusan Pendidikan Vokasi dalam indikator kinerja ini adalah lulusan SMK, Pendidikan Tinggi Vokasi, dan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang bekerja dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan berbanding dengan jumlah lulusan selama setahun tersebut. Menggunakan sumber data Sakernas, BPS, indikator ini menghitung persentasi untuk penduduk usia kerja (PUK) yang lulus pendidikan vokasi setahun terakhir dan bekerja terhadap seluruh PUK yang lulus pendidikan vokasi setahun terakhir. Kategori lulusan pendidikan vokasi yang bekerja adalah lulusan yang tercatat maupun yang ikut dalam proses produksi sebagai tenaga kerja di dunia kerja. Sementara yang berwirausaha adalah lulusan yang atas inisiatifnya mendirikan suatu usaha dikelola sendiri. Metode perhitungan lulusan pendidikan vokasi mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun, adalah sebagai berikut:



Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 46,30% atau sebanyak 668.170 dari 1.443.197 orang lulusan, lebih rendah dari target ditetapkan sebesar 48,30%, atau realisasi capaian sebesar 95,86%. Meskipun target tidak tercapai di tahun 2021, terdapat kenaikan yang cukup signifikan, yakni 5,84% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 40,46%. Sebagai salah satu program prioritas pada RPJMN tahun 2020-2024, Kemendikbudristek terus berinovasi untuk memastikan lulusan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan juga siap untuk berwirausaha. Berbagai program dan kegiatan dilakukan sesuai dengan arah kebijakan nasional pada RPJMN, antara lain pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri, mengoptimalkan peran dunia kerja dalam pengembangan pendidikan vokasi, penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi, serta pembelajaran inovatif dengan melibatkan profesional dalam penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran, yang kesemuanya dipayungi oleh program *link and match 8+i*. Program *link and match 8+i* mencakup penyusunan kurikulum dilakukan bersama industri, pelaksanaan *Project Based Learning* (PBL), meningkatkan jumlah dan peran guru/instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja, praktik kerja lapangan/industri, sertifikasi kompetensi, *update* teknologi dan pelatihan bagi

guru/instruktur, *teaching factory*, melakukan kerja sama sampai dengan komitmen serapan lulusan, dan pemberian beasiswa ataupun bantuan.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

Untuk presentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun kelulusan, dasar penghitungannya menggunakan data Sakernas.

- 1 mendukung 901 SMK menjadi SMK Pusat Keunggulan (SMKPK), tersebar di seluruh Indonesia baik yang berstatus negeri maupun swasta, yang terbagi dalam beberapa sektor, yaitu *Hospitality*, Ekonomi Kreatif, Kerja Sama Luar Negeri, Pekerja Migran, Permesinan dan Konstruksi, Sektor lainnya;
- 2 mendukung program SMK D2 fast track di 51 lembaga, program *upgrading* D3 ke Sarjana Terapan di 83 lembaga, tersebar di beberapa politeknik dan sekolah vokasi;
- 3 mendukung program Kampus Merdeka Vokasi, yang dilaksanakan oleh masing-masing pendidikan tinggi vokasi; dan
- 4 memberikan bantuan bagi 63.689 peserta didik Program Kecakapan Kerja (PKK), bagi 22.437 peserta didik Program Kecakapan Wirausaha (PKW).

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 masih banyak dunia kerja belum siap menerima lulusan vokasi karena pengaruh dampak Covid-19;
- 2 Pada program D2 *fast track*, belum adanya harmonisasi terkait sosialisasi D2 fast track dan RPL antara SMK dan Pendidikan Tinggi Vokasi; dan
- 3 pandemi Covid-19 menyebabkan banyak lembaga yang menunda pembelajaran karena status wilayah zona merah dan zona hitam.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

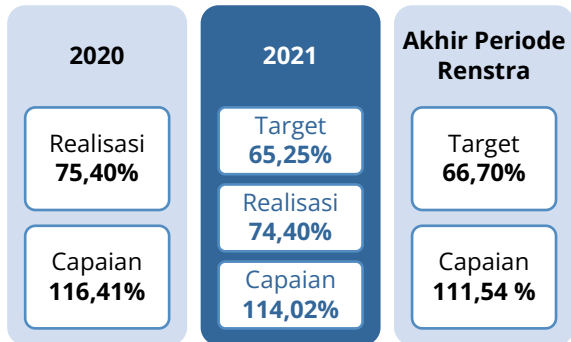
- 1 pembelajaran dilakukan secara daring untuk teori, dan dilakukan pembelajaran tatap muka dengan membagi beberapa kelompok khusus untuk materi praktek. Selain itu, inovasi media pembelajaran juga dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan dan kondisi peserta didik;
- 2 melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis lebih awal mengenai kebijakan transformasi terkait program D2 *fast track* agar pemahaman mengenai program program ini dapat diterima secara menyeluruh oleh perguruan tinggi penyelenggaran Pendidikan vokasi; dan
- 3 berkoordinasi dan bekerja sama dengan satuan pendidikan terkait pemutakhiran *database* kelulusan sehingga lulusan yang bekerja atau berwirausahaan dapat ditelusuri.

Strategi

Strategi ke depan yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai, antara lain:

- 1 meningkatkan pemerataan layanan pendidikan vokasi yang berkualitas, baik yang bersifat teori atau praktek yang dilaksanakan secara daring maupun media virtual lainnya;
- 2 mendorong pemanfaatan sumber daya pendidikan secara bersama antar satuan pendidikan dalam satu daerah dengan memadukan seluruh sumber daya dari pusat, daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dalam melakukan intervensi di setiap daerah. Selain itu, pemanfaatan sumber daya pun dapat melakukan kerja sama dengan BBPPMPV ataupun industri terdekat;
- 3 melaksanakan beberapa program inovasi seperti modernisasi sarana dan prasarana di satuan pendidikan vokasi; pengembangan *enterpreneurship*, kerja sama dengan industri, mendatangkan guru tamu dari industri, melakukan *sharing* terkait sumber daya, melakukan pengembangan kurikulum yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan industri, dan mengadakan magang dengan industri.

IKSS 2.5 Persentase Lulusan PT yang Langsung Bekerja dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan



Salah satu indikator keberhasilan pendidikan tinggi adalah dengan melihat jumlah mahasiswa lulusan pendidikan tinggi langsung bekerja. Oleh karena itu, perguruan tinggi dituntut mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dan siap berkiprah

dalam pembangunan. Daya saing lulusan ditunjukkan melalui masa tunggu mendapatkan pekerjaan pertama, keberhasilan lulusan berkompetisi dalam seleksi, dan gaji yang diperoleh. Relevansi (kesesuaian) pendidikan lulusan ini ditunjukkan melalui profil pekerjaan (macam dan tempat pekerjaan), relevansi pekerjaan dengan latar belakang pendidikan, manfaat mata kuliah yang sesuai dalam pekerjaan, saran lulusan untuk perbaikan kompetensi lulusan. Oleh karena itu, persentase lulusan langsung bekerja menjadi salah satu indikator kinerja untuk mengukur tingkat penyerapan dunia kerja terhadap lulusan perguruan tinggi. Dalam rangka menunjang pelaksanaan program penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja, sangat diperlukan data lulusan agar perguruan tinggi dapat lebih mempersiapkan calon lulusannya untuk bersaing di pasar kerja yang kompetitif.

Tahapan *Tracer Study*



Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat, perlu dilakukan penelusuran para lulusan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang didapat memudahkan lulusan dalam mendapatkan pekerjaan. Persentase lulusan perguruan tinggi langsung bekerja merupakan indikator untuk mengukur lulusan perguruan tinggi yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha dengan masa tunggu kurang dari 12 bulan berdasarkan laporan *tracer study* perguruan tinggi terhadap lulusan yang lulus 2 tahun sebelum pelaksanaan *tracer study*. Perguruan tinggi dimaksud adalah Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta. Terdapat dua kategori menjadi pertimbangan dalam melakukan perhitungan untuk jumlah lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja yaitu kategori lulusan bekerja dan lulusan berwirausaha. Akumulasi dari kedua kategori tersebut akan dibandingkan dengan jumlah lulusan dalam laporan *tracer study* Perguruan Tinggi.



Tracer study yang dilakukan dalam menghitung masa tunggu lulusan pendidikan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama. Hasil *tracer study* dapat digunakan perguruan tinggi untuk mengetahui keberhasilan proses pendidikan yang telah dilakukan terhadap anak didiknya. Dalam penilaian akreditasi selalu mempersyaratkan adanya data hasil *tracer study* tersebut melalui parameter masa tunggu lulusan, persen lulusan yang sudah bekerja, dan penghasilan pertama yang diperoleh. Keberhasilan capaian jumlah persentase lulusan yang langsung bekerja sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data hasil *tracer study* yang dilakukan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, pembaruan data yang valid tentang jumlah lulusan yang sudah bekerja melalui kegiatan *tracer study* yang dilaksanakan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia perlu

dioptimalkan dan dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini untuk memungkinkan data hasil *tracer study* dapat menggambarkan keadaan alumni perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Metode penghitungan indikator kinerja tersebut adalah:

$$\frac{\text{Jumlah lulusan Pendidikan Tinggi langsung bekerja/berwirausaha}}{\text{Jumlah lulusan dalam laporan } \textit{tracer study} \text{ Perguruan Tinggi}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan, capaian tahun 2021 sebesar 74,4% realisasi tersebut sudah melebihi capaian target tahun 2021 yaitu 65,25%, atau realisasi capaian sudah mencapai 114,02%. Capaian pada IKSS tersebut melampaui target dan lebih dari 100% dikarenakan terjadinya peningkatan data kelulusan mahasiswa pada akhir tahun, dimana seluruh perguruan tinggi lebih tertib dalam melakukan penginputan data kelulusan mahasiswa yang telah bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan. Selain itu, data kelulusan mahasiswa ini juga memberikan kontribusi pada tercapainya salah satu indikator pada IKU masing-masing PTN.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 pemutakhiran secara berkala data lulusan/alumni ke dalam *database* aplikasi *Tracer Study* untuk mengetahui *outcome* pendidikan dalam bentuk transisi dari Dunia Pendidikan Tinggi ke dunia kerja, situasi kerja terakhir, keselarasan, dan aplikasi kompetensi di dunia kerja;
- 2 memberi kesempatan mahasiswa untuk memilih jalan terbaik mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran yang fleksibel (pendidikan yang memerdekakan dan memberdayakan) melalui pelaksanaan Kampus Merdeka tahun 2021 yang meliputi:
 - a. studi Mandiri;

- b. *microCredentials*;
- c. Kampus Membangun Desa;
- d. *internship* di industri;
- e. pertukaran Mahasiswa;
- f. *Internasional Student Mobility*;
- g. Kampus Mengajar;
- h. Kewirausahaan Mahasiswa;

3 melaksanakan program kewirausahaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan keahlian lulusan perguruan tinggi;

4 melaksanakan program pengembangan penalaran, kreativitas, dan inovasi bagi mahasiswa;

5 melaksanakan studi penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yakni memberikan pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal atau nonformal atau informal; dan memberikan bantuan kepada Program Studi dengan Kurikulum Berbasis Kerja Sama dengan Dunia Usaha/Industri/QS-100.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1 masih ada mata rantai yang putus antara kompetensi diajarkan di kampus dengan kemajuan dan perubahan kebutuhan dunia profesi; dan

2 pemberlakuan kebijakan PPKM yang terus berkelanjutan membuat beberapa target kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan tertunda.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1 memberikan insentif dan mendorong perguruan tinggi untuk membuat kurikulum program studi yang adaptif dengan dunia kerja dan industri; dan

- 2 mekanisme pembelajaran menggunakan metode daring untuk teori, dan metode pembelajaran tatap muka untuk materi praktek, melalui pembagian beberapa kelompok khusus. Selain itu, media pembelajaran pun dibuat seinovatif mungkin sesuai kebutuhan dan kondisi mahasiswa.

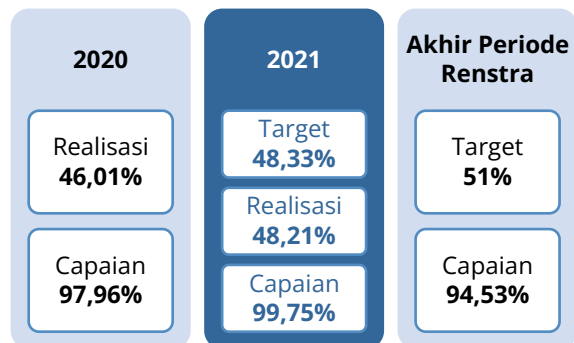
Strategi

Strategi ke depan yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai, antara lain:

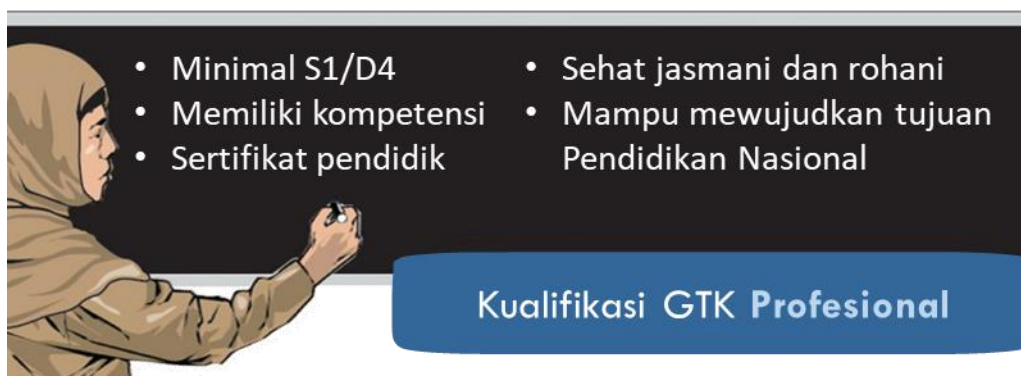
- 1 penguatan Ekosistem Kampus Merdeka;
- 2 Program Kampus Merdeka;
- 3 insentif BOPTN berbasis IKU;
- 4 *Matching Fund* dan *Competitive Fund* untuk sinergi PT dan DUDI melalui Kedaireka;
- 5 pelaksanaan kompetisi Kampus Merdeka; dan
- 6 optimalisasi pelaksanaan program Kampus Merdeka, yakni kebijakan pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, perguruan tinggi negeri badan hukum, kebebasan bagi PTN badan layanan umum dan satuan kerja untuk menjadi PTN badan hukum, hak belajar tiga semester di luar program studi: hak mengambil mata kuliah di luar prodi dan perubahan definisi satuan kredit semester.

IKSS 2.6 Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional

Berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2005 Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang



memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.



Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) profesional dihitung dengan rumusan perbandingan jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah profesional dengan jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. GTK profesional adalah GTK yang memiliki kompetensi akademik minimal S1 dan bersertifikat pendidik/tenaga kependidikan. Guru yang mendapatkan sertifikat pendidik adalah guru yang mengikuti, menuntaskan dan lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). PPG merupakan perubahan pola sertifikasi bagi guru dalam jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017.

$$\frac{\text{Jumlah Guru dan tenaga kependidikan profesional}}{\text{Jumlah Guru dan tenaga kependidikan}} \times 100\%$$

Tahun 2021, capaian terkait persentase guru dan tenaga kependidikan profesional tersebut sebesar 48.21%, atau sebanyak 1,451,556 orang dari total 3,010,856 guru dan kepala sekolah. Capaian ini sedikit lebih rendah dari yang ditargetkan, yakni 48.33%, dengan presentase capaian sebesar 99.75%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 46,01%, terdapat peningkatan, capaian walaupun tidak signifikan, yakni sebesar 2,2 poin di tahun 2021 atau sebanyak 48.21%

Peserta PPG tahun 2021 sebanyak 63.671 orang yang pelaksanaannya dilakukan dalam 4 angkatan tersebar di 75 LPTK dengan pembiayaan APBN. Hingga akhir Desember 2021

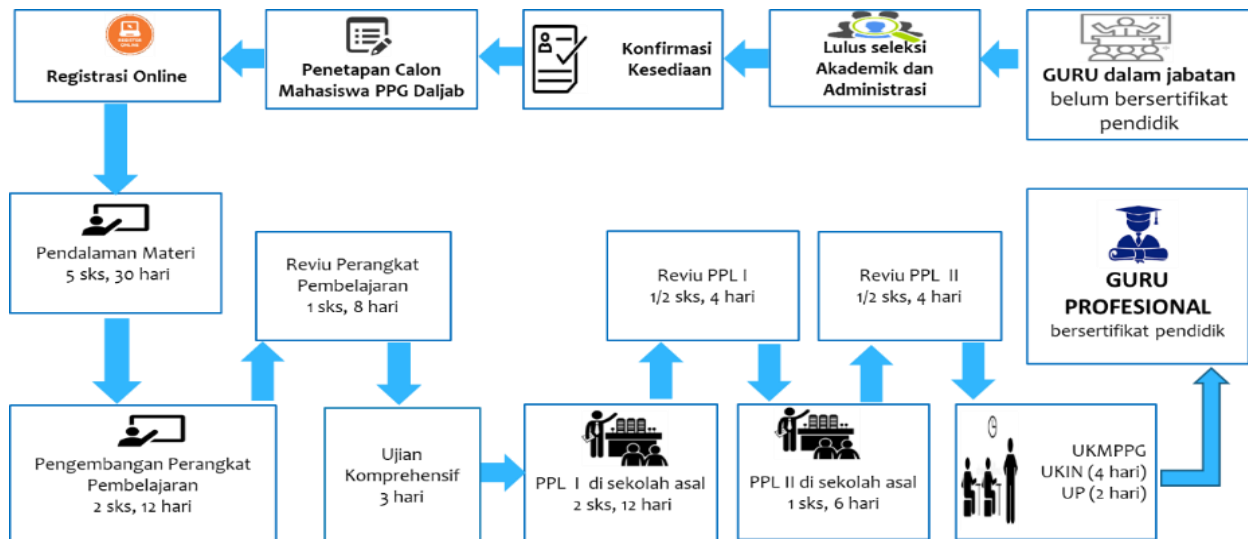
yang dinyatakan lulus sebanyak 54.003 orang. Selain itu pada tahun ini ada tambahan kelulusan retaker yaitu peserta 2018-2020 yang mengikuti ulang UKMPPG tahun sebelumnya sebanyak 12.239 Orang. Hasil tersebut menyebabkan pada tahun 2021 terjadi penambahan guru bersertifikat menjadi 66.242 orang.



Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, adalah Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Program PPG merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan Standar Pendidikan Guru sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Program Studi PPG yang dirancang secara sistematis dan menerapkan prinsip mutu mulai dari seleksi, proses pembelajaran, dan penilaian, hingga uji kompetensi untuk menghasilkan guru-guru masa depan yang profesional. Pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPG Dalam Jabatan tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 menghadapi tantangan tersendiri.

Berdasarkan kebijakan pemerintah, untuk mata kuliah teori, metode pembelajaran pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring. Rancangan kurikulum PPG sebanyak 12 SKS dengan pembelajaran dilaksanakan secara daring, Tahapan pelaksanaan pembelajaran yang merupakan penjabaran dari 3 mata kuliah yaitu Pendalaman Materi Pedagogi dan Bidang Studi, Pengembangan Perangkat pembelajaran dan Praktik Pengalaman Lapangan yang tergambar sebagai berikut:



Gambar Tahapan Pelaksanaan Pembelajaran Program PPG Dalam Jabatan

Mahasiswa peserta PPG dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik yang berlaku secara nasional setelah menyelesaikan seluruh proses yang diakhiri dengan UKMPPG yang terdiri dari Uji Kinerja (UKin) dan Uji Pengetahuan (UP). Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2021, UP sebagai alat ukur untuk melihat pemahaman konsep/materi pencapaian tujuh capaian pembelajaran lulusan (CPL) diselenggarakan secara serentak secara daring berbasis domisili di tempat tinggal (domisili) masing-masing atau tempat yang dipilih oleh mahasiswa dengan pertimbangan akses internet.

Program Inovasi

Melanjutkan tahun 2020, Ditjen GTK terus berupaya berinovasi mendorong ekosistem GTK terus bergerak untuk menguatkan profesionalisme GTK. Berbagai program pendukung profesionalisme GTK mengarah kepada peningkatan kompetensi guru guna memastikan pembelajaran bagi siswa tetap berlanjut di tengah pandemi Covid-19. Salah satu program tersebut adalah Program Guru Belajar dan Berbagi (GGB) sebagai Gerakan Gotong Royong agar Berdaya Hadapi Covid-19. Program GGB merupakan gerakan kolaborasi pemerintah, guru, komunitas, dan penggerak pendidikan untuk bergotong royong berbagi ide dan praktik baik melalui (i) pelatihan daring secara gratis bagi guru tentang berbagai topik yang relevan selama masa pandemi ini; (ii) berbagi referensi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); (iii) berbagi artikel tentang pembelajaran, berbagi video pembelajaran, dan (iv) berbagi aksi webinar yang dibuat oleh berbagai

komunitas guru, kepala sekolah, dan komunitas pendidikan lainnya. Guru-guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan berbagai pemangku kepentingan pendidikan bersama-sama dan bahu membahu agar bisa berdaya menghadapi pandemi Covid-19, khususnya dalam rangka memastikan pembelajaran untuk siswa tetap dapat berlangsung walaupun dengan kesulitan dan keterbatasan yang harus dihadapi. Berikut Seri Pelatihan Daring dari Seri Guru Belajar yang diselenggarakan di Tahun 2021

Seri Guru Belajar	Jumlah Peserta
Pendidikan Keterampilan Hidup (PKH)	14.011
Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)	553.630
Pendidikan Inklusif	136.917
PAUD Inovasi	9.538
Semangat Guru: Kemampuan Nonteknis dalam Adaptasi Teknologi	118.216
Panduan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021	134.346
Belajar Mandiri Calon Pendaftar Guru PPPK	491.270
TOTAL	1.457.928

Tabel di atas memperlihatkan bahwa konsep pelatihan daring sangat efektif dalam hal capaian jumlah peserta pelatihan yang akan sulit tercapai bila dilakukan secara luring ataupun *hybrid*. Konsep ini juga menyebabkan GTK bisa mengikuti pelatihan lebih dari satu seri. Secara unik peserta yang telah mengikuti Seri Guru Belajar sebanyak 1.171.053 orang (per31 Desember). Guru Berbagi dikembangkan untuk mendukung GTK untuk tetap memberikan pembelajaran yang bermakna. GTK berbagi ide dan praktik baik bersama melalui fitur Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Artikel, Video, dan Aksi pada portal Ayo Guru Berbagi. Berikut capaian untuk setiap fitur dimaksud:

Fitur Guru Berbagi	Jumlah Postingan
Berbagi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	218.747
Berbagi Artikel	8.549
Berbagi Video	171
Berbagi Aksi	1.051

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 kondisi Covid-19 yang membatasi mobilitas masyarakat, memengaruhi pelaksanaan Uji Pengetahuan (UP) secara luring di LPTK sesuai mapel dimana peserta mengikuti program PPG sebagai salah satu syarat kelulusan PPG dalam jabatan;
- 2 pelaksanaan PPG yang dilakukan dengan moda daring mengalami sejumlah hambatan di antaranya;
 - a. moda daring menuntut motivasi dan kemandirian peserta;
 - b. UKIN yang video Kemampuan IT sebagian GTK belum memadai;
 - c. moda daring membutuhkan perangkat gawai dan sarana internet yang memadai.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan atau hambatan yang hadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai, di antaranya adalah:

- 1 melakukan perubahan moda program menjadi daring dan *hybrid* dengan tujuan untuk memudahkan peserta yang kesulitan mengakses internet dan memiliki keterbatasan alat maupun jaringan internet;
- 2 menambah sasaran PPG dengan dana APBN untuk mengatasi peserta yang mengundurkan diri;
- 3 memberikan pembekalan dan perdampingan persiapan peserta dalam melaksanakan uji kinerja dan uji pengetahuan; dan
- 4 memberikan pembekalan dan perdampingan persiapan Ukin dan UP.

Strategi

Strategi ke depan yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai, antara lain:

- 1 Uji Pengetahuan (UP) dilakukan di LPTK berbasis domisili peserta, bukan lagi berdasarkan LPTK dimana peserta terdaftar yang kemungkinan berbeda dari domisilinya;
- 2 melakukan realokasi bagi mahasiswa yang terdaftar tetapi mengundurkan diri;
- 3 memberikan kesempatan *re-taker* atau melakukan uji ulang UKMPPG (Uji Kompetensi Mahasiswa PPG) kepada peserta yang tidak lulus karena nilainya di bawah *batas passing grade* tetapi sudah menyelesaikan seluruh proses PPG untuk percepatan program PPG dalam jabatan.

IKSS 2.7 Persentase Guru Kejuruan SMK yang Mempunyai Pengalaman Kerja di Industri /Sertifikasi Kompetensi yang Diakui oleh Industri

2020	2021	Akhir Periode Renstra
Realisasi 12,31%	Target 18%	Target 40%
Capaian 102,58%	Realisasi 20,58%	Capaian 51,45%
	Capaian 114,33%	

Peningkatan mutu dan kualitas SDM pada SMK yaitu guru dan kepala sekolah melalui peningkatan kompetensi ditandai dengan diperolehnya sertifikasi kompetensi dari industri. Program ini ditujukan bagi guru kejuruan dan kepala sekolah dari SMK yang

termasuk ke dalam bidang prioritas pengembangan SMK sebagai pusat keunggulan/*Center of Excellence* (COE) yang mengikuti *upskilling* dan *reskilling* oleh Industri dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki kerja sama dengan dunia kerja dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan dan mendapatkan sertifikat pelatihan/kompetensi dari dunia kerja.

Persentase guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi dari industri adalah persentase guru kejuruan dari SMK yang termasuk ke dalam bidang prioritas pengembangan SMK sebagai pusat keunggulan/*Center of Excellence* (COE) yang mendapatkan *upskilling* dan *reskilling* oleh

Industri dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki kerja sama dengan dunia kerja dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan dan mendapatkan sertifikat pelatihan/kompetensi dari dunia kerja.

Pelatihan *upskilling* adalah pelatihan berbasis industri bagi guru yang berorientasi pada peningkatan level kompetensi teknis/kejuruan/kerja yang telah dimiliki sebelumnya. Pelatihan *reskilling* adalah pelatihan berbasis industri bagi guru yang berorientasi pada penguasaan kompetensi teknis/kejuruan/kerja yang belum dimiliki sebelumnya. Guru kejuruan yang menjadi target untuk dikembangkan menjadi *Center of Excellence* (COE), minimal 2 (dua) guru kejuruan setiap kompetensi keahlian dikembangkan dengan merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pendidikan Vokasi Nomor 16 tahun 2020. Perhitungan persentase Guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Guru kejuruan tersertifikasi di industri}}{\text{Jumlah Guru kejuruan SMK}} \times 100\%$$

Capaian tahun 2021 indikator kinerja terkait persentase guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri adalah sebesar 20,58%, lebih tinggi dari yang ditargetkan, yakni 18,00%, atau realisasi capaian sebesar 114,33%. Ketercapaian melebihi target dikarenakan perencanaan kegiatan yang sebelumnya diselenggarakan secara luring atau tatap muka, mengalami penyesuaian menjadi daring/*hybrid* sehingga menyebabkan penghematan biaya dan menambah jumlah sasaran peserta kegiatan.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 mendukung 5.528 guru SMK untuk memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri melalui pelatihan berikut:

- a. Pelatihan bagi guru dan widyaiswara teknik alat berat bekerja sama dengan United Tractor School
- b. Pelatihan Digital Marketing Strategy dan Social Media Marketing untuk guru SMK oleh Dyandra Academy
- c. Pelatihan Instalasi Perangkat Wireless dan Microwave untuk guru SMK bersama Huawei Indonesia
- d. Diklat Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) bagi kepala Sekolah
- e. ToT Pelatih di tempat Kerja
- f. Pelatihan tata kecantikan rambut untuk guru SMK yang dilaksanakan oleh Loreal Indonesia

2 mendukung 8.778 guru kejuruan untuk mengikuti pelatihan *upskilling* dan *reskilling* berstandar industri oleh Balai Besar Vokasi Kemendikbudristek, yakni BBPPMPV Seni Budaya, BBPPMPV Pertanian, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika, BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknik Industri, BBPPMPV Bidang Bangunan dan Listrik, dan BPPMPV Kelautan Perikanan dan TIK.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, antara lain:

- 1** kebijakan PPKM menyebabkan peserta yang tidak bisa hadir karena keterbatasan transportasi, serta menyebabkan mundurnya jadwal pelatihan; dan
- 2** banyak peserta yang tidak dapat hadir karena terkendala dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan bersamaan.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala adalah sebagai berikut:

- 1** melakukan koordinasi, kerja sama, dan negosiasi dengan dunia kerja agar dapat mengoptimalkan penerimaan guru SMK yang akan dilatih;

- 2 melakukan koordinasi, kerja sama, dan negosiasi dengan dunia kerja agar dunia kerja bekerja sama dengan BBPPMPV sehingga sertifikasi kompetensi dapat diberikan melalui BBPPMPV;
- 3 melakukan inovasi dan modifikasi mekanisme pelatihan baik luring maupun daring; dan
- 4 mengoptimalkan pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dunia kerja untuk membantu pelatihan Guru Vokasi.

Strategi

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai, antara lain:

- 1 memastikan lokasi tempat tinggal calon peserta berdekatan dengan lokasi pelatihan baik yang dilaksanakan oleh IDUKA maupun oleh Balai Besar Vokasi Kemendikbudristek (BBPPMPV/BPPMPV);
- 2 mengoptimalkan penggunaan aplikasi yang ada, yakni SIMPKB, untuk penyediaan peserta pengganti; dan
- 3 melakukan penjadwalan ulang pelatihan yang belum dilaksanakan.

IKSS 2.8 Persentase Dosen yang Memiliki Pengalaman Bekerja atau Tersertifikasi di Industri

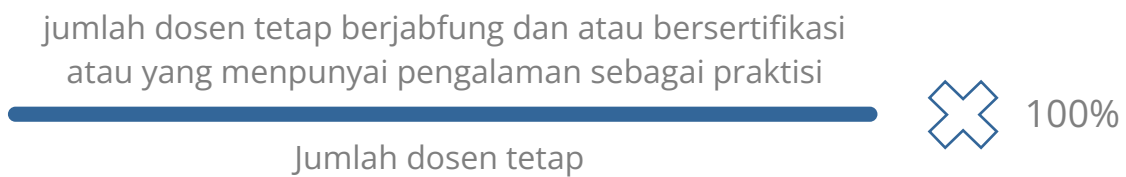
Dalam UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2009 tentang Dosen dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan

Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dinyatakan bahwa Jabatan fungsional Dosen yang selanjutnya disebut jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta

2020	2021	Akhir Periode Renstra
Realisasi 68,74%	Target 71,80%	Target 80%
Capaian 99,62%	Realisasi 81,51%	Capaian 101,89%
	Capaian 113,52%	

bersifat mandiri. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jabatan Akademik Dosen berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini jenjang karir seorang dosen dinyatakan dalam bentuk jenjang jabatan akademik dosen, yang terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan professor.

Dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di Industri atau profesinya yang dimaksud adalah dosen yang memiliki jabatan minimal asisten ahli atau memiliki sertifikasi di industri atau sertifikasi profesi. Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya dihitung dari perbandingan antara jumlah dosen yang mempunyai jabatan fungsional dan/atau tersertifikasi dengan jumlah seluruh dosen tetap, dengan metode penghitungan sebagai berikut:



Pada tahun 2021, capaian indikator kinerja terkait dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri tersebut mencapai 81,51% atau sebanyak 168.660 orang dari total dosen tetap 202.643 orang. Capaian tahun 2021 ini lebih tinggi dari yang ditargetkan sebesar 71,80% sehingga realisasi pencapaian target pada tahun 2021 adalah 113,52%.

Selain intervensi program dan kegiatan yang dilakukan di tahun 2021, capaian yang melampaui target ini juga didukung semakin tertibnya perguruan tinggi dalam memutakhirkan data dosen yang memiliki jabatan fungsional. Capaian ini juga disebabkan karena indikator kinerja ini merupakan salah satu IKU masing-masing PTN, sehingga tingkat partisipasi perguruan tinggi untuk mengoptimalkan capaian ini juga meningkat

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 melakukan pembekalan peserta program pelatihan dosen pendidikan tinggi akademik dan vokasi;
- 2 mendukung 4.342 dosen pendidikan tinggi vokasi untuk mengikuti sertifikasi kompetensi pada 5 bidang kompetensi yaitu *care service*, *economy creative*, *manufacture*, *hospitality*, dan bidang lainnya;
- 3 menyusun borang *Monev Program World Class Profesor* berdasarkan kehidupan akademik, kualitas dan kontribusi bagi pengembangan IPTEK dan penguatan sistem inovasi nasional;
- 4 memberikan beasiswa bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan;
- 5 memberikan bantuan kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan;
- 6 menyelenggarakan Program Magang Dosen, memberikan bantuan/hibah untuk melakukan penelitian/riset;
- 7 memberikan peluang kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk melakukan kolaborasi bersama dunia kerja; dan
- 8 penilaian angka kredit dosen;

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi terkait pencapaian indikator tersebut, sebagai berikut:

- 1 masih terbatasnya anggaran yang mendukung kerja sama dan kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia kerja;
- 2 pandemi Covid-19 memengaruhi program magang dosen ke industri karena adanya pembatasan PTM di industri dan masih banyak industri yang menerapkan

work from home, serta terkendala dengan kesibukan pendamping praktisi sehingga memengaruhi pengaturan jadwal pertemuan;

3 masih terkendalanya proses penilaian angka kredit karena belum terpenuhinya syarat khusus terutama terkait publikasi di jurnal internasional bereputasi, pandemi Covid-19 yang membatasi Tim Penilai Angka Kredit dalam melaksanakan penilaian, serta pemberlakuan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit 2019 (PO PAK 2019) yang menyulitkan Tim Penilai dalam proses penyamaan persepsi dan penilaian angka kredit yang dilaksanakan secara daring; dan

4 pembatasan pemberian honorarium dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Standar Biaya Masukan (SBM) 2021.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala adalah sebagai berikut:

1 melakukan peningkatan kompetensi dosen dalam penulisan karya ilmiah yang publikasi di jurnal Internasional bereputasi dengan bimbingan teknis penulisan karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi;

2 meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak industri terkait program magang dosen ke industri, serta penyesuaian jadwal dengan pendamping praktisi industri dan memperbanyak jumlah kunjungan terutama setelah PPKM diturunkan;

3 optimalisasi penilaian angka kredit dosen secara daring melalui sistem penilaian angka kredit untuk mengefektifkan pelayanan di masa pandemi;

4 membuat wadah diskusi untuk membahas permasalahan penilaian angka kredit dosen pada aplikasi media sosial sebagai tempat untuk berbagi pegetahuan dan berdiskusi.

Strategi

Strategi ke depan yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai yaitu:

- 1 mendorong kerja sama dan kolaborasi perguruan tinggi dengan dunia kerja diantaranya program akselarasi kerja sama perguruan tinggi Indonesia dengan 100 perguruan tinggi besar dunia;
- 2 mengajukan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan dalam rangka peningkatan jumlah dosen yang memiliki pengalaman di industri melalui mekanisme pendanaan LPDP, seperti magang dosen, detasering, bimbingan teknis dosen, dan WCP; dan
- 3 meningkatkan kompetensi dosen dalam penulisan karya ilmiah melalui bimbingan teknis penulisan karya ilmiah pada jurnal Internasional bereputasi.

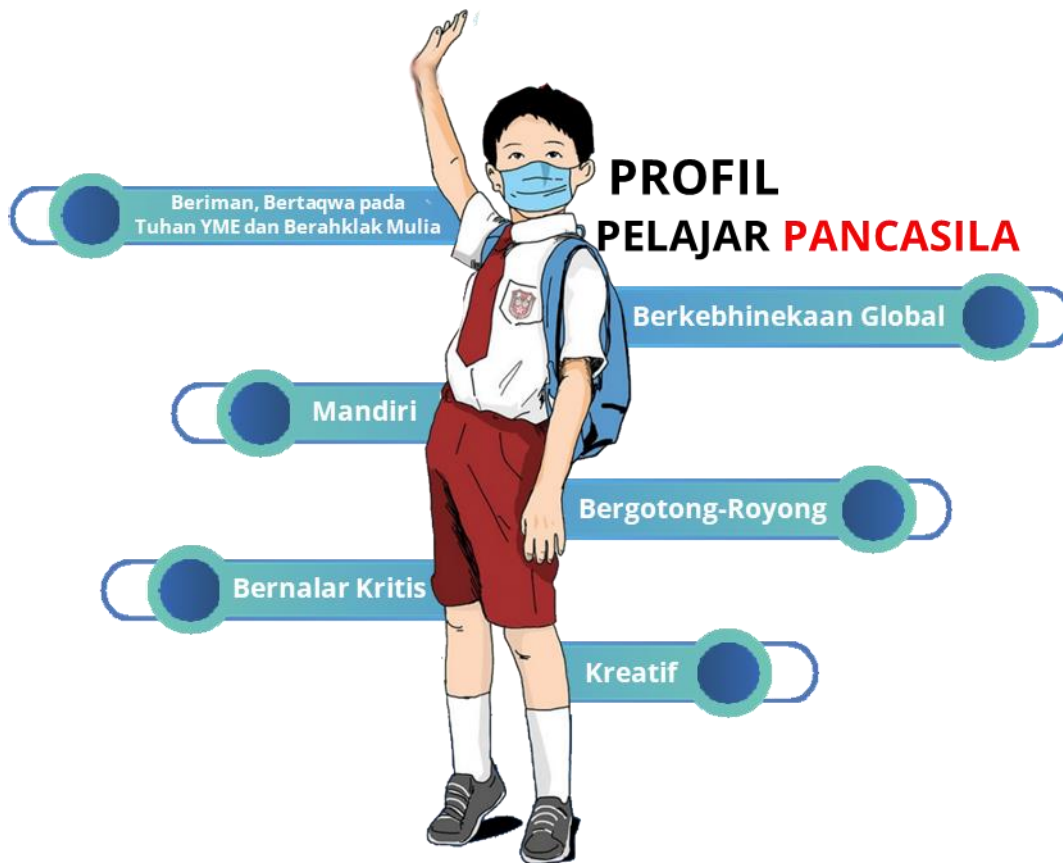
Sasaran Strategis 3

Menguatnya Karakter Peserta Didik

No	SS/IKSS	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
Menguatnya Karakter Peserta Didik				
1	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Lingkungan Kondusif dalam Pembangunan Karakter	35%	38,99%	111,40%
2	Persentase Tingkat Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila	15%	15,60%	104%
3	Persentase Tingkat Pemahaman Konsep Merdeka Belajar	15%	16,70%	111,33%

Salah satu program Nawacita adalah penguatan pendidikan karakter bangsa. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter menjadi panduan Kemendikbudristek dalam menjalankan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di lingkungan sekolah dan keluarga/masyarakat. Dalam pendidikan karakter, ada empat aspek filosofi pendidikan yang ditanamkan. Filosofi tersebut di atas menjadi acuan dalam menciptakan peserta didik yang berkarakter Pancasila atau Pelajar

Pancasila. Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan melalui pendekatan guru dan siswa secara langsung melalui kegiatan intra-kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler pada setiap jenjang pendidikan, serta melalui pendekatan keluarga dan masyarakat melalui kampanye publik.



Sampai tahun 2021, penguatan karakter peserta didik mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya ekosistem pendidikan dalam memahami dan mengamalkan pendidikan karakter, terutama di lingkungan sekolah. Survei Karakter yang dilakukan pada tahun 2021, misalnya, menunjukkan bahwa 92,49% satuan pendidikan memiliki lingkungan kondusif (lingkungan yang aman, nyaman, sehat, gembira, menarik dan mampu membangkitkan gairah belajar). Bila dibandingkan dengan tahun 2020, capaian ini meningkat secara signifikan, yakni sekitar 2,5 kali lipat, dari 36,73% di tahun 2020, menjadi 92,49% di tahun 2021. SS menguatnya karakter peserta didik ini, didukung oleh 3 IKSS, dengan rincian sebagai berikut:

IKSS 3.1 Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Lingkungan Kondusif dalam Pembangunan Karakter

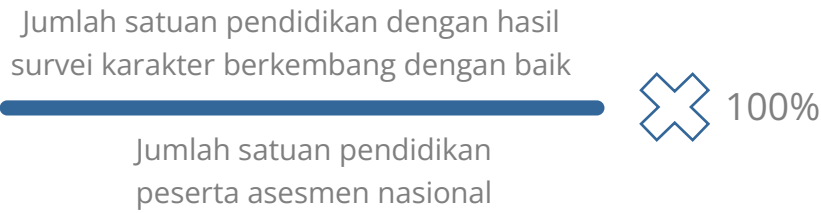
2020	2021	Akhir Periode Renstra
Realisasi 36,73%	Target 35%	Target 50%
Capaian 122,43%	Realisasi 38,99%	Capaian 77,98%
	Capaian 111,40%	

Satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter adalah satuan pendidikan yang hasil dari asesmen nasionalnya menunjukkan siswa di satuan pendidikan tersebut telah terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar

pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari.

Survei karakter sebagai bagian dari asesmen nasional mengukur hasil belajar sosial emosional murid berupa karakter profil pelajar pancasila. Pelaksanaan survei karakter mencakup seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal dengan jumlah sampel murid kelas 5 maksimal 30 sedangkan jumlah sampel murid kelas 8 dan kelas 11 maksimal 45 untuk setiap satuan Pendidikan. Variabel yang diukur dalam survei karakter adalah penerapan karakter akhlak pada sesama, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global, dan mandiri.

Perhitungan persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter adalah sebagai berikut:



Berdasarkan hasil survei karakter 2021, sebesar 38,99% atau sejumlah 110.905 satuan Pendidikan, karakter muridnya mencapai kategori berkembang dengan baik dari total 284.405 satuan pendidikan yang mengikuti asesmen nasional. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan yakni sebesar 35%, atau realisasi pencapaian target sebesar 111,40%.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 program pembinaan dan penguatan ekstrakurikuler jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mendorong penguatan karakter pada satuan pendidikan. Dukungan kegiatan ekstrakurikuler diberikan kepada 4.649 satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB;
- 2 pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) jenjang SD, SMP, SMA, SLB
Pendampingan tata kelola Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah Dasar diselenggarakan untuk:
 - a. menyamakan persepsi dengan dinas pendidikan kab/kota sasaran tentang pelaksanaan Program Pendampingan Tata Kelola Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah;
 - b. mensosialisasikan mekanisme pelaksanaan Program Pendampingan Tata Kelola Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah;
 - c. menetapkan dan mengesahkan peserta Program Pendampingan Tata Kelola Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah.
- 3 memberikan pembinaan kinerja (*scorecard*) kepada satuan pendidikan;

- 4 melaksanakan dan mendukung program UKS (sanitasi), menggunakan basis data pada Dapodik;
- 5 melaksanakan program pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), sebagai salah satu bentuk penguatan pendidikan karakter terkait pola hidup sehat yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi oleh empat kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri;
- 6 pemberian bantuan untuk pembinaan pendidikan karakter bangsa bagi peserta didik, yang antara lain diwujudkan dalam bentuk festival dan lomba;
- 7 pembuatan dan penyebarluasan konten penguatan karakter pada satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat melalui berbagai media sebagai bagian dari kampanye publik; dan
- 8 pembuatan Iklan layanan masyarakat terkait penguatan karakter melalui berbagai media.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, antara lain:

- 1 belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan sehubungan dengan pandemi Covid-19, sehingga pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui daring, yang seharusnya akan lebih berdampak luas bila dilakukan secara tatap muka langsung;
- 2 belum optimalnya koordinasi antarunit internal Kemendikbudristek terkait sosialisasi konten-konten penguatan karakter serta kolaborasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyosialisasikan kebijakan penguatan karakter pada satuan pendidikan;
- 3 kondisi daerah yang berbeda-beda menyebabkan intervensi penanganan penjaminan lingkungan kondusif di satuan pendidikan harus spesifik;

- 4 perhitungan nilai lingkungan kondusif hasil dari asesmen nasional merupakan tahun pertama pelaksanaan sehingga ada perbedaan metode penghitungan saat penetapan *baseline*; dan
- 5 adanya revisi anggaran mengakibatkan pencapaian target menjadi kurang optimal.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 melakukan inovasi atas pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan media virtual seperti webinar, serta kampanye penguatan karakter menggunakan berbagai media, baik TV, Radio, *video conference*, dan media lainnya;
- 2 memperkuat koordinasi antarunit internal Kemendikbudristek dan saling berbagi peran antara unit, dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan kebijakan penguatan karakter pada satuan pendidikan;
- 3 meningkatkan pemetaan data pokok pendidikan sehingga mendapatkan data lingkungan kondusif satuan pendidikan yang valid untuk setiap daerah sebagai dasar perencanaan;
- 4 memaksimalkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) serta kegiatan-kegiatan positif seperti UKS dan ekstrakurikuler.
- 5 meningkatkan perencanaan tingkat satuan pendidikan baik kegiatan maupun anggaran dengan memanfaatkan sarana-sarana yang ada seperti aplikasi ARKAS;
- 6 memaksimalkan sumber daya personil di sekolah terkait lingkungan sekolah di antaranya dengan adanya program sekolah penggerak; dan
- 7 meningkatkan kualitas perencanaan program sehingga apabila terjadi revisi anggaran di tengah tahun anggaran tidak terlalu berdampak pada penyaluran bantuan.

Strategi

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

- 1 melakukan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan supaya menarik minat masyarakat;
- 2 memanfaatkan berbagai media baik TV, Radio, dan media virtual lainnya untuk menyosialisasikan program penguatan karakter sekaligus penyebarluasan konten-konten menarik terkait penguatan karakter;
- 3 membuat konten-konten menarik serta Iklan Layanan Masyarakat untuk menginternalisasi nilai-nilai penguatan karakter di masyarakat.
- 4 melaksanakan program peningkatan SDM maupun kualitas data di satuan pendidikan yang akan menghasilkan perencanaan sekolah yang baik dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif.

IKSS 3.2 Persentase Tingkat Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila

Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik berdasarkan hasil kampanye komunikasi publik untuk penyebarluasan konten nilai-nilai Pancasila (Profil Pelajar Pancasila). Tingkat pengamalan Pancasila dapat dilihat dari indeks-indeks

2020	2021	Akhir Periode Renstra
Realisasi 12,80%	Target 15%	Target 40%
Capaian 128%	Realisasi 15,60%	Capaian 39%
	Capaian 104%	

pengukuran yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (Narasi RPJMN, V.10). Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah peserta didik yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila}}{\text{Jumlah seluruh peserta didik}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021 target kinerja dari indikator kinerja Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila adalah 15%, dan telah terealisasi sebesar 15,6% (9.558.838 peserta didik

dari total peserta didik sebanyak 60.957.008 peserta didik), dengan persentase capaian sebesar 104%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 12,80%, capaian tahun 2021 meningkat sebesar 2,8 poin, yakni 15,6%. Ketercapaian ini melampaui target dimungkinkan karena konten yang disusun semakin menarik dibuktikan dengan jumlah penonton yang terus meningkat serta adanya komitmen terbuka dari para peserta kegiatan yang diselenggarakan secara luring untuk menyebarluaskan konten-konten tersebut.

Program/Kegiatan

Menggunakan strategi *above the line* dan *below the line*, upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja ini, antara lain:

- 1 memproduksi dan penyebarluasan konten, antara lain:
 - a. Talkshow Pelajar Pancasila Generasi Emas Episode 2 & 3
 - b. Konten Video Penguatan karakter bertema Perundungan "Suara Yang Tak Terdengar"
 - c. Konten Video Penguatan karakter Semua Sayang Teman Bersama Si Juki - Menghadapi Perbedaan
 - d. Webinar Ngobrol Intim yang Muda, yang Berjuang untuk Setara Bersama Mas Menteri
 - e. Konten Video Penguatan Karakter Hari Anti Penyiksaan Internasional
 - f. Konten Video Penguatan Karakter bertema Hari Keluarga Nasional: Keluarga Yang Utama
 - g. Konten Infografis Hari Keluarga Internasional, Klub Rumah Pohon - Menjaga Diri
 - h. Indahnya Persaudaraan untuk Hari yang Fitri
 - i. Ngabubu-read Bareng Ibu Menteri (Hari Buku Nasional)
 - j. Gelar Wicara Pelajar Pancasila - Bersama Cegah dan Atasi Perundungan pada Anak
 - k. Nonton Bareng Virtual Film Kartini Bersama Hanung Bramantyo, Dian Sastrowardoyo & Kalis Mardiasih

- l. Konten Intoleransi - IG Live Tantri Kotak dengan Quraish Shihab "Perbedaan adalah rahmat bukan musibah"
- m. Gelar Wicara Hari Lingkungan Hidup Sedunia
- n. Webinar "Puasa, Kemanusiaan dan Toleransi" Bersama Mas Menteri
- o. Konten Intoleransi - IG Live Zaskia Mecca dengan Quraish Shihab

2

memproduksi dan menyebarluaskan 9 konten penguatan karakter satuan pendidikan, yakni:

- a. Apresiasi Kreasi Lagu Pelajar Pancasila (KERLAP) 2021
- b. Memperingati Hari Pramuka
- c. Film Pendek Profil Pelajar Pancasila: Senja Yang Kesepian
- d. Riri Cerita Anak: Perundungan
- e. Portal Praktik Baik Liga Kampanye Penguatan Karakter
- f. Film Pendek Profil Pelajar Pancasila: Langit Tak Selamanya Abu-Abu
- g. Anti Kekerasan Seksual: Menabur Pesan #GerakBersama untuk #AmanBersama dalam Lukisan Pasir
- h. Toleransi: Episode Pendidik dan Peserta Didik
- i. Kisah Menanamkan Toleransi pada Murid Melalui Praktek dari Kota Bandung

3

memproduksi dan menyebarluaskan 9 konten penguatan karakter keluarga, yakni:

- a. Buah Nikmat Badan Sehat
- b. Toleransi: Berempati, Kisah Kreatif di Kota Sukoharjo
- c. Bermain Imajinasi Bersama Suzan dan Kak Ria Enes dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional
- d. Toleransi: Menjalankan Nilai Perdamaian Dalam Keberagaman di Kota Serang
- e. Anti Perundungan: Kato Manurun
- f. Riri Cerita Anak Interaktif - Ruang Aman Bagi Anak
- g. Cerita Cinta Indonesia: Warisan Ibu
- h. Logika Versus Emosi dalam rangka memperingati Hari Remaja Internasional
- i. Cerita Cinta Indonesia: Rujak Indonesia

4

memproduksi dan menyebarluaskan 9 konten penguatan karakter masyarakat, yakni:

- a. Toleransi: Sebagai Persaudaraan yang Hakiki Menuju Keabadian dari Manado (Juli)
- b. Dampak Psikologis Intoleransi Bagi Pelaku dan Korban (Agustus)
- c. Menyebarkan Toleransi dengan Story Telling melalui Media Sosial (September)
- d. Memperingati Hari Polisi Wanita (September)
- e. Toleransi: Menghargai Agama Orang Lain seperti Agama Sendiri dari Kabupaten Buleleng Singaraja (Agustus)
- f. Memperingati Hari Olahraga Nasional (September)
- g. Memperingati Hari Perdamaian Dunia (September)
- h. Riri Cerita Anak: Toleransi Beragama (September)
- i. Anti Kekerasan Seksual Klub Rumah Pohon - Dongeng Sama Hebatnya (September)

5

melaksanakan webinar serta talkshow terkait isu kekerasan seksual, perundungan, Intoleransi, serta profil pelajar Pancasila, yang menyasar 8,5 juta peserta didik dari total 61,7 juta peserta didik aktif.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1

perhitungan capaian kampanye *below the line* belum dapat dilaksanakan karena aplikasi/sistemnya masih dalam pengembangan;

2

pelaksanaan kerja sama dengan penyedia untuk produksi konten baru dapat direalisasikan setelah 100% pekerjaan selesai;

3

perlu waktu untuk proses pengadaan barang dan jasa;

4

koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait; dan

5

keterbatasan pelaksanaan kegiatan dalam kondisi pandemi Covid-19.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut, sebagai berikut:

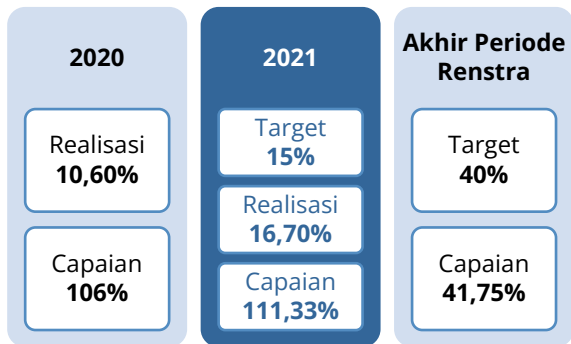
- 1 mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa;
- 2 melakukan koordinasi secara daring dengan kementerian dan lembaga terkait; dan
- 3 melaksanakan kegiatan secara daring dan mengikuti protocol kesehatan yang berlaku

Strategi

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

- 1 melanjutkan produksi konten kampanye penguatan karakter;
- 2 melakukan pengembangan aplikasi untuk perhitungan capaian kampanye *below the line*;
- 3 mengupayakan agar pekerjaan dan realisasi dapat dipercepat;
- 4 mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa;
- 5 melakukan koordinasi secara daring dengan kementerian dan lembaga terkait;
- 6 melaksanakan kegiatan secara daring dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku; dan
- 7 melaksanakan kegiatan secara daring dan *hybrid*, serta mengikuti protokol kesehatan yang berlaku

IKSS 3.3 Persentase Tingkat Pemahaman Konsep Merdeka Belajar



Persentase tingkat pemahaman konsep merdeka belajar pada ekosistem pendidikan berdasarkan hasil kampanye publik. Tingkat pemahaman kebijakan Merdeka Belajar pada ekosistem pendidikan adalah tingkat pemahaman satuan pendidikan, keluarga,

dan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Satuan pendidikan yang dimaksud adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal. Keluarga yang dimaksud adalah orang tua/wali peserta didik. Sedangkan masyarakat yang dimaksud terdiri dari unsur dinas pendidikan, dewan pendidikan, pegiat pendidikan dan kebudayaan, dan organisasi penggerak. Persentase tingkat pemahaman konsep merdeka belajar pada ekosistem pendidikan diukur berdasarkan hasil kampanye publik menggunakan survei persepsi. Metode penghitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah ekosistem pendidikan yang paham konsep merdeka belajar}}{\text{Jumlah seluruh ekosistem pendidikan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021 target kinerja dari indikator kinerja Persentase Tingkat Pemahaman Konsep Merdeka Belajar adalah 15%, dan telah terealisasi sebesar 16,70% (31.306.000 juta orang dari total ekosistem Pendidikan berjumlah 187.320.986 orang), dengan persentase capaian sebesar 111,33%. Ketercapaian melampaui target dimungkinkan karena implementasi Merdeka Belajar pada tahun 2021 dilakukan oleh berbagai Satker di Kemendikbudristek baik secara mandiri maupun kolaborasi. Selain itu, 14 buah paket kebijakan Merdeka Belajar memiliki sasaran yang cukup besar sehingga semakin banyak pihak di ekosistem pendidikan yang terlibat dan memahaminya, serta menjadi arah kebijakan utama Kemendikbudristek, antara lain Asesmen Nasional, dana BOS, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, serta Kampus Merdeka.

Selain itu, faktor pendukungnya adalah:

- 1 Satker yang memberikan intervensi terhadap pemahaman Merdeka Belajar semakin banyak dibandingkan tahun 2020;
- 2 Episode Merdeka Belajar semakin banyak; dan
- 3 Kepercayaan terhadap kementerian berdasarkan survei aspirasi dan persepsi oleh BKHM yang rata-rata di atas 90%.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 sosialisasi melalui media sosial Program Merdeka Belajar;
- 2 koordinasi dan Sosialisasi Sekolah Penggerak kepada kabupaten/kota, kepala satuan pendidikan, organisasi mitra, dan UPT;
- 3 melaksanakan Webinar terkait pengelolaan Dana BOS;
- 4 pengembangan Learning Management System (LMS) Merdeka dari Kekerasan;
- 5 pengenalan Program Kampus Merdeka Vokasi;
- 6 penerbitan buku, panduan, modul-modul Pendampingan Sekolah Penggerak jenjang Sekolah Dasar;
- 7 sosialisasi Program Asesmen Kompetensi Sekolah Dasar;
- 8 program Televisi Indonesia;
- 9 survei Aspirasi dan Persepsi Kementerian.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

- 1 keterbatasan publikasi melalui pertemuan secara langsung akibat pandemi Covid-19;
- 2 perbandingan jam pelajaran teori dan praktek masih perlu ditingkatkan.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

- 1 melakukan publikasi melalui seluruh *platform* media sosial dan *website* Kemendikbudristek dan media luar Kemendikbudristek;
- 2 secara terus menerus bersinergi dengan kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk menyosialisasikan Kebijakan Merdeka Belajar; dan
- 3 memproduksi konten-konten berkualitas terkait Kebijakan Merdeka Belajar melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan.

Strategi

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai adalah sebagai berikut:

- 1 meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kerja sama antarunit kerja di Kemendikbudristek terkait Kebijakan Merdeka Belajar di masing-masing unit kerja, serta kerjama dengan kementerian/lembaga lain untuk percepatan pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar;
- 2 melakukan sosialisasi berkala dan terjadwal dengan menghadirkan Mendikbudristek dan Pimpinan Eselon I pada forum-forum sosialisasi Merdeka Belajar; dan
- 3 melanjutkan diseminasi secara langsung Kebijakan Merdeka Belajar setiap episode bersama Mendikbudristek pada platform digital Kemendikbudristek, yaitu melalui kanal youtube.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

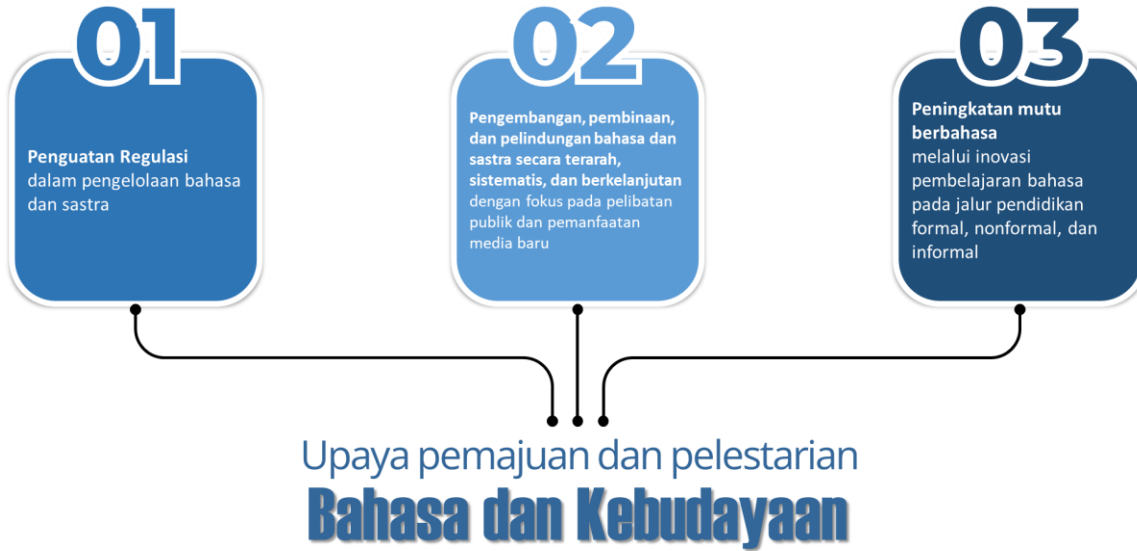
No	SS/IKSS	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan				
1	Rata-Rata Skor Kemahiran Berbahasa Indonesia	515	520	100,97%
2	Jumlah Penutur Muda Bahasa Daerah	50.000	42.396	84,79%
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	57,30	54,65	95,38%

Sebagai salah satu agenda pembangunan nasional yang didukung oleh Kemendikbudristek, pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan menjadi program prioritas di Kemendikbudristek untuk mendukung agenda pembangunan nasional dimaksud, yakni revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Sepanjang tahun 2020-2021, Kemdikbudristek turut berupaya mendukung pencapaian target Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), yang juga menjadi indikator kinerja pada RPJMN. Program-program Kemdikbudristek dalam memajukan bahasa dan budaya Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga tema besar:



Upaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengoptimalkan fungsi dan peran bahasa Indonesia, baik dalam pengembangan mutu bahasa dan sastra Indonesia maupun mutu pengguna bahasa Indonesia terus dilakukan. Optimalisasi tersebut diharapkan dapat mendorong pembentukan karakter bangsa, manusia cerdas, profesional, unggul, dan berkepribadian dalam menyiapkan generasi milenial yang berdaya saing tinggi dalam menyongsong era globalisasi.

Upaya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan yang telah dan akan terus dilakukan melalui:



Selain itu, berbagai even budaya sebagai wujud apresiasi serta meningkatkan identitas bangsa juga dilakukan serta pelestarian cagar budaya dan desa budaya, dukungan terhadap karya film dan musik Indonesia, perlindungan warisan budaya, dan penguatan SDM Kebudayaan. Ketercapaian SS terkait peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan bahasa dan kebudayaan tersebut didukung oleh 3 IKSS, dengan tingkat ketercapaian dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:

IKSS 4.1 Rata-Rata Skor Kemahiran Berbahasa Indonesia

Rata-rata skor kemahiran berbahasa merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kemahiran masyarakat dalam berbahasa Indonesia. Indikator ini merupakan nilai rata-rata yang menunjukkan kemahiran penutur dalam memahami dan

menggunakan bahasa Indonesia yang meliputi kemahiran mendengarkan, kemahiran membaca, kemahiran berbicara, dan kemahiran menulis, serta kemahiran tentang merespons kaidah bahasa Indonesia. Skor kemahiran berbahasa Indonesia diukur dengan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) yang telah dikembangkan oleh BPP Bahasa sejak tahun 2003.

2020	2021	Akhir Periode Renstra
Realisasi 551	Target 515	Target 530
Capaian 108,04%	Realisasi 520	Capaian 98,11%
	Capaian 100,97%	

Penggunaan UKBI di masyarakat telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia. Hak Cipta UKBI tertuang di dalam Surat Pendaftaran Ciptaan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 023993 dan 023994 tertanggal 8 Januari Tahun 2004 dan telah diperbarui pada tahun 2011 atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPP Bahasa). Skor kemahiran berbahasa mengukur keterampilan reseptif peserta uji dalam kegiatan mendengarkan dan mengukur keterampilan produktif peserta uji dalam kegiatan berbicara (dalam penggunaan bahasa Indonesia lisan). Selain itu, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) mengukur keterampilan reseptif dalam kegiatan membaca dan mengukur keterampilan produktif peserta uji dalam kegiatan menulis (dalam penggunaan bahasa Indonesia tulis). UKBI juga mengukur pengetahuan dan pemahaman peserta uji dalam penerapan kaidah bahasa Indonesia. Metode penghitungan indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah skor seluruh peserta}}{\text{Jumlah peserta}} = \text{Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia}$$

UKBI merupakan tes standar untuk mengetahui kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia. Sebagai bangsa yang memiliki bahasa modern yang multifungsi dan memiliki jumlah penutur yang besar, bangsa Indonesia memang harus memiliki sarana evaluasi mutu penggunaan bahasa Indonesia. Tanpa menafikan peran wahana lain, UKBI memiliki fungsi yang amat strategis, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas bahasa Indonesia serta penggunaan dan pengajarannya di dalam dan luar negeri, tetapi juga untuk memupuk sikap positif dan rasa bangga masyarakat Indonesia terhadap bahasanya.

PERINGKAT UKBI



Predikat:

Istimewa (Skor: 725—800)

Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sempurna dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini yang bersangkutan tidak memiliki kendala dalam berkomunikasi untuk keperluan personal, sosial, keprofesian, dan keilmiah.



Predikat:

Sangat Unggul (Skor: 641—724)

Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sangat tinggi dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini yang bersangkutan tidak memiliki kendala dalam berkomunikasi untuk keperluan sintas, sosial, dan keprofesian. Untuk kepentingan akademik yang kompleks, yang bersangkutan masih memiliki kendala.

**Predikat:****Unggul (Skor: 578—640)**

Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sangat memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini yang bersangkutan tidak memiliki kendala dalam berkomunikasi untuk keperluan sintas dan sosial. Peserta juga tidak terkendala dalam berkomunikasi untuk keperluan keprofesian, baik keprofesian yang sederhana maupun kompleks.

**Predikat:****Madya Skor: (482—577)**

Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini yang bersangkutan mampu berkomunikasi untuk keperluan sintas dan masyarakat dengan baik, tetapi masih mengalami kendala dalam hal keprofesian yang kompleks.

**Predikat:****Semenjana Skor: (405—481)**

Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang cukup memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dalam berkomunikasi untuk keperluan keilmiah, yang bersangkutan sangat terkendala. Untuk keperluan keprofesian dan masyarakat yang kompleks, yang bersangkutan masih mengalami kendala, tetapi tidak terkendala untuk keperluan keprofesian dan masyarakat yang tidak kompleks.

**Predikat:****Marginal Skor: (326—404)**

Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang tidak memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dalam berkomunikasi untuk keperluan masyarakat yang sederhana, yang bersangkutan tidak mengalami kendala. Akan tetapi, untuk keperluan masyarakat yang kompleks, yang bersangkutan masih mengalami kendala. Hal ini berarti yang bersangkutan belum siap berkomunikasi untuk keperluan keprofesian, apalagi untuk keperluan keilmiah.

**Predikat:****Terbatas Skor: (251—325)**

Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sangat tidak memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini peserta uji hanya mampu berkomunikasi untuk keperluan sintas. Pada saat yang sama, predikat ini juga menggambarkan bahwa potensi yang bersangkutan dalam berkomunikasi masih sangat besar kemungkinannya untuk ditingkatkan.

Pada tahun 2021, capaian rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia sebesar 520, melebihi dari target yang ditetapkan yakni 515, atau realisasi capaian sebesar 100,97% dari target tahun 2021. Faktor pendukung ketercapaian melebihi target, antara lain melakukan pengelompokan kepakaran tertentu di bidang kebahasaan sehingga dapat meningkatkan kepakaran tertentu tersebut, melakukan inovasi di bidang pengembangan kemahiran berbahasa yang membuat akses layanan makin meluas, melakukan koordinasi, fasilitasi, dan audiensi yang lebih intensif dengan berbagai pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan, minat, dan pelibatan masyarakat, yang secara khusus untuk meningkatkan pelaksanaan program kemahiran berbahasa Indonesia, dan program kebahasaan dan kesastraan secara umum.

Program/Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini beberapa kegiatan yang mendukung telah dilakukan antara lain:

- 1 inventarisasi kosakata, penyusunan kamus bidang ilmu, penyusunan kamus etimologi, dan sidang Komisi Istilah;
- 2 pelaksanaan pengkajian UKBI terutama berkaitan dengan UKBI Adaptif Merdeka; seminar dan lokakarya kemahiran berbahasa Indonesia;
- 4 program giat UKBI bagi pelajar SMP dan SMA; dan
- 5 melakukan pengkajian UKBI terutama untuk UKBI Adaptif Merdeka melalui seminar dan lokakarya kemahiran berbahasa Indonesia.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, antara lain:

- 1 peserta uji belum terbiasa menggunakan aplikasi UKBI Adaptif Merdeka;
- 2 keterbatasan jaringan internet di beberapa tempat menjadi kendala peserta, terutama dalam pengerjaan Seksi I (Mendengarkan);
- 3 tidak semua peserta mengakses seri pelatihan sehingga kurang memahami bentuk soal UKBI;
- 4 perangkat pengujian peserta belum seluruhnya memadai sehingga ada peserta yang melaksanakan UKBI dengan menggunakan gawai;
- 5 sikap peserta uji dalam mengerjakan tes yang kurang cermat;
- 6 pelaksanaan diskusi terpumpun Sidang Komisi Istilah dilakukan secara daring sehingga kurang maksimal (dalam Komisi Pertimbangan Istilah (KPI);
- 7 materi kosakata yang terdapat pada Senarai Padanan Asing Indonesia (SPAI) masih kurang baik, belum disaring, dan belum diurutkan; dan
- 8 sumber pengumpulan kosakata di Balai/Kantor Bahasa semakin berkurang.

Langkah Antisipasi dan Strategi

Langkah antisipasi dan strategi ke depan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala, antara lain:

- 1 menyajikan informasi yang komprehensif dan integratif dalam laman UKBI;
- 2 penguatan regulasi di bidang kebahasaan dengan penerbitan Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia;
- 3 melaksanakan program prapengujian berupa pelatihan, seminar, dan lokakarya kemahiran berbahasa;
- 4 mempertimbangkan pemutakhiran lebih lanjut UKBI Adaptif Merdeka agar lebih ramah pengguna yang memungkinkan seluruh peserta dapat melaksanakan tes dengan baik;
- 5 memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan tentang implementasi standar kemahiran dalam Permendikbud 70 Tahun 2016;
- 6 membuat simulasi UKBI Adaptif Merdeka;
- 7 mengoptimalkan Sidang Komisi Istilah melalui daring;
- 8 menyaring dan mengklasifikasikan Senarai Padanan Asing Indonesia (SPAI) sesuai dengan bidangnya serta mengundang narasumber ahli dalam bidang yang dipilih; dan
- 9 melakukan inventarisasi ulang pada daerah yang sumber kosakatanya berkurang dan memaksimalkan pemanfaatan korpus.

IKSS 4.2 Jumlah Penutur Muda Bahasa Daerah

2020	2021	Akhir Periode Renstra
Realisasi 25.651	Target 50.000	Target 98.000
Capaian 75,44%	Realisasi 42.396	Capaian 43,26%
	Capaian 84,79%	

Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang sangat banyak, baik warisan budaya benda maupun warisan budaya takbenda. Dari banyaknya warisan budaya takbenda, bahasa merupakan salah satu warisan yang sangat penting bagi kehidupan manusia.

Melalui bahasa, manusia bisa berkomunikasi dengan dunia, mendefinisikan identitas kelompok, mengekspresikan sejarah dan budaya, belajar, membela hak asasi manusia, dan berpartisipasi dalam semua aspek masyarakat. Selain itu, manusia melestarikan sejarah, adat istiadat dan tradisi, ingatan, cara berpikir, makna, dan ekspresi komunitas melalui bahasa. Manusia juga menggunakan bahasa untuk membangun masa depan dalam segala bidang.

Hingga tahun 2019 telah teridentifikasi 718 bahasa daerah dengan total 2.560 daerah pengamatan di seluruh Indonesia. Makin banyak temuan bahasa teridentifikasi makin banyak pula kekayaan bangsa Indonesia. Jumlah tersebut pun masih dapat bertambah karena belum semua daerah di Indonesia ditelusuri mengingat adanya keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Banyaknya bahasa daerah di Indonesia membuat pemerintah selalu berupaya menjaga kekayaan negara dengan melakukan perlindungan bahasa dan sastra daerah.

Di sisi lain, jumlah bahasa daerah yang banyak tersebut juga dapat berkurang atau punah. Banyak faktor yang menyebabkan bahasa daerah punah, di antaranya perkawinan berbeda suku, adanya dominasi bahasa tertentu, bahasa daerah tidak digunakan dalam komunikasi sehari-hari secara informal, tidak adanya pengajaran bahasa daerah secara formal, hingga sedikitnya jumlah penutur asli, bahkan meninggalnya penutur asli bahasa sehingga tidak adanya penutur asli bahasa daerah tersebut. Berkurangnya bahasa daerah dapat diartikan sebagai berkurangnya pula kekayaan Indonesia. Tidak hanya itu, punahnya bahasa daerah juga menandakan punahnya pula nilai, norma, hingga adat istiadatnya. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya untuk melindungi bahasa dan sastra

daerah. Upaya pelindungan bahasa daerah ini dilakukan dengan beberapa Langkah, mulai dari pemetaan, kajian vitalitas, konservasi, revitalisasi, hingga registrasi bahasa.

LIMA PROGRAM UTAMA PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA



Metode penghitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Jumlah Keikutsertaan Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah



Jumlah Keikutsertaan Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah



Jumlah Keikutsertaan Penutur Muda dalam Festival Tunas Bahasa Ibu

Sampai dengan tahun 2021, jumlah penutur muda Bahasa daerah secara akumulatif terealisasi sebanyak 42,396, dari target 50,000 orang, atau dengan realisasi sebesar 84,79%. Ketidaktercapaian indikator selama dua tahun disebabkan oleh kondisi pandemi Covid-19. Kegiatan terkait penutur muda sulit dilaksanakan secara tatap muka. Pembatasan mobilitas dan pelaksanaan kegiatan menyebabkan wawancara langsung tidak mungkin untuk dilakukan. Wawancara dan penggalan data tidak dapat dilakukan secara daring. Hal ini disebabkan penutur jati bahasa daerah yang sebagian besar tidak memahami teknologi. Hal lain adalah keadaan masyarakat penutur bahasa daerah yang dipilih biasanya berada pada lokasi yang sulit dijangkau dan diakses, baik transportasi maupun jaringan internet.

Program/Kegiatan

Pilar utama dalam pemertahanan bahasa adalah besarnya jumlah penutur muda dalam suatu bahasa daerah. Semakin banyak jumlah penutur muda suatu bahasa, eksistensi bahasa itu akan terjaga. Jumlah penutur muda bahasa daerah adalah jumlah penutur bahasa daerah dari kalangan generasi muda berusia maksimal 19 tahun di suatu daerah persebaran bahasa daerah. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan jumlah penutur muda bahasa dan sastra adalah revitalisasi, baik berbasis komunitas/masyarakat maupun berbasis sekolah/klasikal. Kegiatan revitalisasi dilaksanakan terhadap bahasa dan sastra yang masuk dalam kategori kritis dan terancam punah. Kategori tersebut berdasarkan pada hasil kajian vitalitas bahasa dan sastra, baik yang dilakukan oleh Kemendikbudristek maupun pihak eksternal.



1

Revitalisasi Bahasa Daerah

Tahapan yang telah dilalui dalam revitalisasi ini, yaitu survei dan koordinasi dengan pemangku kepentingan, pembelajaran pada penutur muda, dan pelaksanaan pentas dan aksi hasil revitalisasi. Revitalisasi bahasa yang dilakukan di 10 bahasa daerah (Bahasa Batak Dialek Angkola, Tapsel, Sumut; Bahasa Dra, Papua; Bahasa Konjo, Sulsel; Bahasa Tolaki, Kolaka, Sultra; Bahasa Tolitoli, Sulteng; Bahasa Retta, NTT; Bahasa Skanto, Papua; Bahasa Gorap, Malut; Bahasa teon, Maluku; Bahasa Berangas, Kalsel) dan di 12 provinsi (Maluku, Jambi, Kalimantan Timur, Riau, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Banten, Papua, Sulawesi Utara, dan Gorontalo). Kegiatan revitalisasi bahasa dapat menyumbang capaian Jumlah Keikutsertaan Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah dengan jumlah capaian 1.928 orang.

2

Revitalisasi Sastra Daerah

Tahapan yang telah dilalui dalam revitalisasi ini, yaitu survei dan koordinasi dengan pemangku kepentingan, pembelajaran pada penutur muda, dan pelaksanaan pentas dan aksi hasil revitalisasi. Revitalisasi bahasa dilakukan di 6 bahasa daerah (Lebak, Banten; Karawang, Jawa Barat; Wonosobo, Jawa Tengah; Banyuwangi, Jawa Timur; Sikka, NTT; Konawe, Sulawesi Tenggara) dan di 28 provinsi (Maluku, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Maluku Utara, Jawa Barat, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Bengkulu, Sumatra Utara, Riau, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Banten, Papua, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, dan Gorontalo). Kegiatan revitalisasi sastra dapat menyumbang capaian Jumlah Keikutsertaan Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Puh dengan jumlah capaian 2.154 orang.

3

Revitalisasi Bahasa Berbasis Sekolah dan Festival Tunas Bahasa Ibu

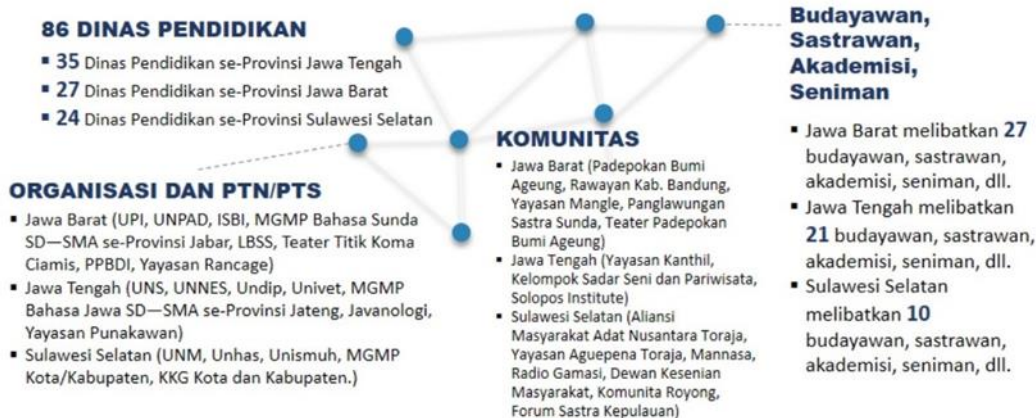
Untuk mencapai Jumlah Penutur Muda Bahasa Daerah, Kemdikbudristek juga melaksanakan kegiatan Revitalisasi Bahasa Berbasis Sekolah dan Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI). Revitalisasi Bahasa Berbasis Sekolah diharapkan mampu meningkatkan jumlah penutur muda secara masif dengan melibatkan berbagai mitra dalam melaksanakan revitalisasi. FTBI merupakan upaya memberikan wadah bagi generasi muda dalam melestarikan bahasa dan sastra agar minat mempelajari dan mengembangkan bahasa dan sastra daerah meningkat. Kegiatan itu juga diharapkan mampu melestarikan bahasa dan sastra daerah. Pada tahun 2021, Kegiatan Revitalisasi Bahasa Berbasis Sekolah dan Festival Tunas Bahasa Ibu belum dilakukan di seluruh provinsi, baru tiga provinsi yang melaksanakan FTBI, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu di tiga provinsi tersebut sebesar 12.663.

TAHAPAN KEGIATAN REVITALISASI BAHASA DAN SASTRA DAN FTBI



MITRA YANG BERPARTISIPASI

DALAM REVITALISASI BAHASA BERBASIS SEKOLAH DAN FESTIVAL TUNAS BAHASA IBU



Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, antara lain:

- 1 kegiatan turun lapangan dengan bertatap muka terpaksa tidak dapat dilakukan karena pembatasan kegiatan PPKM terjadi hampir di seluruh wilayah kerja satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- 2 dalam proses mengolah data diperlukan konsultasi dengan para ahli, tetapi terkendala dalam mengumpulkan tim teknis pengambil data secara lengkap;
- 3 terbatasnya informan yang menguasai dan tahu sastra lisan serta informan yang tidak mau melisankan dan merekam sastra lisan yang dianggap sakral;
- 4 akses menuju daerah pengambilan data sulit terjangkau, beberapa wilayah harus menyewa pesawat atau kapal cepat untuk mengambil data dan harus menunggu

cuaca baik;

- 5 masih kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap upaya perlindungan bahasa;
- 6 sulitnya ditemukan penutur sastra lisan yang dapat mengajarkan sastra kepada generasi muda; dan
- 7 metode pembelajaran sastra lisan yang kurang menarik terutama bagi generasi muda sehingga motivasi untuk belajar sangat kurang.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala, antara lain:

- 1 berkoordinasi dengan satgas Covid-19;
- 2 kegiatan dilakukan seideal mungkin sesuai dengan juknis, tetapi juga tetap menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, kegiatan dilakukan secara terbatas;
- 3 melakukan audiensi dengan pemerintah daerah sebelum pelaksanaan kegiatan;
- 4 berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, masyarakat, dan tokoh yang mau dan mampu melisankan dan merekam sastra lisan;
- 5 mengubah pelaksanaan kegiatan yang aksesnya terjangkau;
- 6 mendorong para pemangku kepentingan di daerah untuk mengambil kebijakan dalam upaya perlindungan bahasa di wilayahnya masing-masing;
- 7 melibatkan lembaga adat dalam upaya perlindungan bahasa; dan
- 8 mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan sastra dan tradisi lisan sebagai pembelajaran muatan lokal serta melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada generasi muda.

Strategi

Strategi ke depan yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

- 1 penjadwalan ulang kegiatan turun lapangan setelah pelonggaran PPKM dan

langsung turun lapangan dengan melakukan proses kesehatan yang ketat;

2 konsultasi dengan narasumber dilakukan secara hibrid, baik secara tatap muka maupun daring; dan

3 menyusun pedoman/acuan/model perlindungan bahasa dan menyosialisasikan kepada pemerintah daerah untuk dijadikan landasan pelaksanaan perlindungan bahasa di daerah; dan berbagi sumber daya.

IKSS 4.3 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebagai salah satu program prioritas nasional Kemendikbudristek, sekaligus juga menjadi indikator kinerja nasional bidang kebudayaan pada RPJMN tahun 2020-2024, yang melingkupi 7 (tujuh) dimensi.

2020	2021	Akhir Periode Renstra
Realisasi 55,91	Target 57,30	Target 62,70
Capaian 100,74%	Realisasi 54,65	Capaian 87,16%
	Capaian 95,38%	

Penghitungan IPK dilakukan bersama BPS melalui SUSENAS MSBP 2021, yang terdiri dari 12 indikator yang sudah tersedia di tahun 2020 dan 19 indikator yang datanya diproyeksikan. Pada tahun 2021, Kemendikbudristek juga menyusun Permendikbudristek tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum terkait IPK di masa mendatang.



Dimensi 1 : Ekonomi Budaya
1 Indikator



Dimensi 5 : Ekspresi Budaya
4 Indikator



Dimensi 2 : Pendidikan
6 Indikator



Dimensi 6 : Budaya Literasi
3 Indikator



Dimensi 3 : Ketahanan Sosial Budaya
8 Indikator



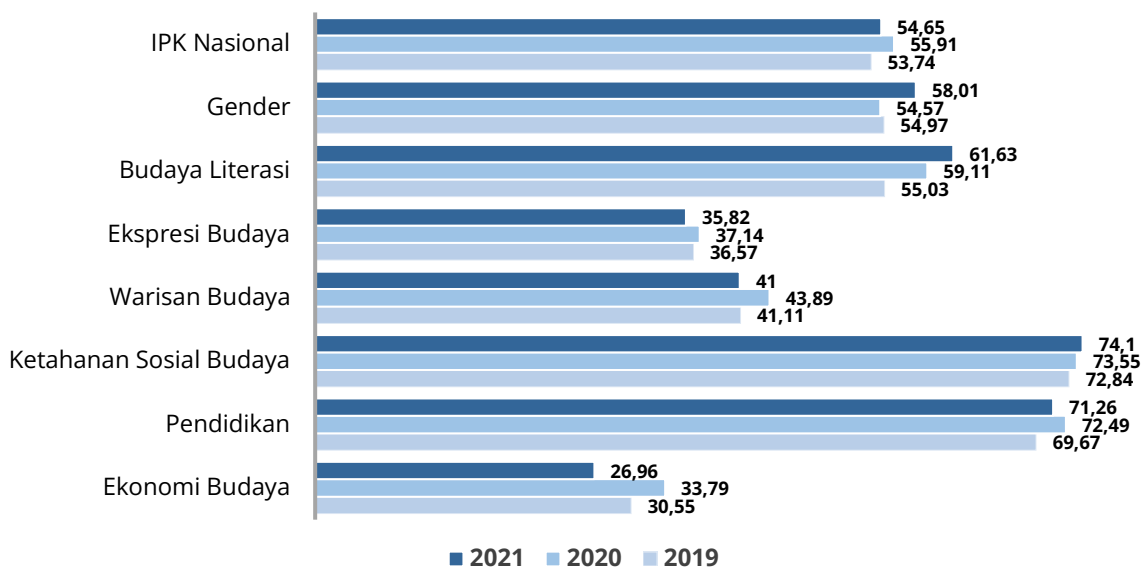
Dimensi 7 : Gender
3 Indikator



Dimensi 4 : Warisan Budaya
6 Indikator

Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor; oleh karena itu, keberadaan IPK diharapkan mampu memberikan arahan pada pembangunan kebudayaan dan sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan kebudayaan.

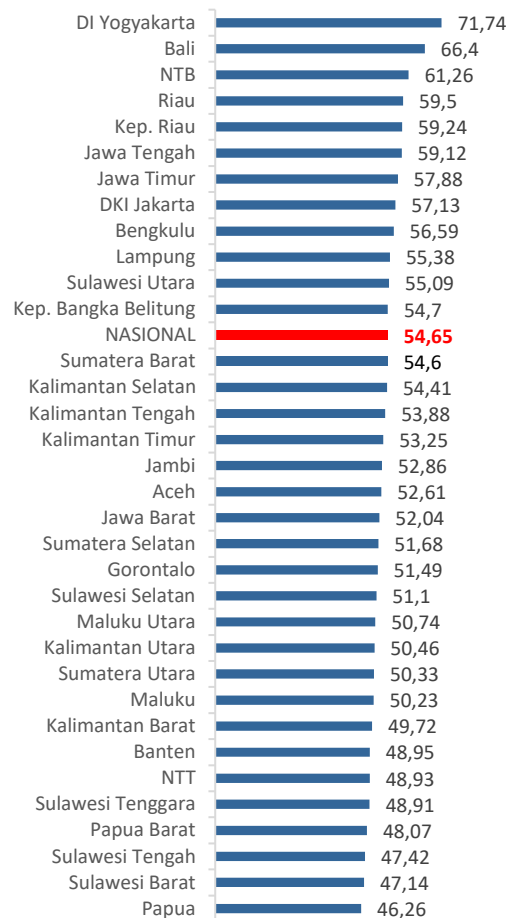
Perbandingan IPK per Dimensi



Meskipun di beberapa dimensi mengalami penurunan di tahun 2021, yang kemungkinan dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung, beberapa dimensi tetap mengalami peningkatan, bila dibandingkan dengan tahun 2020, antara lain dimensi Ketahanan Sosial Budaya, dimensi Budaya Literasi, dan dimensi Gender. Hal ini tentunya akan mendorong Kemendikbudristek untuk melakukan koordinasi bersama kementerian/ lembaga terkait serta pemangku kepentingan kebudayaan lainnya.

Capaian IPK tahun 2021 sebesar 54,65, angka ini lebih kecil dari yang ditargetkan yakni 57,3 atau relisasi capaian sebesar 95,38%. Ketidaktercapaian ini merupakan salah satu dampak dari terjadinya pandemi Covid-19 yang memengaruhi menurunnya beberapa nilai dimensi dan indikator IPK seperti dimensi ekonomi budaya, pendidikan, warisan budaya, dan ekspresi budaya yang menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Bila dibandingkan dengan IPK per provinsi, terdapat 22 provinsi di tahun 2021 yang IPK nya masih berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini tentunya akan menjadi perhatian bagi Kemendikbudristek bersama seluruh pemangku kepentingan kebudayaan untuk memastikan intervensi-intervensi yang dilakukan memprioritaskan provinsi yang masih berada di bawah rata-rata nasional tersebut. Sebagaimana terlihat pada grafik di atas, sentralisasi pembangunan kebudayaan masih terpusat di wilayah barat dan tengah Indonesia, sementara wilayah timur masih mengalami ketertinggalan dan membutuhkan akselerasi pembangunan kebudayaan yang berkesinambungan.



Untuk meningkatkan capaian IPK, beberapa program telah dilakukan, di antaranya melalui peningkatan jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda, jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan, jumlah Warisan Budaya yang dilindungi, jumlah satuan pendidikan yang memasukan pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, diperlukan terobosan-terobosan dalam pembangunan kebudayaan agar masyarakat tetap dapat merasakan dampak dari kemajuan budaya, antara lain melakukan terobosan untuk menampilkan konten kebudayaan secara virtual, transformasi aktivitas kebudayaan dalam bentuk daring/hibrida, serta bantuan untuk memfasilitasi aktivitas kebudayaan tersebut.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan cagar budaya dan warisan budaya takbenda, melaksanakan *Mega Events* Kebudayaan, festival keanekaragaman budaya daerah, serta mengoptimalkan akses terhadap distribusi film dan musik Indonesia;
- 2 meningkatkan jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan, jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan, jumlah satuan pendidikan yang memasukan pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan, serta jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya.
- 3 memfasilitasi peningkatan jumlah produksi film, musik dan media baru, pengembangan wilayah adat menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan, serta peningkatan jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang diberdayakan.
- 4 memfasilitasi Even Pekan Kebudayaan Daerah dan Pekan Kebudayaan Nasional, peningkatan pengelolaan fasilitasi bidang kebudayaan, peningkatan pengembangan Desa Pemajuan Kebudayaan dan pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan, serta peningkatan jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi.

A. Pekan Kebudayaan Daerah dan Pekan Kebudayaan Nasional

Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) adalah program penggalan pelestarian dan pengembangan potensi budaya daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelestarian dan pemajuan obyek kebudayaan. Pada tahun 2021 sebanyak 35 even PKD telah terlaksana baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pekan Kebudayaan Daerah dilaksanakan secara *hybrid* (luring dan daring) maupun *full* daring. Beberapa konten PKD dapat ditayangkan di Pekan Kebudayaan Nasional sebagai bentuk dukungan dan keterlibatan daerah dalam terselenggaranya Pekan

Kebudayaan Nasional Tahun 2021. Pada tahun 2021 Pekan Kebudayaan Nasional berlangsung dengan menghimpun berbagai rangkaian aksi budaya sejak Juli 2021 dan puncaknya pada tanggal 19 s.d. 26 November 2021 secara daring. PKN 2021 mengangkat isu tentang sandang pangan dan papan. Dari isu ini PKN 2021 mengusung tema “Cerlang Nusantara Pandu Masa Depan”. Inti dari tema ini adalah mengolah inspirasi cemerlang kearifan lokal untuk menjawab tantangan kekinian. Pekan Kebudayaan Nasional ini disiarkan secara langsung melalui laman pkn.id, kanal Indonesia.tv, dan saluran televisi nasional TVRI dengan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Sejumlah 72 Pemerintah Daerah terlibat dalam pelaksanaan PKN tahun 2021.

Pekan Kebudayaan Nasional 2021

SAKSIKAN PEMBUKAAN PKN 2021

Dibuka secara resmi oleh

Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia

Nadiem Anwar Makarim
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Pertunjukan “Napas Jiwa”

Atiiah Soeryadaya
Jay Subiyakto
Rama Soeprpto

Jumat, 19 November 2021
Pukul 19.00 - 20.00 WIB

#CERLANGNUSANTARA

Mempersembahkan
#CERLANG NUSANTARA

19 — 26 November 2021

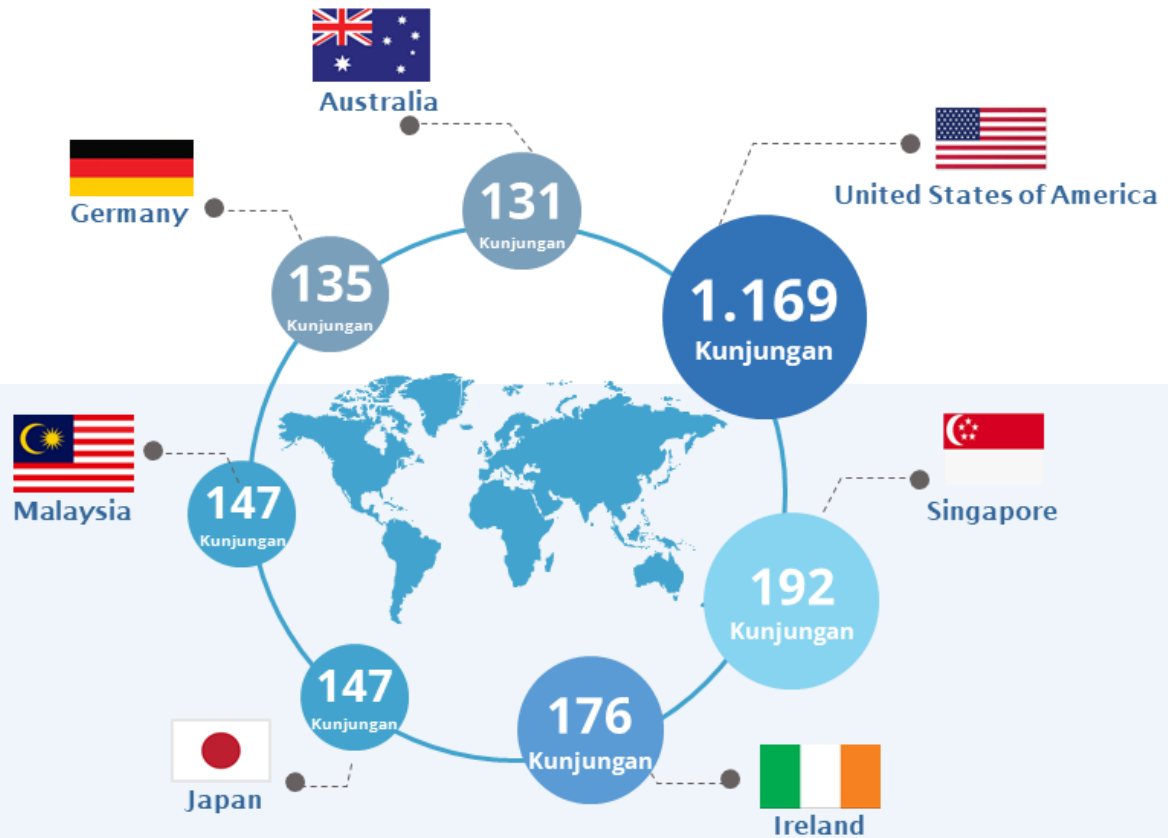
Ayo bergabung bersama seniman ternama nusantara di acara puncak PKN 2021!

Cari tahu infonya di

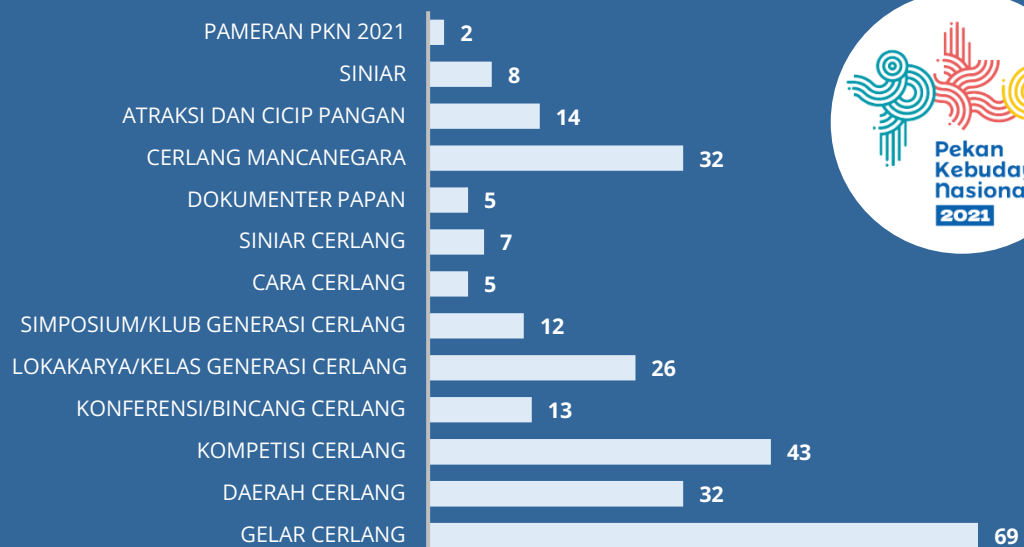
www.PKN.id
@pekankebudayaannasional

#generasicerlang

Negara yang mengunjungi laman PKN.id Selain Indonesia



Jumlah Konten PKN 2021 : 268 Konten
Jumlah Durasi Konten PKN 2021 : 219 Jam 37 Menit 22 Detik



B. Indonesiana.TV

Kanal Indonesiana.TV diluncurkan sebagai bagian dari Kebijakan Merdeka Belajar Episode ke-13, yakni “Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana”. Indonesiana.TV merupakan platform yang secara terintegrasi mewadahi, menyimpan, menyiarkan, dan mempromosikan konten ekspresi budaya masyarakat. Indonesiana.TV hadir sebagai rumah bersama bagi kerja kolaboratif bidang audio-visual. Kanal ini dapat diakses melalui laman indonesiana.tv, siaran televisi jaringan Indihome saluran 200 (SD) dan 916 (HD), serta Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan TikTok kanal Indonesiana TV. Percobaan siaran kanal Indonesiana.TV di IndiHome dimulai pada 17 Agustus 2021. Laman web indonesiana.tv memuat berbagai fitur yang mengacu kepada informasi-informasi tekstual termasuk Modul Panduan Menonton untuk Bahan Ajar dan Belajar yang sedang disusun, siaran streaming dan VoD (Video on Demand).



C. Jalur Rempah

Kegiatan Prioritas Nasional Jalur Rempah merupakan upaya dalam membangun ekosistem budaya rempah dari hulu hingga hilir dan membangun keterhubungan budaya. Kegiatan secara umum terdiri dari 3 kegiatan utama: nominasi, kampanye, dan karavan budaya. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan beberapa kegiatan terkait jalur rempah di antaranya Festival bumi rempah nusantara untuk dunia, Muhibah

budaya jalur rempah, Kompetisi jalur rempah, dan Penyebarluasan informasi di website dan media sosial. Salah satu upaya di tahun 2021 telah dilakukan adalah sinergitas antar kementerian dan lembaga. Beberapa di antaranya:

- a) Spice up The World (Kemenkomarves)
- b) Hari Rempah Nasional (Kementerian Pertanian)
- c) Pameran Kosmopolitan Islam Nusantara (UNUSIA)
- d) Pembentukan Tim Kosmopolis Rempah (UGM)
- e) Lomba Kuliner Warisan Maluku (20 Sekolah di Kota Ambon)
- f) Artikel Jalur Rempah pada Buletin WHC UNESCO

D. Fasilitasi Bidang Kebudayaan

Fasilitasi Bidang Kebudayaan adalah kegiatan pendukung berupa fasilitasi dana hibah yang diberikan kepada suatu kelompok kebudayaan atau perseorangan, tidak diperuntukan untuk pembangunan fisik dan non-komersial, serta dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait bidang kebudayaan (*stakeholder*) untuk mendorong upaya pemajuan kebudayaan secara langsung dan menyeluruh. Sesuai Visi Pemajuan Kebudayaan 20 tahun ke depan, yakni “Indonesia Bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan menyejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya”, strategi Pemajuan Kebudayaan dilandaskan kepada Trisakti, yakni asas berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Fasilitasi Bidang Kebudayaan menjadi salah satu upaya untuk menjalankan amanat tujuh agenda strategis kebudayaan, yang menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan nasional. Masyarakat adalah unsur yang paling utama untuk memajukan ekosistem kebudayaan di daerahnya masing-masing, hingga nantinya berujung ke pemajuan kebudayaan secara nasional.



E. Pelestarian dan Penetapan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda

Meningkatkan jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan, Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan, Jumlah Warisan Budaya yang dilindungi, Jumlah satuan pendidikan yang memasukan pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan. Penetapan Cagar Budaya Nasional akan



membawa implikasi terhadap kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah dalam melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Tujuan Penetapan Cagar Budaya Nasional adalah untuk melakukan pengaturan di tingkat Nasional terhadap pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya Nasional melalui kebijakan perlindungan cagar budaya. Dengan semakin banyaknya cagar budaya yang bisa dimanfaatkan atau dikunjungi oleh masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan jumlah masyarakat yang mengakses cagar budaya.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, antara lain:

- 1 perubahan skema PKN dari hibrida ke sepenuhnya daring yang berakibat perubahan keseluruhan konsep kegiatan;
- 2 konten PKD dari daerah yang dikirimkan masih belum merata dari sisi standar/format maupun kualitas;
- 3 pemberlakuan pembatasan PPKM selama terjadi lonjakan kasus Covid-19 menyebabkan proses verifikasi lapangan calon penerima Fasilitas Bidang Kebudayaan terhambat dan mundurnya jadwal pelaksanaan lokakarya serta pelaksanaan Fasilitas Bidang Kebudayaan;

- 4 data naskah rekomendasi Cagar Budaya yang kurang lengkap akibat sulitnya penelusuran sumber dan kajian lapangan karena pandemi Covid-19.
- 5 kesulitan untuk berkordinasi dengan Tim Ahli WBTb dan pemerintah daerah karena pandemi Covid-19, ini berakibat pada terbatasnya koordinasi dan sosialisasi dengan daerah terkait proses pengusulan penetapan WBTb.
- 6 himbauan terkait Satu Data Indonesia dan penggabungan pendataan kebudayaan melalui Sistem Dapobud menyebabkan perlunya upaya dan strategi dalam peningkatan kuantitas pendaftaran dan verifikasi cagar budaya dari yang sebelumnya; dan
- 7 hasil IPK 2020 belum merepresentatifkan kondisi sebenarnya yang ada di Indonesia karena belum memasukkan indikator variabel dampak dari Covid-19 dan kurangnya sumber data yang valid, kontinyu dan tersedia untuk seluruh provinsi sebagai pembanding dalam mengkoreksi indikator pada IPK yang diduga terdampak oleh Covid-19.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala, antara lain:

- 1 melakukan percepatan penyesuaian keseluruhan konsep PKN untuk sepenuhnya ditayangkan secara daring;
- 2 melakukan peningkatan kompetensi kepada pemerintah daerah agar dapat memproduksi konten PKD yang sesuai standar dan berkualitas;
- 3 melakukan verifikasi lapangan kepada calon penerima Fasilitas Bidang Kebudayaan dilakukan secara daring dan melaksanakan lokakarya kepada penerima Fasilitas Bidang Kebudayaan segera setelah pemberlakuan PPKM dilonggarkan;
- 4 melibatkan *stakeholder* (daerah) dalam Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional;

- 5 membangun komunikasi antara pusat dengan daerah untuk memperbaiki usulan dari catatan yang diberikan oleh Tim Ahli WBTb dan melakukan pertemuan koordinasi dan sosialisasi secara langsung untuk pelaksanaan yang lebih efektif;
- 6 menyiapkan formulir elektronik untuk kabupaten/kota agar proses penghimpunan data pendaftaran Cagar Budaya tetap berjalan; dan
- 7 melakukan identifikasi indikator IPK yang terdampak pandemi Covid-19 dan melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai indikator diluar IPK sebagai pembandingan dalam menghitung dampak dari pandemi Covid-19 sehingga hasil IPK 2020 lebih merepresentatifkan potret sesungguhnya selama pandemi.

Strategi

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

- 1 melaksanakan kegiatan secara daring, luring, maupun *hybrid*;
- 2 menyusun ulang jadwal pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan kondisi pandemi di pusat dan daerah;
- 3 melakukan pemantauan secara lebih efektif agar segera mendapatkan solusi atas masalah selama pelaksanaan kegiatan;
- 4 melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan budaya, optimalisasi publikasi, dan memperluas keterlibatan masyarakat; dan
- 5 memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaku budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan.

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel

No	SS/IKSS	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel				
1	Opini Laporan Keuangan Kemendikbud	WTP	WTP*)	100%
2	Indeks Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	73	96,41	132,07%
3	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbud	82	84,60	103,17%
4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	81	77,95*)	96,23%

*) Realisasi tahun 2020

Peningkatan tata kelola merupakan salah satu prioritas pemerintah pada RPJMN tahun 2020-2024 untuk mentransformasi pelayanan publik, yang antara lain tercermin dari membaiknya tingkat implementasi reformasi birokrasi, perampingan struktur organisasi, serta peningkatan kualitas layanan publik. Kemendikbudristek telah melakukan berbagai strategi dan inovasi untuk perbaikan pelayanan publik, antara lain melalui penyederhanaan struktur organisasi dengan melakukan peralihan pejabat struktural III dan IV menjadi pejabat fungsional, perubahan mekanisme pendanaan pendidikan agar lebih pendek dan lebih tepat sasaran, serta penyederhanaan 9 (sembilan) program Kemendikbudristek menjadi 6 (enam) program. Selain itu, kebijakan Merdeka Belajar yang diusung oleh Kemendikbudristek pada tahun 2020-2024 juga ditujukan untuk memperbaiki tata kelola pendidikan yang sebelumnya sangat kompleks menjadi lebih sederhana, misalnya pemanfaatan asesmen nasional pendidikan untuk memperbaiki kualitas satuan pendidikan, penyederhanaan birokrasi dalam sistem akreditasi satuan pendidikan, penyederhanaan kurikulum berbasis kebutuhan peserta didik, dan perbaikan tata kelola pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Peningkatan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel didukung oleh 4 IKSS, dengan capaian sebagai berikut:

IKSS 5.1 Opini Laporan Keuangan Kemendikbud

2020	2021	Akhir Periode Renstra
Realisasi WTP	Target WTP	Target WTP
Capaian 100%	Realisasi WTP	Capaian 100%
	Capaian 100%	

Opini Laporan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Kemendikbud. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004, BPK RI dapat memberikan 4 jenis opini:

- 1 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- 2 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
- 3 Tidak Wajar (TW)
- 4 Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

Capaian kinerja ini dihitung berdasarkan opini yang diberikan oleh BPK, kriteria yang digunakan oleh BPK dalam mengeluarkan opini adalah:



Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan predikat/opini yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Instansi Pemerintah baik di

8 (delapan) x

2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020

WTP

Pusat maupun di Daerah. Predikat tersebut diperoleh apabila laporan keuangan secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selama 8 tahun berturut-turut, Kemendikbudristek berhasil mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya dari BPK. Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek untuk tahun 2021 belum diketahui tingkat capaiannya, karena masih menunggu laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dari BPK. Pengumuman laporan hasil

pemeriksaan atas laporan keuangan biasanya dilakukan pada setiap bulan Mei berikutnya.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 melakukan analisa laporan keuangan satuan kerja melalui aplikasi e Rekon LK;
- 2 pemantauan berkala realisasi anggaran satuan kerja melalui aplikasi MoLK Kemendikbudristek;
- 3 penyusunan POS Penyusunan Laporan Keuangan;
- 4 rekonsiliasi tindak lanjut temuan dengan BPK RI dan Satker;
- 5 penyusunan POS Pedoman PNBP di Lingkungan Kemendikbudristek; dan
- 6 pelaksanaan kegiatan pengendalian internal atas laporan keuangan bagi Satker di lingkungan Kemendikbudristek

Hambatan

Hambatan yang dialami dalam pencapaian target kinerja, yaitu:

- 1 masih terdapat Satker yang belum mengungkapkan secara memadai pada CaLK;
- 2 penataan aset yang masih belum optimal;
- 3 masih terdapat Satker yang belum menginstal MoLK Kemendikbudristek, khususnya Satker baru; dan
- 4 pengelolaan PNBP belum sesuai dengan ketentuan.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

- 1 melakukan pembinaan terhadap Satker melalui Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi berbasis Aktual, Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Instansi, maupun Bimbingan Teknis terkait dengan PNBPNP;
- 2 melakukan asistensi penyusunan Laporan Keuangan pada Satker di lingkungan Kemendikbudristek untuk memantau perkembangan penyusunan Laporan Keuangan pada tingkat Satker dan menginventarisasi permasalahan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan;
- 3 menyusun pedoman-pedoman yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan yaitu pedoman penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan SAP, pedoman pengelolaan hibah langsung di lingkungan Kemendikbudristek, dan pedoman pengelolaan PNBPNP di lingkungan Kemendikbudristek;
- 4 rekonsiliasi temuan dengan BPK-RI;
- 5 rakor tindak lanjut temuan dengan BPK-RI dan Satker;
- 6 penguatan sistem pengendalian internal;
- 7 pengendalian internal pelaporan keuangan;
- 8 pembinaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kemendikbudristek; dan
- 9 melaksanakan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada jenjang Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1) dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B).

Strategi

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, antara lain:

- 1 melaksanakan anggaran secara akuntabel dan didukung dengan standar dan sistem akuntansi yang berlaku;
- 2 mengoptimalkan pelaksanaan PIPK pada jenjang UAPPA Eselon I;

- 3 melakukan telaah dan pemantauan e rekon LK;
- 4 melakukan pembinaan dan bimbingan penyusunan laporan keuangan kepada satuan kerja;
- 5 pembinaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kemendikbudristek;
- 6 mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan anggaran, serta penatausahaan dan pengamanan aset (aset lancar, dan aset tetap);
- 7 memastikan bahwa seluruh hasil temuan pemeriksaan BPK RI telah ditindaklanjuti; dan
- 8 memastikan laporan keuangan selesai tepat waktu.

IKSS 5.2 Indeks Efektifitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, dengan tujuan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas

2020	2021	Akhir Periode Renstra
Realisasi 90,70	Target 73	Target 77,50
Capaian 126,85%	Realisasi 96,41	Capaian 124,40%
	Capaian 132,07%	

nasional dan menjadi urusan daerah. Dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, DAK terbagi atas dua jenis: Fisik dan Nonfisik. DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sementara DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai:

- 1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- 2 Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 3 Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
- 4 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD;

5 Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus;

6 BOP Kesetaraan;

7 BOP Museum dan Taman Budaya.

Indeks ini untuk mengukur tingkat keefektifan pemerintah daerah dalam mengelola DAK Fisik dan Nonfisik bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan 3 dimensi, yakni:



Indeks efektivitas pengelolaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan, memperhitungkan persentase dari tiap dimensi (persentase efektivitas pengusulan, persentase efektivitas pemanfaatan anggaran, dan persentase efektivitas pelaporan). Metode penghitungan Indeks Efektivitas pengelolaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan, adalah:

$$\frac{A + B + C}{3}$$

A = Persentase efektivitas pengusulan berdasarkan persentase usulan

B = Persentase efektivitas pemanfaatan anggaran

C = Persentase efektivitas pelaporan

Pada tahun 2021 target kinerja dari indeks efektivitas pengelolaan dana alokasi khusus bidang pendidikan dan kebudayaan adalah 73 dan telah terealisasi sebesar 96,41 dengan persentase capaian sebesar 132,07%. Ketercapaian melebihi target ini dimungkinkan karena tingginya tingkat efektivitas pengusulan, pemanfaatan anggaran dan efektivitas pelaporan yang melampaui target yang dicanangkan.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 menyusun *Immediate Outcome* pada Juk Ops DAK Fisik TA 2022;
- 2 melakukan Sinkronisasi dan Koordinasi Usulan DAK Fisik Bidang Pendidikan TA 2022;
- 3 melakukan Sinkronisasi dan Koordinasi Usulan DAK Fisik Bidang Pendidikan TA 2022 bersama pemerintah daerah, yang dilaksanakan dalam empat gelombang;
- 4 mengidentifikasi Kebutuhan Data Informasi dan Menyusun Mekanisme Monitoring dan Evaluasi DAK untuk Pendidikan;
- 5 menyusun Petunjuk Operasional DAK Fisik TA 2022; dan
- 6 melakukan Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data Terkait Sarana dan Prasarana.

Hambatan

Hambatan/permasalahan yang dialami dalam pencapaian target kinerja, yaitu:

- 1 Pada tahap Pengusulan: kendala yang dihadapi saat pengusulan DAK Fisik adalah belum sesuai dengan proses usulan daerah dengan konsep ketuntasan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat (Kemendikbudristek dan Bappenas); dan
- 2 Pada tahap Pemanfaatan: tidak ada kendala dalam penyaluran dan pemanfaatan DAK Non Fisik, namun dalam DAK Fisik, terdapat kendala/permasalahan yaitu terbatasnya tim UKPBJ di pemerintah daerah, sehingga menghambat proses kontraktual dan penyaluran anggaran.

Langkah Antisipasi dan Strategi

Langkah antisipasi dan strategi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut, antara lain:

- 1 melakukan kegiatan sinkronisasi dan koordinasi secara daring;

- 2 membuat mekanisme penilaian dengan *expert judgment*;
- 3 mengoptimalkan usulan pemerintah daerah yang ada sesuai dengan pagu yang tersedia berdasarkan konsep ketuntasan;
- 4 mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat proses pelaksanaan DAK Fisik, sehingga penyaluran tahap selanjutnya dapat berlangsung;
- 5 memperpanjang pencairan DAK Fisik Pendidikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran;
- 6 bersama dengan Biro Umum dan PBJ melakukan sosialisasi percepatan proses pengadaan TIK; dan
- 7 menghimbau Direktorat teknis melakukan fasilitasi percepatan penyerapan DAK Fisik dalam bentuk rapat koordinasi percepatan DAK Fisik Pendidikan.

IKSS 5.3 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbud

2020	2021	Akhir Periode Renstra
Realisasi 82,30	Target 82	Target 84
Capaian 101,60%	Realisasi 84,60	Capaian 100,71%
	Capaian 103,17%	

Indikasi keberhasilan program dan kebijakan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, salah satunya adalah melalui kepuasan pemangku kepentingan berupa skor Indeks *Stakeholder Satisfaction*. Sejalan dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

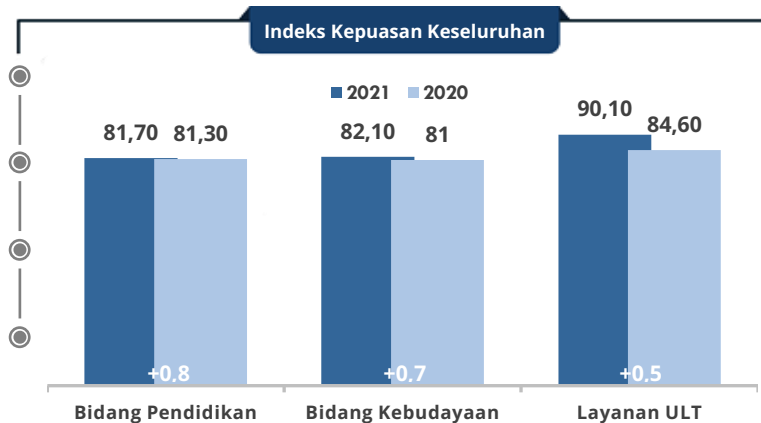
Negara Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Indeks kepuasan pemangku kepentingan merupakan rata-rata dari nilai indeks kepuasan pemangku kepentingan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, dan layanan Unit Layanan Terpadu.

Metode penghitungan indeks kepuasan pemangku kepentingan, adalah:

$$\frac{A + B + C}{3}$$

A = Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Bidang Pendidikan
 B = Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Bidang Kebudayaan
 C = Indeks Kepuasan Layanan ULT

Capaian tahun 2021 indikator kinerja ini adalah sebesar 84,60, lebih tinggi dari yang ditargetkan yakni 82, atau realisasi capaian sebesar 103,17%. Peningkatan indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud



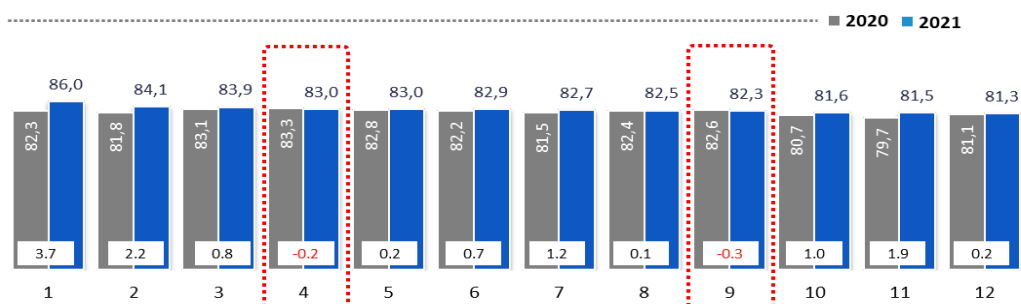
terjadi di seluruh bidang baik bidang pendidikan, kebudayaan, maupun layanan Unit Layanan Terpadu. Bila dibandingkan capaian dengan tahun 2020 sebesar 82,30, Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbudristek tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,3. Kenaikan indeks terutama didorong oleh kenaikan indeks pada layanan Unit Layanan Terpadu dari 84,60 menjadi 90,10 (naik 5,5). Hal ini menunjukkan bahwa layanan Unit Layanan Terpadu yang diselenggarakan secara *online* oleh Kemendikbudristek tidak kalah dibandingkan layanan secara *offline* atau tatap muka langsung. Indeks kepuasan bidang pendidikan mengalami kenaikan dari 81,30 menjadi 81,70 (naik 0,4). Indeks kepuasan bidang kebudayaan juga mengalami kenaikan dari 81 menjadi 82,10 (naik 1,1).

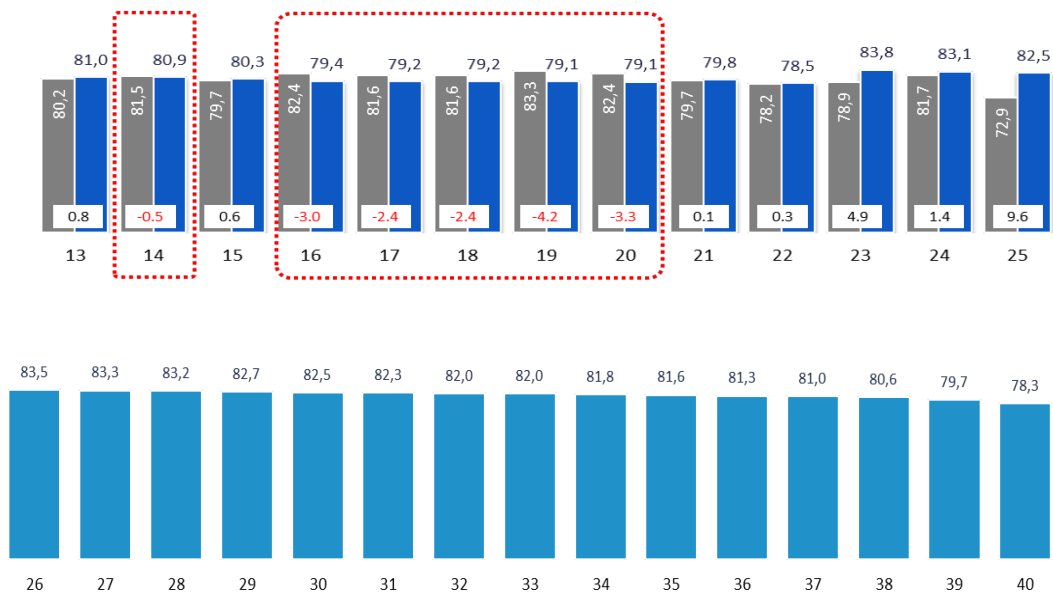
A. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Bidang Pendidikan

parameter indeks kepuasan pemangku kepentingan bidang pendidikan, sebagai berikut:

- 1 Registrasi Pendidik PT/Dosen
- 2 Pangkalan Data Dikti Penilaian Angka Kredit
- 3 Pendidik/Jabatan Akademik Dosen
- 4 Sertifikasi Tenaga Pendidik
- 5 BOS/BOP

- 6 Dapodik
- 7 Pembukaan Prodi Pada PT Swasta
- 8 Program Indonesia Pintar (PIP)
- 9 Pendidikan Kecakapan Kerja
- 10 Pendidikan Kecakapan Wirausaha
- 11 Kampus Merdeka
- 12 PPDB, SNMPTN dan SBMPTN
- 13 Anggaran Pendidikan (DAK Pendidikan)
- 14 Buku Teks Pelajaran
- 15 Sarana Prasarana
- 16 Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik
- 17 Pengembangan Karir dan Kepangkatan Guru
- 18 Kurikulum
- 19 Beasiswa Unggulan
- 20 Pendidikan Vokasi
- 21 UKBI
- 22 BIPA
- 23 Penyuluhan Bahasa Indonesia
- 24 KBBI Daring
- 25 Layanan Kepada Dinas Pendidikan
- 26 Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi
- 27 Layanan Kompetisi
- 28 Laman Guru Belajar dan Berbagi
- 29 Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
- 30 Profil Pelajar Pancasila
- 31 Aneka Tunjangan Non PNS
- 32 Akreditasi Satuan Pendidikan
- 33 KIP Kuliah
- 34 Aplikasi Siplah
- 35 Pembelajaran Interaktif SPADA
- 36 Asesmen Nasional
- 37 Laman Cerdas Berkarakter
- 38 Bantuan Kuota Internet
- 39 Afiriasi Pendidikan Menengah
- 40 Laman Kursus Daring





Sebagian besar parameter indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek bidang pendidikan mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Terdapat beberapa parameter baru yang menjadi ukuran penilaian kepuasan stakeholder bidang pendidikan di tahun ini karena masuknya jenjang perguruan tinggi yaitu, Beasiswa Unggulan, Pangkalan Data Dikti, Pembukaan Prodi pada PT Swasta, Registrasi Dosen, Penilaian Angka Kredit Dosen, dan Kampus Merdeka. Berdasarkan kategori pemangku kepentingan, peningkatan indeks kepuasan bidang pendidikan terjadi pada semua kategori pemangku kepentingan, kecuali kategori orang tua, mengalami penurunan, utamanya pada parameter kurikulum, buku teks pelajaran. Indeks kepuasan peserta didik sebesar 81,90 naik 0,3 dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks kepuasan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 81,70 naik 0,3 dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun di beberapa parameter mengalami penurunan seperti pada parameter peningkatan dan pengembangan kapasitas pendidik/dosen, pengembangan karier dan kepangkatan guru/dosen. Indeks kepuasan manajemen satuan pendidikan sebesar 83,50 naik 1,4 dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan indeks kepuasan orang tua sebesar 79,80 turun 0,3 dibandingkan tahun sebelumnya.

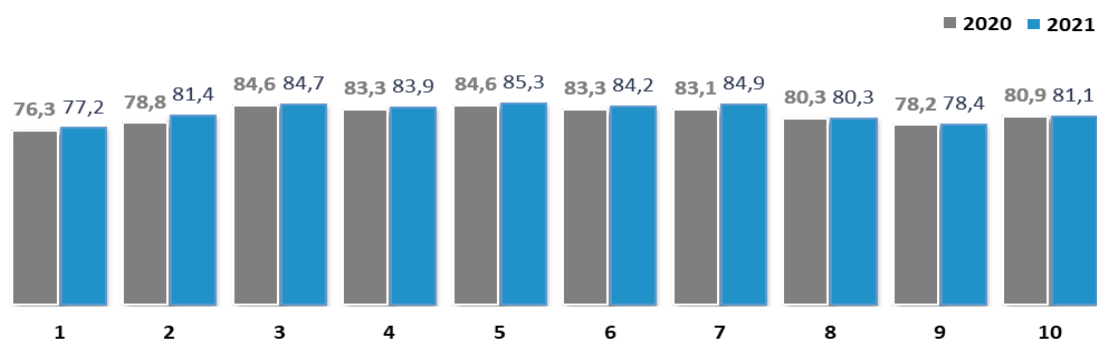
Secara umum, terdapat delapan parameter yang indeks kepuasannya mengalami penurunan, yaitu: sertifikasi tenaga pendidik/dosen, pendidikan kecakapan kerja, buku teks pelajaran, peningkatan dan pengembangan kapasitas pendidik/dosen,

pengembangan karier dan kepangkatan guru/dosen, kurikulum, beasiswa unggulan, dan pendidikan vokasi. Parameter yang turun tersebut Sebagian besar berasal dari jenjang perguruan tinggi.

B. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Bidang Kebudayaan

Parameter indeks kepuasan pemangku kepentingan bidang kebudayaan, sebagai berikut:

- | | |
|--|--|
| 1 Penetapan Cagar Budaya Nasional dan Warisan Budaya Takbenda | 6 Sertifikasi Tenaga Kebudayaan |
| 2 Fasilitasi Bidang Kebudayaan | 7 Gerakan Seniman Masuk Sekolah |
| 3 Fasilitasi Kegiatan Anggoro Kasih | 8 Layanan Museum Virtual |
| 4 Layanan Perijinan Perfilman | 9 Pokok Pikiran Kebudayaan |
| 5 Layanan Bimtek Tenaga kebudayaan | 10 Layanan ke Dinas Kebudayaan |



Peningkatan indeks kepuasan bidang kebudayaan didorong oleh peningkatan dari seluruh parameter indeks kepuasan bidang kebudayaan. Peningkatan paling tinggi ada pada parameter fasilitasi bidang kebudayaan yang naik 2,6 dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks kepuasannya menjadi sebesar 81,4. Parameter bidang kebudayaan yang memiliki indeks kepuasan paling rendah ada pada penetapan cagar budaya Nasional dan warisan budaya takbenda. Indeksnya sebesar 77,2. Atribut penilaian yang masih dinilai rendah pada parameter warisan cagar budaya Nasional dan warisan budaya takbenda adalah penanganan pengaduan dan kecepatan jangka waktu penilaian/pengkajian,

C. Indeks Kepuasan Layanan Unit Layanan Terpadu

Parameter indeks kepuasan layanan Unit Layanan Terpadu, sebagai berikut:

Persyaratan

Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan

Waktu Pelayanan

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan

Biaya/Tarif

Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

Kompetensi Pelaksana

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman

Perilaku Pelaksana

Sikap petugas dalam memberikan pelayanan

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

Sarana dan Prasarana

Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud serta tujuan dan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek)

Peningkatan indeks kepuasan layanan Unit Layanan Terpadu juga didorong oleh peningkatan seluruh parameter indeks kepuasan layanan Unit Layanan Terpadu yang mengacu pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Peningkatan paling tinggi ada pada parameter waktu, perilaku petugas, dan penanganan pengaduan. Survei layanan Unit Layanan Terpadu tahun ini hanya kepada layanan Unit Layanan Terpadu Kemendikbudristek yang diselenggarakan secara daring melalui zoom. Indeks kepuasan

pemangku kepentingan terhadap pelayanan Unit Layanan Terpadu diukur melalui survei kepuasan pemangku kepentingan (Stakeholder Satisfaction Survey - SSS), bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Unit Layanan Terpadu. Survei ini dilaksanakan oleh pihak eksternal untuk menjamin independensi hasil survei.



Seluruh parameter layanan Unit Layanan Terpadu perlu dipertahankan karena sudah memberikan kepuasan kepada pengunjung; namun demikian, layanan Unit Layanan Terpadu tetap harus terus ditingkatkan untuk mengantisipasi harapan dan ekspektasi pengunjung yang terus berkembang. Selain itu juga perlu beradaptasi dengan layanan secara daring.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 melakukan publikasi pada media baik melalui media sosial, portal kemdikbudristek, media cetak, media daring, dan media elektronik;
- 2 fasilitasi hubungan antarlembaga baik dengan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, dan media;
- 3 pelaksanaan permohonan informasi, konsultasi, dan pengaduan dilaksanakan melalui Portal ULT, SP4N LAPOR dan Layanan Tatap Muka Daring via Zoom. Jumlah permohonan informasi, konsultasi, dan pengaduan yaitu sejumlah 201.077 pengguna layanan dan dilayani melalui SP4N LAPOR sebanyak 3.934, Daring via Zoom sebanyak 6.685, live chat sebanyak 55.642, email sebanyak 73.631, dan call center sebanyak 61.185 pengguna layanan; dan
- 4 peningkatan kompetensi pelaksana pelayanan, kemampuan respon, dan peningkatan budaya pelayanan publik.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

- 1 perlunya peningkatan koordinasi dengan Unit Utama terkait dengan program yang akan dipublikasikan;
- 2 pandemi Covid-19 menyebabkan tidak semua pertemuan dan layanan terpadu dapat dilakukan secara tatap muka; dan
- 3 terbatasnya kompetensi pelaksana pelayanan dalam menangani semua permohonan informasi, konsultasi, dan pengaduan publik, serta terbatasnya informasi terkait beberapa layanan Kemendikbudristek seperti Beasiswa Unggulan dan UKBI.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

- 1 meningkatkan koordinasi melalui rapat tatap muka, daring dan komunikasi dua arah dengan unit utama di Kemendikbudristek terkait dengan program yang dipublikasikan;
- 2 mengoptimalkan layanan secara tidak langsung di antaranya melalui di Portal ULT, SP4N LAPOR dan Layanan Tatap Muka Daring via Zoom;
- 3 pembekalan terhadap petugas layanan terpadu untuk meningkatkan kompetensi petugas layanan; dan
- 4 melakukan publikasi secara berkesinambungan terkait kebijakan yang ada di Kemendikbudristek melalui *platform* media sosial yang ada.

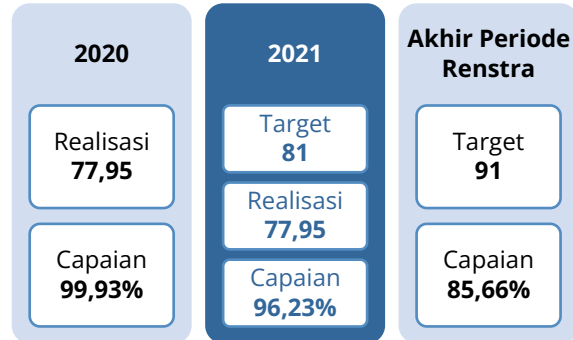
Strategi

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

- 1 meningkatkan koordinasi melalui rapat tatap muka, daring dan komunikasi dua arah dengan unit utama di Kemendikbudristek;
- 2 mengubah kegiatan yang biasanya dilakukan secara tatap muka menjadi daring;
- 3 mengoptimalkan layanan secara tidak langsung di antaranya melalui di Portal ULT, SP4N LAPOR dan Layanan Tatap Muka Daring via Zoom;
- 4 memberikan pembekalan kepada petugas di Unit Layanan Terpadu untuk memperbarui pengetahuan petugas terhadap layanan yang ada pada Kementerian, meningkatkan responsifitas dan budaya pelayanan publik;
- 5 melakukan secara berkala Survei Kepuasan Masyarakat untuk layanan terpadu Kemendikbudristek secara internal; dan
- 6 membuat strategi publikasi untuk menyesuaikan dengan target penerima informasi kebijakan Kemendikbudristek.

IKSS 5.4 Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud

Indeks Reformasi Birokrasi adalah penyimpulan atas hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-



komponen digunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi. Penilaian terkait Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh KemenPANRB berdasarkan sidang pleno antara Ombusman, KPK dan KemenPANRB. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan tingkat implementasi reformasi birokrasi terkait 8 (delapan) area perubahan dalam reformasi birokrasi, yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan, penataan organisasi/kelembagaan, penataan tatalaksana, sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, pengawasan, serta pelayanan publik.

Metode penghitungan indikator kinerja tersebut, adalah sebagai berikut:

Dasar Hukum	Pengungkit	60%	Sub Komponen
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	a. Aspek Pemenuhan	20%	<ul style="list-style-type: none"> a. Manajemen Perubahan (2%); b. Deregulasi Kebijakan (2%); c. Penataan Organisasi (3%); d. Penataan Tata Laksana (2,5%); e. Penataan Manajemen SDM (3%); f. Penguatan Akuntabilitas (2,5%); g. Penguatan Pengawasan (2,5%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%).
	b. Aspek Hasil Antara	10%	<ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas Pengelolaan Arsip (1%); b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%); c. Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%); d. Kualitas Pengelolaan Aset (1%); e. Merit System (1%); f. ASN Profesional (1%); g. Kualitas Perencanaan (1%); h. Maturitas SPIP (1%); i. Kapabilitas APIP (1%);

Dasar Hukum	Pengungkit	60%	Sub Komponen
			j. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%)
	c. Aspek Reform	30%	a. Manajemen Perubahan (3%); b. Deregulasi Kebijakan (3%); c. Penataan Organisasi (4,5%); d. Penataan Tata Laksana (3,75%); e. Penataan Manajemen SDM (4,5%); f. Penguatan Akuntabilitas (3,75%); g. Penguatan Pengawasan (3,75%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%)
	Hasil	40%	
	a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10%	a. Opini BPK (3%); b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%)
	b. Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%)
	c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)
	d. Kinerja Organisasi	10%	a. Capaian Kinerja (5%) b. Kinerja Lainnya (2%) c. Survei Internal Organisasi (3%)

Pada tahun 2021 target kinerja dari Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud adalah 81, dan realisasinya masih menunggu dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kemen PAN dan RB. Hasil capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud masih menggunakan hasil capaian tahun 2020, sehingga realisasi capaian sebesar 96,23%.

Selain itu, tingkat capaian reformasi birokrasi juga didukung oleh semakin banyaknya unit kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI/WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sampai dengan tahun 2021, ada 47 Satker di Kemendikbudristek dengan predikat ZI-WBK, sebagai berikut:

No	Satker	Tahun Perolehan	Predikat
1	LPMP Jawa Tengah	2017	ZI-WBK
		2020	ZI-WBBM
2	P4TK BOE Malang	2017	ZI-WBK
		2020	ZI-WBBM

No	Satker	Tahun Perolehan	Predikat
3	BPPAUD dan Dikmas Jawa Timur	2017	ZI-WBK
4	P4TK Bidang Mesin dan Teknik Industri	2018	ZI-WBK
5	LPMP Jawa Timur	2018	ZI-WBK
6	PPPAUD dan Dikmas Jawa Barat	2019	ZI-WBK
7	PPPAUD dan Dikmas Jawa Tengah	2019	ZI-WBK
8	LPMP Bali	2019	ZI-WBK
9	LPMP DKI Jakarta	2019	ZI-WBK
10	LPMP Kalimantan Barat	2019	ZI-WBK
11	LPMP Lampung	2019	ZI-WBK
12	LPMP Riau	2019	ZI-WBK
13	P4TK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling	2019	ZI-WBK
14	Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran	2019	ZI-WBK
15	Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang	2019	ZI-WBK
16	Museum Basoeki Abdullah	2020	ZI-WBK
17	Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta	2020	ZI-WBK
18	Politeknik Negeri Bandung	2020	ZI-WBK
19	P4TK Bidang Bangunan dan Listrik	2020	ZI-WBK
20	P4TK Bidang Bisnis dan Pariwisata	2020	ZI-WBK
21	P4TK Bidang IPA	2020	ZI-WBK
22	P4TK Bidang Matematika	2020	ZI-WBK
23	P4TK Bidang Pertanian	2020	ZI-WBK
24	P4TK Bidang Seni dan Budaya	2020	ZI-WBK
25	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	2020	ZI-WBK
26	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	2020	ZI-WBK
27	BPNB Bali	2020	ZI-WBK
28	LPMP D.I. Yogyakarta	2020	ZI-WBK
29	LPMP Jawa Barat	2020	ZI-WBK
30	LPMP Nusa Tenggara Barat	2020	ZI-WBK
31	Biro Sumber Daya Manusia	2021	ZI-WBK
32	Direktorat SMA	2021	ZI-WBK
33	LPMP Provinsi Jambi	2021	ZI-WBK
34	LPMP Banten	2021	ZI-WBK
35	BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan	2021	ZI-WBK
36	BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Selatan	2021	ZI-WBK
37	Fakultas Teknik - Universitas Diponegoro	2021	ZI-WBK
38	Fakultas Teknik - Universitas Gadjah Mada	2021	ZI-WBK
39	Fakultas Teknologi Pertanian - Universitas Brawijaya	2021	ZI-WBK
40	Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Padjadjaran	2021	ZI-WBK
41	Fakultas Kesehatan Masyarakat - Universitas Indonesia	2021	ZI-WBK
42	Politeknik Manufaktur Bandung	2021	ZI-WBK

No	Satker	Tahun Perolehan	Predikat
43	Politeknik Negeri Batam	2021	ZI-WBK
44	Galeri Nasional Indonesia	2021	ZI-WBK
45	BPNB D.I. Yogyakarta	2021	ZI-WBK
46	Balai Arkeologi Daerah Istimewa Yogyakarta	2021	ZI-WBK
47	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI	2021	ZI-WBK

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 fasilitasi Survei Kapasitas Organisasi yang dilaksanakan oleh KPK dengan lokus sebanyak 167 satker di lingkungan Kemendikbudristek secara acak;
- 2 melaksanakan evaluasi RB pusat dan unit utama;
- 3 melaksanakan monev agen perubahan dan *quick wins* di lingkungan Kemendikbudristek;
- 4 menindaklanjuti catatan hasil evaluasi RB dan menyampaikan ke KemenPANRB;
- 5 fasilitasi Survei Eksternal RBI Indeks Persepsi Pelayanan Publik ke 3 Satker (Kantor Bahasa NTB, Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, LLDikti XI);
- 6 penyusunan Pedoman Pendampingan Pembangunan ZI WBK/WBBM oleh Satker Peraih Predikat ZI WBK/WBBM dan Pedoman Pengisian LKE PMPZI;
- 7 fasilitasi pembangunan ZI WBK/WBBM, pembentukan Tim ZI, pengusulan Satker Calon ZI WBK/WBBM ke Tim Penilai Internal;
- 8 memberikan pendampingan kepada 93 satker yang diusulkan memperoleh ZI/WBK/WBBM terkait pencegahan korupsi, sosialisasi dan pelaksanaan survei eksternal dan pembuatan akun dan penginputan data dalam aplikasi SHPRBZI Menpan.
- 9 melaksanakan koordinasi teknis bersama 93 Satker yang diusulkan memperoleh ZI/WBK/WBBM, fasilitasi pengisian, verifikasi dan *submit* LKE PMPZI ke aplikasi pmpzi.menpan.go.id, pengisian Survey Eksternal Pembangunan ZI WBK/WBBM, dan evaluasi Pembangunan ZI WBK/WBBM oleh TPN;

- 10 kurang informasi yang diterima oleh Satker terkait ketidاكلulusan dalam usulan menjadi ZI WBK/WBBM; dan
- 11 beberapa satker yang diusulkan ZI tahun ini jumlah respondennya belum memenuhi angka minimal yang diharapkan dari KemenPANRB yaitu berjumlah 100 responden.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala, antara lain:

- 1 melakukan sosialisasi metode penilaian RBI secara komprehensif kepada seluruh Satker di Kemendikbudristek dan penyusunan *quick wins* terkait 8 (delapan) area perubahan;
- 2 melakukan koordinasi berkesinambungan dengan seluruh Satker Kemendikbudristek dan KemenPANRB sebagai instansi Pembina terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemendikbudristek;
- 3 melakukan penyusunan *timeline* program/kegiatan persiapan hingga pengusulan ZI-WBK/WBBM;
- 4 melakukan optimalisasi peran dan fungsi SDM yang tersedia dengan memberdayakan SDM yang ada di Biro Organisasi dan Laksana untuk bertugas selain tugas dan fungsinya, juga ikut bergabung dengan tim Reformasi Birokrasi;
- 5 melakukan pendampingan persiapan dan penilaian pembangunan ZI-WBK/WBBM oleh KemenPANRB;
- 6 memaksimalkan waktu dan tenaga yang ada melalui pendampingan langsung ZI-WBK/WBBM yang terbatas melalui video conference;
- 7 berkoordinasi dengan KemenPANRB terkait kendala dalam mengakses aplikasi;
- 8 melakukan sosialisasi pembangunan ZI pada Satker di Kemendikbudristek yang belum pernah diusulkan;
- 9 berkoordinasi dengan KemenPANRB untuk menjelaskan kekurangan setiap Satker yang tidak lulus memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM;

- 10 Berkoordinasi dengan KemenPANRB terkait jadwal pelaksanaan survei eksternal dalam penilaian ZI WBK/WBBM; dan
- 11 mendorong Satker untuk proaktif menjaring responden pada pelaksanaan survei eksternal dalam penilaian ZI WBK/WBBM agar memenuhi jumlah minimal responden, serta mengupayakan penggunaan fasilitas QR Code dalam penyampaian tautan (*link*) kuesioner survei kepada responden.

Strategi

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, adalah:

- 1 sosialisasi terkait persiapan survei kapasitas organisasi untuk tahun berikutnya kepada seluruh Satker;
- 2 setiap Satker agar selalu melakukan *coaching* kepada seluruh pegawainya agar memahami kinerja individu, kinerja satker, dan hubungan antara kinerja individu dengan kinerja Satker;
- 3 unit utama agar mencatat masukan secara mandiri dalam evaluasi yang dilakukan KemenPANRB, sehingga dapat langsung menyiapkan dokumen tindak lanjutnya;
- 4 setiap unit utama melakukan monev secara berkala, per 4 bulan sekali progres implementasi rencana aksi agen perubahannya;
- 5 perlu ditetapkan penanggung jawab masing-masing program *quick wins* pada masing-masing unit kerja;
- 6 penyampaian tinjau hasil reformasi birokrasi pada unit utama perlu ditindaklanjuti dengan surat Kepala Biro Ortala;
- 7 perlu menyampaikan surat berisi permasalahan dan saran perbaikan terhadap aplikasi survei Menpan;
- 8 komitmen pimpinan dan pegawai pada seluruh unit kerja calon ZI WBK untuk memberikan yang terbaik dalam persiapan hingga pengusulan unit kerja calon ZI WBK. Komitmen pimpinan ditunjukkan dengan upaya pimpinan dalam memberikan bimbingan, arahan dan keterlibatan saat pelaksanaan satker menuju

predikat ZI-WBK/WBBM. Upaya ini dapat terlihat dalam keterlibatan pimpinan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala (area penguatan akuntabilitas);

9 melakukan identifikasi terhadap Satker yang belum melakukan upaya dalam pembangunan ZI WBK/WBBM sebagai Satker sasaran dalam sosialisasi pembangunan ZI WBK/WBBM;

10 sosialisasi rekomendasi dari KemenPANRB terkait hasil evaluasi reformasi birokrasi dan hasil evaluasi pembangunan ZI WBK/WBBM; dan

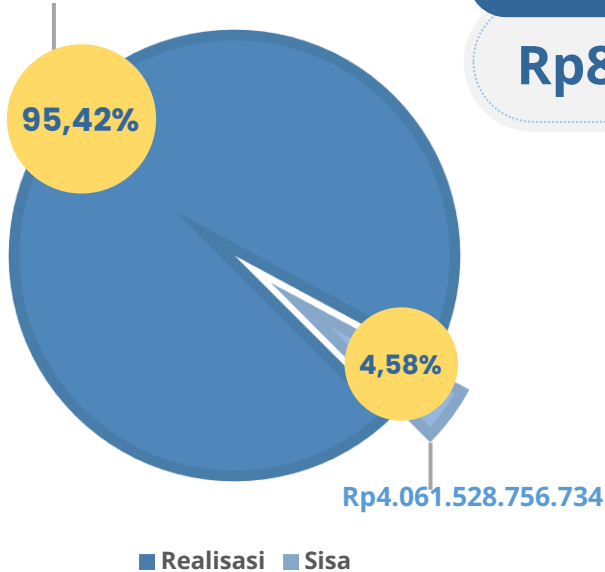
11 memaksimalkan pendayagunaan teknologi dan sumber daya dalam pendampingan ZI WBK melalui aplikasi SIAZIK;

D.

Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Kemendikbudristek tahun 2021 sebesar Rp88.710.158.835.000. Pagu tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian 5 SS dengan 23 IKSS yang terdistribusi ke 9 Unit Eselon I.

Rp84.648.630.078.266

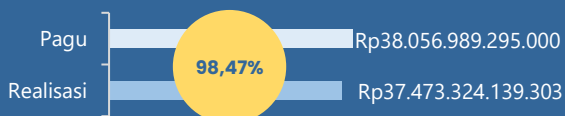


Total Anggaran

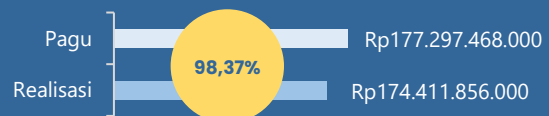
Rp88.710.158.835.000

Capaian Realisasi Anggaran 2021

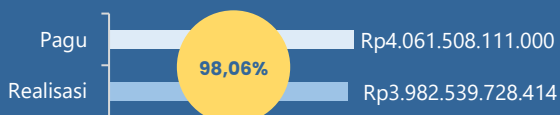
Sekretariat Jenderal



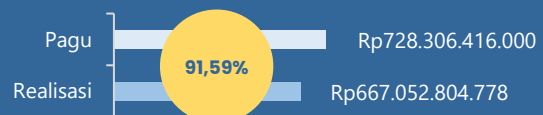
Inspektorat Jenderal



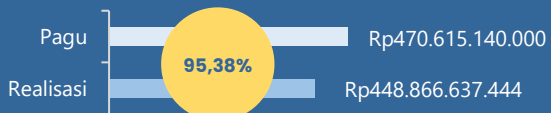
Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen



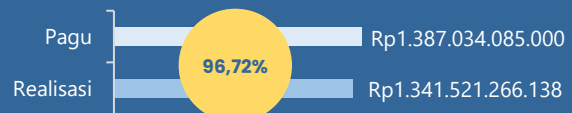
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan



Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



Ditjen Kebudayaan

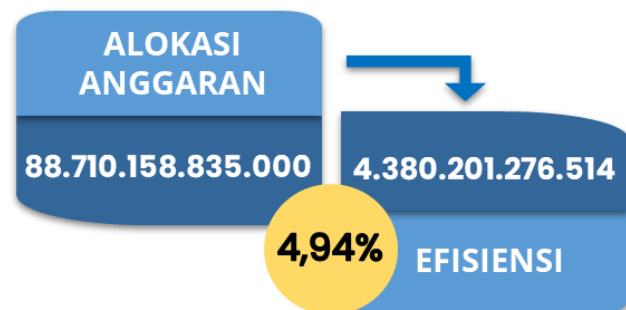




E.

Efisiensi Anggaran

Sesuai instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kemendikbud telah melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2021 sebesar 4,94% atau Rp4.380.201.276.514 dari pagu anggaran sebesar Rp88.710.158.835.000 dengan rata-rata capaian IKSS sebesar 101,92% dari 23 IKSS. Anggaran tersebut beberapa kali direvisi dan direalokasi (refocusing) untuk untuk program-program yang masih memerlukan tambahan anggaran di internal Kemendikbudristek, yaitu:



- 1 pengurangan belanja gaji dan tunjangan kinerja ke-13 dan ke-14
- 2 mendanai penanganan Covid-19 dan dampak yang ditimbulkan serta dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat;
- 3 penanganan kesehatan dan perlindungan sosial kepada masyarakat sebagai dampak pelaksanaan PPKM Darurat;
- 4 penambahan kekurangan gaji dan tunjangan;
- 5 Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) Non PNS;
- 6 Beasiswa Unggulan.

F. Inovasi

Sekolah Penggerak

Sejalan dengan Visi Pendidikan Indonesia yakni mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotongroyong, dan berkebinekaan global



Profil Pelajar Pancasila

Penguatan SDM Sekolah

Penguatan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif (*coaching one to one*) dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemdikbud.

Pembelajaran Dengan Paradigma Baru

Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai nilai-nilai Pancasila, melalui kegiatan pembelajaran di dalam dan luar kelas.

Perencanaan Berbasis Data

Manajemen berbasis sekolah: perencanaan berdasarkan refleksi diri satuan pendidikan

Digitalisasi Sekolah

Penggunaan berbagai platform digital bertujuan mengurangi Kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi dan pendekatan yang disesuaikan.



Pendampingan konsultatif dan asimetris




Program kemitraan antara Kemdikbud dan pemerintah daerah di mana Kemdikbud memberikan pendampingan implementasi Sekolah Penggerak

SMK Pusat Keunggulan

Menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja, serta menjadi rujukan/pengimbas dalam peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya

Lulusan SMK diproyeksikan siap untuk:



-  **Bekerja**
-  **Melanjutkan Studi**
-  **Wirausaha**

BAGAIMANA BENTUK KESELARASAN MENDALAM DAN MENYELURUH SMK PUSAT KEUNGGULAN DENGAN DUNIA KERJA?

Tidak hanya MoU, tapi juga dengan:

- 1** Kurikulum disusun bersama termasuk penguatan aspek *softskills* dan karakter kebermanjaraan untuk melengkapi aspek *hardskills* yang sesuai kebutuhan dunia kerja
- 2** Pembelajaran berbasis *project rili* dari dunia kerja (PBL) untuk memastikan *hardskills* akan disertai *softskills* dan karakter yang kuat
- 3** Jumlah dan peran guru/instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja ditingkatkan secara signifikan (kumulatif minimal mencapai 50 jam/semester/program keahlian)
- 4** Praktik kerja lapangan/industri Minimal 1 semester
- 5** Sertifikasi kompetensi yang sesuai standar dan kebutuhan dunia kerja (bagi lulusan dan bagi guru/instruktur)
- 6** Update teknologi dan pelatihan bagi guru/instruktur secara rutin dari dunia kerja
- 7** Riset terapan mendukung *teaching factory* yang bermula dari kasus atau kebutuhan
- 8** Komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja

8+i Link & Match
Keterlibatan dunia kerja di segala aspek penyelenggaraan pendidikan vokasi

Berbagai kemungkinan kerja sama yang dapat dilakukan dengan dunia kerja, antara lain:

- Donasi dalam bentuk peralatan laboratorium, atau dalam bentuk dan lain sebagainya
- Beasiswa dan/atau Katan dinas



ENAM DUKUNGAN KEMENDIKBUD DALAM PROGRAM SMK PUSAT KEUNGGULAN:

- PENGUATANSDM SMK PK**
Penguatan Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah dan Guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif untuk mewujudkan manajemen dan pembelajaran berbasis dunia kerja
- PEMBELAJARAN KOMPETENSI SIAP KERJA DAN BERKARAKTER**
Penyelenggaraan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan pengembangan karakter yang sesuai nilai-nilai Pancasila
- PENGUATAN BELAJAR PRAKTIK PESERTA DIDIK**
Bantuan dana riil untuk peningkatan sarana prasarana yang berfokus pada alat dan perlengkapan sarana belajar praktik siswa yang berstandar dunia kerja
- MANAJEMEN KELOLA BERBASIS DATA**
Pendampingan pada sekolah untuk melaksanakan manajemen berbasis sekolah, termasuk perencanaan berdasarkan evaluasi data dan penggunaan platform digital
- PENDAMPINGAN OLEH PERGURUAN TINGGI**
Pendampingan SMK Pusat Keunggulan oleh perguruan tinggi dalam perencanaan dan pengelolaan program, dalam rangka mengembangkan sinergi dengan dunia kerja
- SINERGI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH**
Kolaborasi dan koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan secara intensif untuk menciptakan dukungan penyelenggaraan SMK Pusat Keunggulan yang berkesinambungan

INOVASI PROGRAM SMK PUSAT KEUNGGULAN: PENDAMPINGAN OLEH PERGURUAN TINGGI

-  Perguruan tinggi dengan pengalaman dan rekam jejak baik bekerja sama dengan dunia kerja diharapkan membantu mempercepat akses SMK untuk bermitra dengan dunia kerja ✓ memperkuat SMK dalam perencanaan dan pengelolaan program
-  Mendorong kesinambungan Perguruan Tinggi dan SMK dalam pengembangan kepakaran/kompetensi keahlian dan berjejaring
-  Mewujudkan praktik baik kemitraan dunia kerja dan pendidikan vokasi dalam mendorong pertumbuhan ekosistem vokasi

Sektor Prioritas (895 SMK)

- Ekonomi Kreatif**
- Pemesinan dan Konstruksi**
- Hospitality**
- Care Services**
- Maritim**
- Pertanian**
- Kerja Sama Luar Negeri**

KIP Kuliah Merdeka

Dengan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup yang jauh lebih tinggi, KIP Kuliah memerdekakan calon mahasiswa untuk meraih mimpinya

KIP Kuliah Merdeka: mulai angkatan mahasiswa baru tahun 2021, skema KIP Kuliah diubah untuk memberi bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup yang jauh lebih tinggi.

	Skema KIP Kuliah 2020	Skema KIP Kuliah baru 2021
Anggaran	Rp1,3 triliun	Rp2,5 triliun
Biaya pendidikan disesuaikan dengan prodi	Rata-rata besaran kuliah Rp2,4 juta per semester.	<ul style="list-style-type: none"> di berakreditasi A: maksimal Rp12 juta di berakreditasi B: maksimal Rp4 juta di berakreditasi C: maksimal Rp2,4 juta
Biaya hidup disesuaikan dengan indeks harga daerah	Biaya hidup Rp700.00 per bulan, disamakan untuk semua daerah seluruh Indonesia.	ya hidup dibagi 5 klaster daerah: <ul style="list-style-type: none"> Daerah klaster 1: Rp800.000 Daerah klaster 2: Rp950.000 Daerah klaster 3: Rp1.100.000 Daerah klaster 4: Rp1.250.000 Daerah klaster 5: Rp1.400.000



Calon mahasiswa tidak ragu memilih prodi unggulan pada perguruan tinggi terbaik dimanapun lokasinya di Indonesia.



Orang tua lebih percaya diri untuk mendorong anaknya yang memiliki potensi untuk melanjutkan ke jenjang kuliah.



Perguruan Tinggi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada calon mahasiswa kurang mampu untuk masuk ke prodi unggulan.



Kualitas SDM meningkat dengan memastikan calon mahasiswa yang berpotensi dan kurang mampu tetap dapat kuliah di prodi unggulan.



Bagi calon mahasiswa yang kurang mampu, tetapi memiliki ambisi besar:

Manfaatkanlah program KIP Kuliah Merdeka ini untuk meraih masa depan.



Ada beberapa kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai penerima KIP Kuliah Merdeka, di antaranya melalui:



Jalur seleksi UTBK-SBMPTN.



Seleksi Mandiri PTN bagi siswa kurang mampu yang tidak lolos SNMPTN dan SBMPTN, Anda masih bisa mendaftar KIP Kuliah melalui jalur seleksi mandiri PTN.



Ataupun melalui seleksi masuk PTS, bagi siswa kurang mampu yang berminat masuk ke PTS, Anda dapat mendaftar KIP Kuliah kapan saja hingga masa pendaftaran PTS selesai.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui Sistem KIP Kuliah di kip-kuliah.kemdikbud.go.id
Mohon perhatikan batas waktu untuk setiap jenis seleksi.

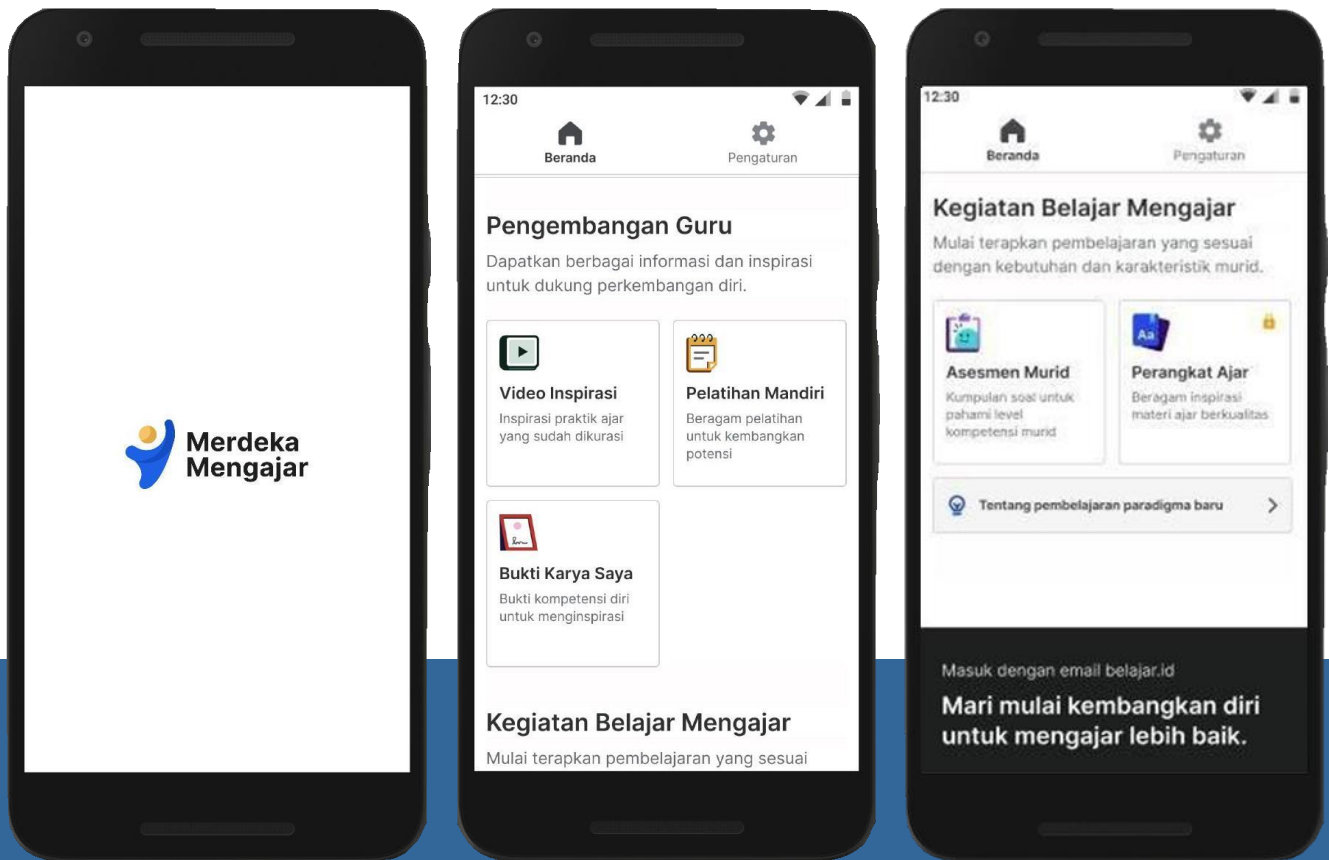


Batas Waktu:

1 April 2021

Agustus – Oktober 2021
(bergantung kepada jadwal seleksi mandiri setiap PTN)

Oktober 2021
(bergantung kepada jadwal seleksi masuk setiap PTS)



Platform Merdeka Belajar

Platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan Pelajar Pancasila



Kemendikbudristek bekerja sama dengan GovTech Edu - PT Telkom Indonesia dalam mengembangkan Platform Merdeka Mengajar

Sistem Informasi Perbukuan

Untuk mendukung ekosistem perbukuan dan pengembangan Kurikulum



Buku untuk berbagai jenjang pendidikan

PAUD	PAUD Pendidikan Anak Usia Dini Buku Teks K-13 Buku Sekolah Penggerak
SD	SD Sekolah Dasar Buku Teks K-13 Buku Sekolah Penggerak
SMP	SMP Sekolah Menengah Pertama Buku Teks K-13 Buku Sekolah Penggerak
SMA/SMK	SMA/SMK Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Buku Teks K-13 Buku Sekolah Penggerak



Akses melalui <https://buku.kemdikbud.go.id>



Kurikulum Merdeka

Diperkenalkan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai media



Pilihan 1

Kurikulum 2013 secara penuh



Pilihan 2

Kurikulum Darurat yaitu Kurikulum 2013 yang disederhanakan



Pilihan 3

Kurikulum Merdeka



Sikerma Diksi

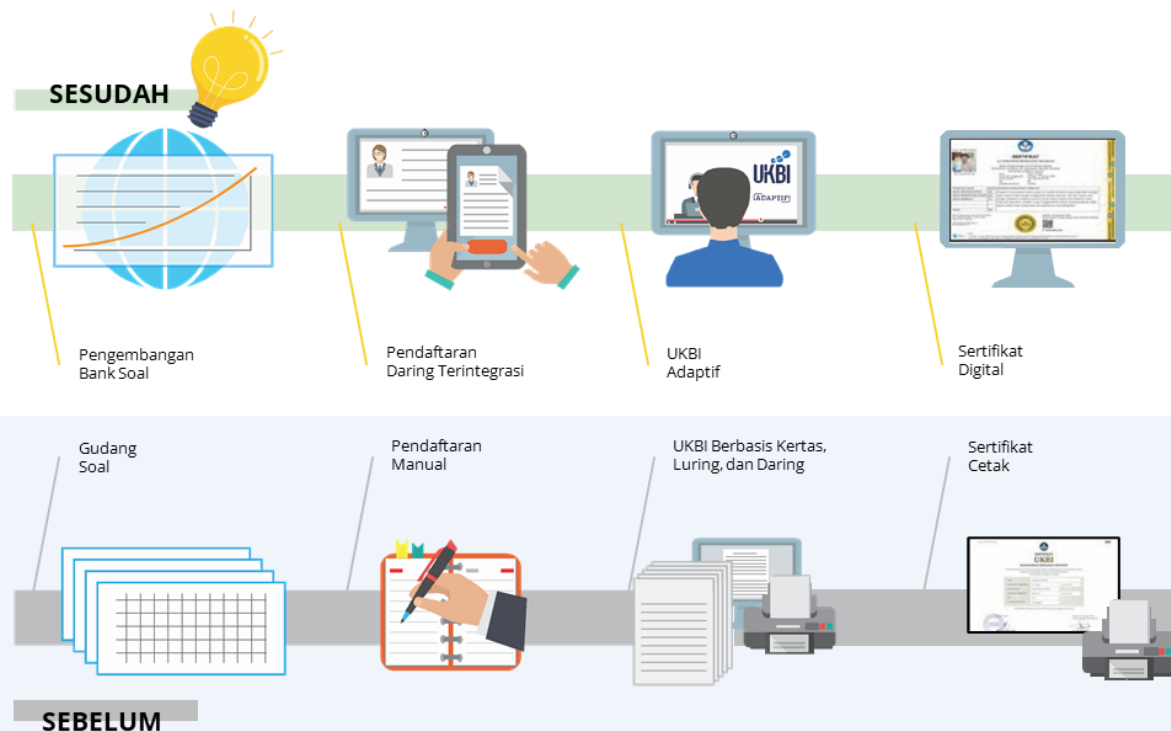
Pengembangan Sistem Data Kerja Sama Ditjen Pendidikan Vokasi (Sikerma Diksi)



UKBI Adaptif Merdeka

Perkembangan mutakhir dari UKBI yang memuat banyak keunggulan

UKBI Adaptif Merdeka yang merupakan perkembangan mutakhir dari UKBI memuat banyak keunggulan. Dengan berbagai keunggulan tersebut, tercipta beragam peluang dalam layanan kemahiran berbahasa, seperti peningkatan jumlah peserta uji, keefektifan waktu uji, dan ketepatan hasil uji. Dengan sistem yang sepenuhnya daring, terdapat tantangan baru bagi peuji dan penguji. Peserta cukup berfokus pada tes di tempatnya tanpa harus terkendala berpindah ke lokasi uji yang khusus. Akan tetapi, keberadaan perangkat uji menjadi syarat mutlak, seperti laptop dan perangkat jemala.



G.

Penghargaan







KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
KATEGORI SANGAT BAIK

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI	361
	KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS	360.5
	KEMENTERIAN SOSIAL	336.5
	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	335.5
	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	333
	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	329
	KEMENTERIAN KESEHATAN	327.5





Program *Collaborative* dan *Crosscutting*

No	Program di Kemendikbudristek	Unit Eselon Pengampu
1	Dukungan Manajemen	Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal
2	PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dan Sekretariat Jenderal
3	Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, dan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan
4	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	Badan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Ditjen Kebudayaan
5	Pendidikan Tinggi	Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
6	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Ditjen Pendidikan Vokasi

Restrukturisasi Program berbasis prinsip *Crosscutting*

Penyederhanaan program di Kemendikbudristek yang sebelumnya berbasis pada jumlah unit Eselon I pada tahun 2020, yakni 9 program, menjadi 6 program, sebagai berikut:

Penyederhanaan program di atas mendorong kerja sama dan kolaborasi antarunit Eselon I dalam mendukung tujuan Kemendikbudristek yang berdampak pada efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu, program *collaborative* dan *crosscutting* tersebut untuk memastikan sasaran target menjadi terpusat dan berbasis pada prinsip ketuntasan. Program *collaborative* dan *crosscutting* yang dilakukan di Kemendikbudristek telah berdampak pada efisiensi anggaran khususnya pada program Dukungan Manajemen. Selain itu, efisiensi anggaran juga terjadi pada desain anggaran program dan kegiatan karena berkurangnya program dan kegiatan yang tumpang tindih antarunit Eselon I.

Program *Collaborative* dan *Crosscutting*

Beberapa program prioritas berbasis *collaborative* dan *crosscutting* di Kemendikbudristek untuk mendukung Kebijakan Merdeka Belajar tahun 2021, antara lain adalah sebagai berikut:

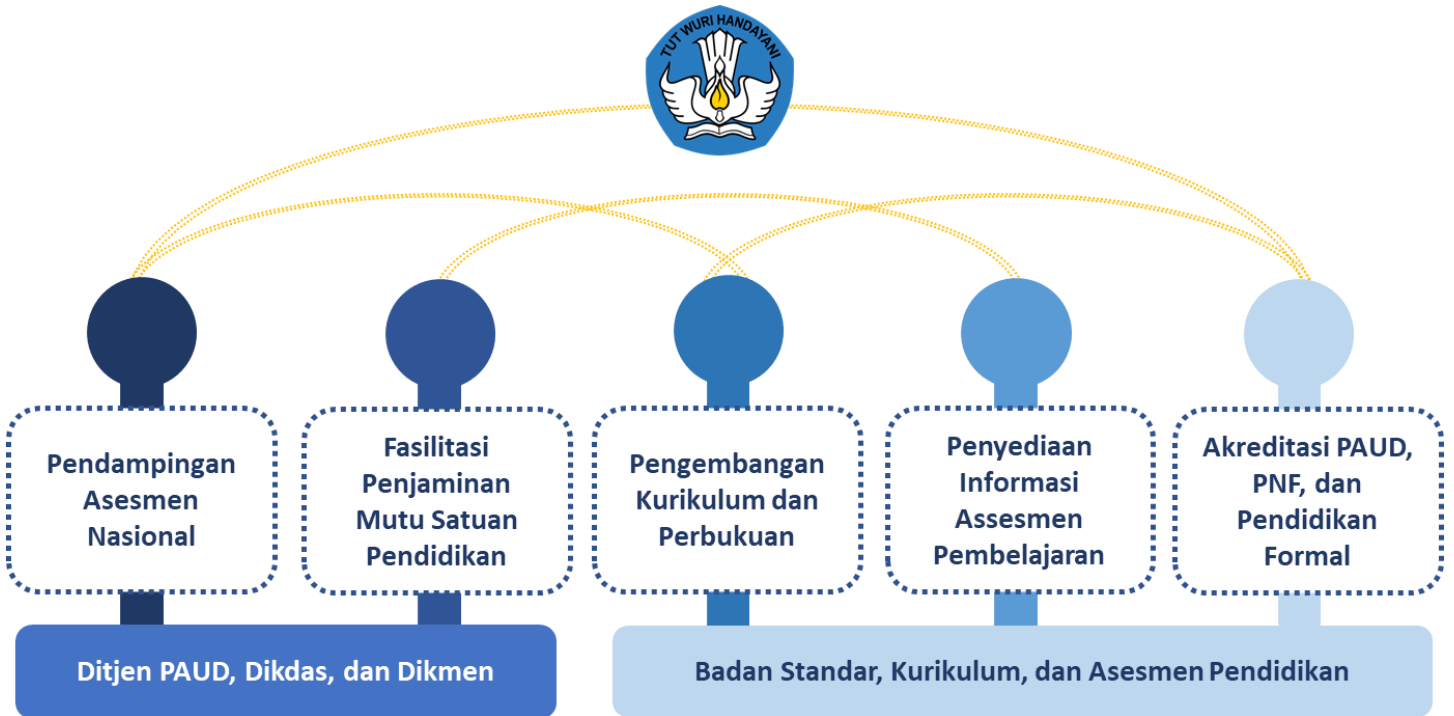
1. Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Peningkatan Kompetensi Guru



Program Collaborative/Crosscutting pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

Penyelarasan dan *crosscutting* program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Peningkatan Kompetensi Guru di atas, yang dilakukan pada sasaran target. Penyelarasan sasaran target adalah Program Guru Penggerak diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang ditargetkan juga menjadi Sekolah Penggerak. Selanjutnya, sasaran target Sekolah Penggerak didampingi dan dibina oleh Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, dalam hal ini oleh Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di 34 Provinsi, Selain itu, Direktorat pusat pada PAUD, Dikdas, dan Dikmen juga melakukan intervensi dan advokasi kepada pemerintah daerah; Sedangkan Ditjen Guru dan tenaga Kependidikan fokus untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikannya. Program kolaboratif ini memastikan pembagian peran menjadi lebih jelas, dan tidak tumpang tindih.

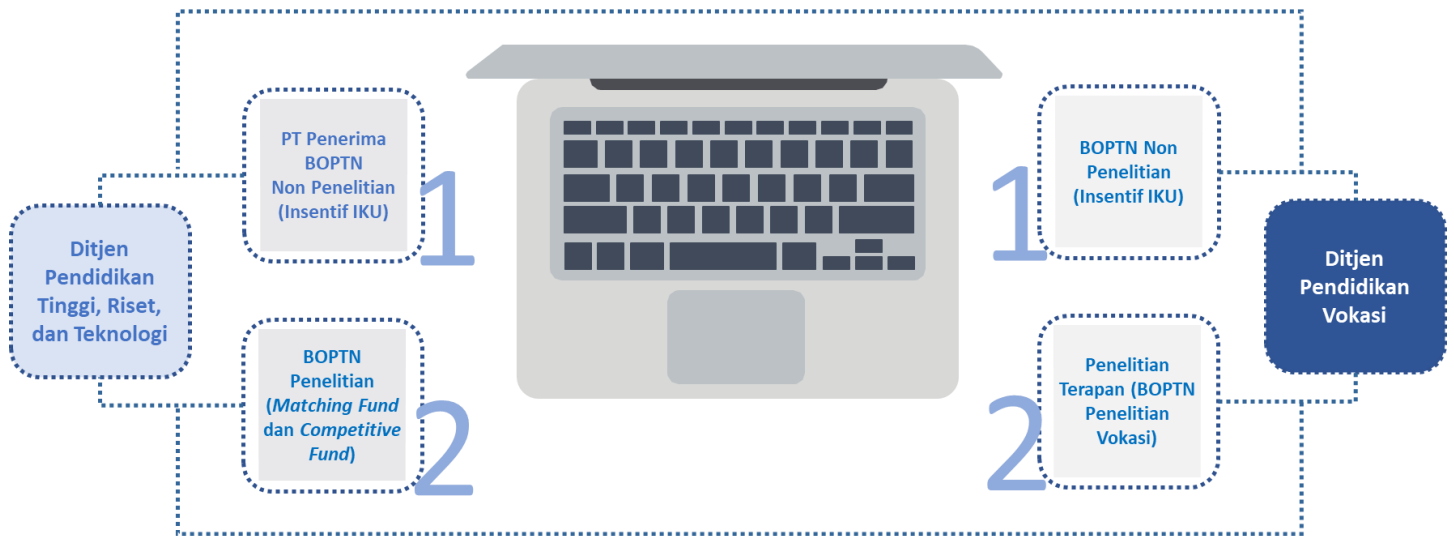
2. Peningkatan Kualitas Kurikulum, Asesmen Nasional, dan Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan



Program Collaborative/Crosscutting pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

Program peningkatan kualitas kurikulum, asesmen nasional, dan penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan juga melibatkan lebih dari satu unit Eselon I di Kemendikbudristek. Bentuk program kolaboratif dimaksud yakni, pengembangan materi dan sistem asesmen nasional dilakukan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP); pendampingan kepada pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Sekolah Penggerak dilakukan oleh Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, serta pendampingan kepada satuan pendidikan diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Selain internal Kemendikbudristek, peran pemerintah daerah dan satuan pendidikan juga dipetakan dan dikoordinasikan.

3. Insentif Indikator Kinerja Utama (IKU), Peningkatan Riset dan Inovasi Perguruan Tinggi



Program *Collaborative/Crosscutting* pada Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Ditjen Pendidikan Vokasi

Pencapaian IKU pada Ditjen Diktiristek dan Ditjen Pendidikan Vokasi didesain di bawah payung Kebijakan Kampus Merdeka sehingga desain program dan kegiatan dilakukan secara kolaboratif. Beberapa program Kampus Merdeka yang dilaksanakan baik di Ditjen Diktiristek maupun di Ditjen Pendidikan Vokasi antara lain program Mobilitas Internasional Mahasiswa, *Matching Fund* dan *Competitive Fund*, dan Kedaireka. Hal ini berdampak pada efisiensi anggaran pada tahap desain program. Selain itu, program kolaboratif ini juga berdampak pada keselaran kebijakan antar kedua Ditjen tersebut sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

BAB IV

Penutup



04

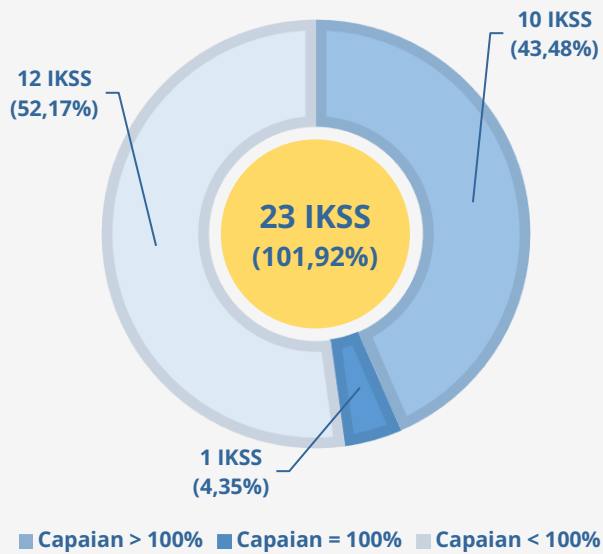
Ringkasan Kinerja
Langkah Kerja ke Depan

Ringkasan Kinerja

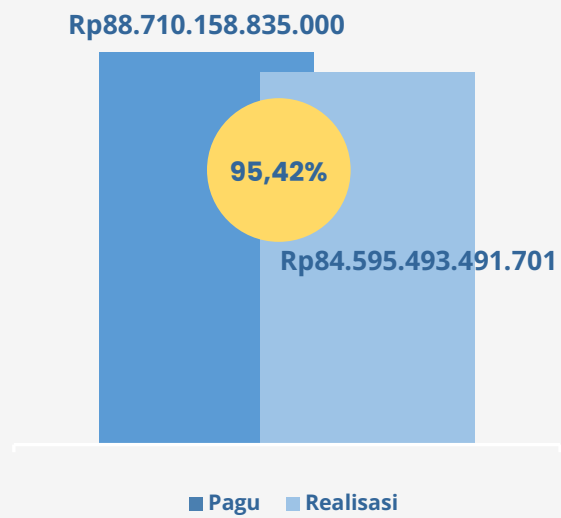
Sepanjang tahun 2021, Kemendikbudristek telah melakukan berbagai strategi dan inovasi untuk memastikan layanan pendidikan dan kebudayaan dapat dirasakan oleh masyarakat secara optimal, utamanya peserta didik dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung. Segala upaya dilakukan untuk memastikan lebih kurang 60 juta peserta didik mendapatkan pembelajaran yang optimal, baik melalui pembelajaran daring maupun luring, dengan memanfaatkan bahan-bahan belajar yang disediakan dan yang dapat diakses secara luas melalui *platform-platform* digital. Berbagai tantangan juga dihadapi di tahun 2021, antara lain ketersediaan jaringan internet di wilayah yang sulit terjangkau, kesulitan peserta didik untuk mengoptimalkan pembelajaran daring, utamanya untuk peserta didik kelas awal, keterbatasan perangkat digital sebagai alat pembelajaran, serta keterbatasan pendidik dan tenaga pendidik berkualitas di beberapa wilayah Indonesia juga mendorong Kemendikbudristek bersama seluruh pemangku kepentingan melakukan berbagai terobosan-terobosan untuk mengatasi tantangan tersebut, sebagaimana sudah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya.

Terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi pada tahun 2021, Kinerja Kemendikbudristek tahun 2021 menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata 23 IKSS, yang sekaligus sebagai IKU, yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Mendikbudristek tercapai sebesar 101,92%. Selain itu, serapan anggaran Kemendikbudristek tahun 2021 yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan tercapai sebesar 95,42%, dengan efisiensi sebesar 4,94%.

Capaian Kinerja



Serapan Anggaran



Langkah Kerja ke Depan

Memperhatikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi di tahun 2021, Kemendikbudristek menetapkan langkah kerja ke depan untuk mengoptimalkan layanan pendidikan dan kebudayaan sebagai berikut:

- 1 melanjutkan dan melakukan berbagai strategi dan inovasi untuk mengoptimalkan layanan pendidikan dan kebudayaan pada masa pandemi Covid-19, antara lain penyediaan kurikulum dalam kondisi khusus (Kurikulum Darurat), Kurikulum Prototipe (Kurikulum Merdeka), dan Kurikulum 2013 sebagai alternatif pilihan bagi satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan;
- 2 menyediakan bahan belajar berkualitas bagi peserta didik serta penyediaan berbagai perangkat ajar serta pelatihan dan penyediaan sumber belajar bagi guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan melalui *platform digital*;
- 3 mendorong peningkatan angka partisipasi peserta didik khususnya jenjang PAUD, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi melalui pemberian bantuan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu, mendukung pembentukan satu PAUD satu Desa, bagi wilayah yang belum memiliki PAUD, meningkatkan

- koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SPM PAUD dan pendidikan menengah, serta mendukung ketersediaan perguruan tinggi di wilayah terpencil sesuai dengan karakteristik daerahnya;
- 4** penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak swasta untuk meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan teknologi informasi pada satuan pendidikan untuk mendukung pembelajaran daring;
 - 5** penguatan kolaborasi antara pendidikan tinggi dengan IDUKA melalui kolaborasi dalam penyusunan kurikulum, praktisi industri mengajar di kampus, kerja sama dosen dan mahasiswa dengan industri, program magang, untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, atau lulusan yang siap berwirausaha;
 - 6** meningkatkan budaya riset pada perguruan tinggi untuk menghasilkan riset yang berkualitas melalui pembelajaran berbasis proyek (*project-based*) dan pemecahan masalah, menyediakan bantuan riset bagi dosen, serta mendorong kolaborasi riset antara mahasiswa, dosen, industri, dan perguruan tinggi lainnya;
 - 7** mengoptimalkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pelestarian dan penguatan budaya, bahasa Indonesia, bahasa dan sastra daerah, serta peningkatan peran bahasa Indonesia di tingkat global; dan
 - 8** perbaiki tata kelola Kemendikbudristek melalui penguatan reformasi birokrasi untuk mengoptimalkan layanan pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Lampiran



05

Pernyataan Telah Direviu
Perjanjian Kinerja 2021 (Awal)
Perjanjian Kinerja 2021 (Revisi)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270

Telepon 021-5737104

Laman www.itjen.kemdikbud.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2021 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 19 Februari 2022

Inspektur Jenderal



Chatarina Muliana

NIP197211191996032002



Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nadiem Anwar Makarim

Jabatan : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 29 Januari 2021

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Nadiem Anwar Makarim

Target Kinerja

#	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SS 1] Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	[IKSS 1.1] Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	42,62
		[IKSS 1.2] Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	104,48
		[IKSS 1.3] Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	94,34
		[IKSS 1.4] Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	88,39
		[IKSS 1.5] Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	34,56
2	[SS 2] Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	[IKSS 2.1] Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	3,25
		[IKSS 2.2] Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	58,2
		[IKSS 2.3] Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	27,4
		[IKSS 2.4] Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca	394
		[IKSS 2.5] Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	385
		[IKSS 2.6] Nilai rata-rata hasil PISA: Sains	399
		[IKSS 2.7] Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	48,3
		[IKSS 2.8] Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	65,25
		[IKSS 2.9] Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	48,33
		[IKSS 2.10] Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri	18
		[IKSS 2.11] Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri	71,8

3	[SS 3] Menguatnya karakter peserta didik	[IKSS 3.1] Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	35
		[IKSS 3.2] Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	15
		[IKSS 3.3] Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	15
4	[SS 4] Meningkatnya kemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	[IKSS 4.1] Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia	515
		[IKSS 4.2] Jumlah penutur muda bahasa daerah	50.000
		[IKSS 4.3] Indeks Pembangunan Kebudayaan	57,3
5	[SS 5] Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	[IKSS 5.1] Opini laporan keuangan Kemendikbud	WTP
		[IKSS 5.2] Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	73
		[IKSS 5.3] Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud	82
		[IKSS 5.4] Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	81

No	Nama Program	Alokasi
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 4.669.792.391.000
2	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	Rp. 11.868.301.547.000
3	Program Pendidikan Tinggi	Rp. 28.205.232.540.000
4	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	Rp. 1.087.702.794.000
5	Program Dukungan Manajemen	Rp. 23.433.723.791.000
6	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Rp. 12.269.248.017.000
	TOTAL	Rp. 81.534.001.080.000

Jakarta, 29 Januari 2021

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Nadiem Anwar Makarim



Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nadiem Anwar Makarim

Jabatan : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 14 Desember 2021

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Nadiem Anwar Makarim

Target Kinerja

#	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SS 1] Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	[IKSS 1.1] Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	42.62
		[IKSS 1.2] Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	104.48
		[IKSS 1.3] Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	94.34
		[IKSS 1.4] Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	88.39
		[IKSS 1.5] Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	34.56
2	[SS 2] Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	[IKSS 2.1] Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	3.25
		[IKSS 2.2] Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	58.2
		[IKSS 2.3] Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	27.4
		[IKSS 2.4] Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	48.3
		[IKSS 2.5] Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	65.25
		[IKSS 2.6] Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	48.33
		[IKSS 2.7] Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri	18
		[IKSS 2.8] Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri	71.8
3	[SS 3] Menguatnya karakter peserta didik	[IKSS 3.1] Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	35
		[IKSS 3.2] Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	15
		[IKSS 3.3] Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	15

4	[SS 4] Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	[IKSS 4.1] Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia	515
		[IKSS 4.2] Jumlah penutur muda bahasa daerah	50.000
		[IKSS 4.3] Indeks Pembangunan Kebudayaan	57.3
5	[SS 5] Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	[IKSS 5.1] Opini laporan keuangan Kemendikbud	WTP
		[IKSS 5.2] Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	73
		[IKSS 5.3] Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud	82
		[IKSS 5.4] Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	81

No	Nama Program	Alokasi
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 4.774.670.911.000
2	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	Rp. 11.692.637.359.000
3	Program Pendidikan Tinggi	Rp. 33.069.432.578.000
4	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	Rp. 835.259.585.000
5	Program Dukungan Manajemen	Rp. 21.587.189.329.000
6	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Rp. 16.750.969.073.000
	TOTAL	Rp. 88.710.158.835.000

Jakarta, 14 Desember 2021

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Nadiem Anwar Makarim



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
REPUBLIC INDONESIA
www.kemdikbud.go.id